



Publikasi  
Media  
Discovery  
Berkelanjutan

Book Chapter

# AKUNTANSI

# PUBLIK

2024 EDITION

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



# **BOOK CHAPTER AKUNTANSI PUBLIK**

## **Penulis:**

Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si; Dr. Henny Murtini S.E., M.Si;  
Retnoningrum Hidayah, SE., M.Si., MSc., QIA., CRMP; Drs. Fachrurrozie,  
M.Si; Dessy Ekaviana, S.Pd., M.Ak; Tri Susilo Wahyu Aji, S.E., M.Sc;  
Meilani Intan Pertiwi, M.Acc; Atik Ul Mussanadah, S.Pd., M.Sc; Nur Anita,  
M.Sc; Ardhana Reswari Hasna Pratista, S.E., M.Sc; Caraka Hadi, S.Ak.,  
M.Sc; Mariana Ratih Ratnani, S.Ak., M.Sc; Muhammat Bayu Aji Wibowo;  
Afila Dwi Hanifah; Astri Mega Sari; Nazilatul Ulya; Siti Khom Satun;  
Valentina Febria Eka Amanda; Nabila Rahmah Adiningtyas; Ammar  
Hardiansyah

## **Editor :**

Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si; Tri Susilo Wahyu Aji, S.E., M.Sc; Dessy  
Ekaviana, S.Pd., M.Ak; Kuat Waluyo Jati, SE., M.Si; Atik Ul Mussanadah,  
S.Pd., M.Sc; Ardhana Reswari Hasna Pratista, S.E., M.Sc; Mariana Ratih  
Ratnani, M.Sc

## **Layouters:**

Cindi Rizqia Stefani; Salsabilah Aswan; Risma Ardellia Putri; Dini Milatil  
Mardiyah

## **Desain:**

Tri Susilo Wahyu Aji, S.E., M.Sc.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku **Book Chapter Akuntansi Publik** Jilid 1 ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kontribusi dari Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, dalam upaya menghadirkan wawasan tentang akuntansi berkelanjutan.

Di tengah tantangan global terkait lingkungan dan sosial, akuntansi berkelanjutan menjadi topik yang sangat penting. Buku ini berisi berbagai pembahasan mengenai konsep dan praktik akuntansi yang mendukung keberlanjutan, dengan harapan dapat menjadi panduan bagi para pembaca dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini, terutama kepada para penulis dan editor yang telah memberikan kontribusinya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca yang tertarik dengan topik akuntansi berkelanjutan.

Semarang, Oktober 2024

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

COVER.....	1
HALAMAN PENULIS.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
BAB I.....	9
PENGARUH PROFITABILITAS DAN <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i> .....	9
Pendahuluan.....	10
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	13
Metode.....	17
Hasil.....	20
Daftar Pustaka .....	23
BAB II.....	26
Pengaruh Komitmen Institusi, Kemandirian Keuangan, Internasionalisasi, dan Status Akreditasi terhadap Pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia .....	26
Pendahuluan.....	27
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	30
Metode.....	34
Hasil.....	38
Kesimpulan .....	49
Referensi.....	50
BAB III .....	54
Determinan <i>Internal Control Disclosure</i> pada Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Indonesia.....	54
Pendahuluan.....	55
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	58
Metode.....	62
Hasil.....	66
Kesimpulan .....	73
Referensi.....	75
BAB IV.....	78
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN METODE WEIGHTED AVERAGE.....	78



Pendahuluan.....	79
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	84
Metode.....	87
Hasil.....	88
Kesimpulan .....	92
Daftar Pustaka .....	93
BAB V .....	96
Determinants of financial performance of BLUD regional public hospitals .....	96
Pendahuluan.....	97
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	101
Metode.....	106
Hasil.....	110
Kesimpulan .....	117
Referensi.....	118
BAB VI.....	122
Determinan Kemandirian Keuangan Daerah.....	122
Pendahuluan.....	123
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	127
Metode.....	129
Kesimpulan .....	135
Daftar Pustaka .....	135
BAB VII.....	138
Audit, Profitabilitas, dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Enterprise risk management dengan Dewan Direksi sebagai Variabel Moderasi..	138
Pendahuluan.....	139
Kesimpulan .....	161
Daftar Pustaka .....	163
BAB VIII .....	166
PENGARUH INTENSITAS MODAL, <i>LEVERAGE</i> , DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI .....	166
Pendahuluan.....	167
Teori dan Pengembangan Hipotesis.....	170
Metode.....	175
Hasil.....	176
Hasil dan Pembahasan .....	178
Daftar Pustaka .....	186

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional Variabel .....	19
Tabel 1. 2 Uji F.....	21
Tabel 1. 3 Uji t.....	21
Tabel 2. 1 Definisi Operasional Variabel .....	35
Tabel 2. 2 Statistik Deskriptif .....	38
Tabel 2. 3 Hasil Model Regresi Linear Berganda .....	43
Tabel 2. 4 Hasil uji hipotesis penelitian.....	44
Tabel 3. 1 Nilai Item Pengukuran Internal Control Disclosure .....	63
Tabel 3. 2 Operasional Variabel .....	64
Tabel 3. 3 Analisis Statistik Deskriptif .....	67
Tabel 3. 4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	68
Tabel 3. 5 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	69
Tabel 4. 1 Definsi Operasional.....	88
Tabel 4. 2 Hasil Penelitian.....	89
Tabel 5. 1 Hasil KMO .....	108
Tabel 5. 2 Operasional Variabel .....	110
Tabel 5. 3 Statistik Deskriptif .....	111
Tabel 5. 4 Hasil Uji Normalitas.....	112
Tabel 5. 5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	112
Tabel 5. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	112
Tabel 5. 7 Analisis Regresi Data Panel .....	113
Tabel 5. 8 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian .....	117
Tabel 6. 1 Definisi Operasional Variabel .....	130
Tabel 6. 2 Hasil Analisis Deskriptif.....	131
Tabel 6. 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	132
Tabel 6. 4 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	132
Tabel 7. 1 Identifikasi Sampel Penelitian.....	148
Tabel 7. 2 Definisi Operasional .....	149
Tabel 7. 3 Analisis Statistik Deskriptif .....	149
Tabel 7. 4 Hasil Loading Factor.....	150
Tabel 7. 5 Nilai Average Variance Extracted (AVE) .....	151
Tabel 7. 6 Cross Loading.....	151
Tabel 7. 7 Reliabilitas .....	152
Tabel 7. 8 Nilai R-Square.....	152
Tabel 7. 9 Effect Size.....	153
Tabel 7. 10 Hasil Uji Goodness of Fit (GoF).....	153
Tabel 7. 11 Hasil Uji Stone-Geisser's (Q-Square).....	154
Tabel 7. 12 Ringkasan Hasil Hipotesis .....	154
Tabel 8. 1 Penerimaan Pajak.....	166

Tabel 8. 2 Ringkasan Definisi Operasional .....174  
Tabel 8. 3 Hasil Uji Normalitas .....175  
Tabel 8. 4 Hasil Uji Multikolinearitas .....175  
Tabel 8. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....176  
Tabel 8. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....176  
Tabel 8. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....177  
Tabel 8. 8 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T) .....177

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	34
Gambar 2. 2 Grafik Rata-Rata Komponen Intellectual Capital Disclosure...	40
Gambar 3. 1 Grafik Pengungkapan Internal Control pada Pemerintah Daerah di Indonesia .....	56
Gambar 3. 2 Grafik Pengungkapan Internal Control berdasarkan Komponen COSO pada Pemerintah Daerah di Indonesia.....	57
Gambar 3. 3 Kerangka Berpikir .....	62



# BAB I

## PENGARUH PROFITABILITAS DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**Muhammat Bayu Aji Wibowo<sup>1)</sup>, Hasan Mukhibad<sup>2)</sup>,  
Nur Anita<sup>3)</sup>**

Accounting study program, Faculty of Economics and  
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[bayuajiwibowo22@gmail.com<sup>1\)</sup>](mailto:bayuajiwibowo22@gmail.com),

[hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:hasanmukhibad@mail.unnes.ac.id),

[nuranita@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:nuranita@mail.unnes.ac.id)



**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas dan Corporate Governance terhadap tax avoidance. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022 dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2018-2022 dari Perusahaan sampel yang dipublikasikan pada website masing-masing Perusahaan Manufaktur. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (NPM) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negative dan signifikan terhadap tax avoidance, kemudian kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : tax avoidance, Corporate governance, profitabilitas

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta, tentunya membutuhkan sumber dana yang besar untuk menjalankan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Sumber dana yang dibutuhkan negara bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pajak saat ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pentingnya pajak sebagai pendukung perekonomian mengharuskan negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2017, rasio pajak turun menjadi 9,98% dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,37%, dengan realisasi penerimaan Rp. 1.151,03 triliun atau 89,67% dari target Rp. 1.283,57 triliun. Pada tahun 2018 rasio pajak



sedikit naikmenjadi 10,24% dengan nilai realisasi Rp. 1.315,51 triliun atau 92,23% daritarget Rp. 1.424 triliun. Namun pada tahun 2019 rasio pajak kembali turunmenjadi 9,77% dengan nilai realisasi Rp. 1.332,06 triliun atau 84,44% dari targetRp. 1.577,56 triliun. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 bertepatanadengan adanya pandemi Covid-19. Rasio pajak turun menjadi 8,33% dengan nilai realisasi Rp. 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target pajak sebesar Rp. 1.198,82 triliun.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketigaatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada PasalAyat 1 bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018)

Menurut Suandy (2008) pajak merupakan pemindahan sumber daya darisektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak juga merupakan sumberpenerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayaipengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.Sedangkan bagi perusahaan, pajak ialah beban yang akan mengurangi laba bersihbaik untuk dibagikan untuk pemegang saham (Shareholder) maupun untuk diinvestasikan kembali.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa. Negara menghendaki kepatuhan membayar pajak (tax compliance) kepada rakyatnya. Negara mewajibkan rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu bagi wajib pajak baik pribadi maupun perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih penghasilan atau perusahaan. Oleh karena itu wajib pajak pun akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin, menghindari pajak, atau bahkan tidak membayar pajak. Upaya penghindaran pajak oleh

wajib pajak bisa dilakukan secara legal (tax avoidance) dan secara ilegal (tax evasion).

Subagiastra (2016) menyebutkan bahwa tax avoidance adalah strategi untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes). Secara umum ada tiga cara yang digunakan wajib pajak dalam melakukan tax avoidance yaitu, wajib pajak menahan diri untuk membeli barang-barang yang terkena pajak, melakukan transfer pricing, dan melakukan tax planning.

Pada tahun 2019 di Indonesia pernah terjadi kasus penghindaran pajak oleh PT Benteol Internasional Investama. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun.

Tax Justice Network pada tahun 2020 juga melaporkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Sebagian besar kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak melaporkan jumlah laba sebenarnya yang diperoleh dari negara tempat bisnis berdiri. Dengan demikian, suatu badan usaha akhirnya akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan dari kasus wajib pajak pribadi, rakyat yang mempunyai harta akan menyembunyikan aset dan tidak melaporkan pendapatan mereka yang berada di luar negeri sehingga terhindar dari pembayaran pajak dalam nilai besar.



Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia adalah sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu Self Assessment System. Pada sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutangnya sendiri. Wajib pajak akan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Selain kepatuhan pajak yang diwajibkan oleh negara, perusahaan perlu membentuk tata kelola yang baik guna meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Dari fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun tersebut mengindikasikan masih banyaknya praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian yang besar karena kehilangan sumber penerimaan dari pajak. Oleh karena itu, adanya Corporate Governance (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek tax avoidance.

Menurut Friese, Link dan Mayer (2006), aturan mengenai corporate governance dan implementasi corporate governance mempengaruhi cara perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak secara professional dengan tidak melanggar aturan pemerintah.

Pemenuhan kewajiban perpajakan didasarkan pada laba perusahaan. Perusahaan tentunya akan berusaha untuk mendapatkan laba yang besar, namun seiring dengan laba yang besar tersebut maka pajak terutang perusahaan juga akan meningkat. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat diukur dengan rasio profitabilitas.

### **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori mengenai perilaku taat seseorang terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Menurut Tyler (1990) didapatnya dua perspektif dalam literatur sosiologi terkait kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normative. Perspektif instrumental diasumsikannya seseorang secara keseluruhan didorong karena kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap berbagai perubahan yang memiliki kaitannya dengan perilaku.

Perspektif normatif berkaitan dengan sesuatu yang dianggapnya sebagai moral serta berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seseorang cenderung dapat mematuhi hukum karena dianggapnya dapat sesuai dan konsisten terhadap norma-norma internal.

Sistem tata kelola perusahaan merupakan suatu rancangan yang didasari pada teori keagenan (Agency Theory). Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara principal dan agent. Pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam perusahaan merupakan principal dan manajer atau karyawan merupakan agent. Scott (2015) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut :

"Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent interests would otherwise conflict with those of principal"

Dalam menjalankan perusahaan, dilakukan pemisahan kekuasaan antara fungsi pengelola dan fungsi kepemilikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun, dengan adanya pemisahan fungsi ini tentu akan menimbulkan resiko, yaitu konflik antara pemilik dan manajemen. Konflik ini terjadi dikarenakan masing-masing pihak menginginkan keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mengesampingkan kepentingan perusahaan. Pemilik perusahaan ingin meningkatkan nilai saham perusahaan sedangkan manajemen akan fokus pada kepentingan mereka sendiri dimana cenderung akan mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Hidayanti, 2013).

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Rasio Marjin Laba Bersih Net Profit Margin (NPM). Pirmatua Sirait (2017) menjelaskan bahwa NPM menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak / Earning After Tax (EAT), rasio ini juga memberikan petunjuk bagi manajemen sebagai alat pengukur yang paling baik untuk menetapkan profitabilitas perusahaan dan membantu mengukur secara menyeluruh efisiensi operasi perusahaan.

Laba perusahaan berpengaruh terhadap tingkat rasio profitabilitas. Riziqiyah (2021) juga menjelaskan bahwa dengan tingkat profitabilitas



yang tinggi akan memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penghindaran pajak. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi laba juga akan mengakibatkan jumlah pajak terutang juga meningkat. Hal ini memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Faktor yang membedakan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dipegang oleh pihak manajemen Perusahaan dengan pihak institusi baik institusi pemerintah, swasta, domestic, maupun asing. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan kepada perusahaan. Pengawasan ini seiring dengan seberapa besar kepemilikan institusional ikut andil dalam penetapan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian Purbowati (2021) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan menurunkan praktik tax avoidance. Oleh karena itu penelitian ini menguji hipotesis:

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Komite audit bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan, telah melakukan bisnis dengan etika, menerapkan kontrol terhadap konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan adalah keterbukaan informasi yang terbuka bagi semua

pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, dapat melemahkan pajak agresif, dimana hal ini termasuk kegiatan penghindaran pajak (Arinta, 2018)

Dalam penelitian Fitasari (2020) disebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika Perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, maka kinerja komite audit terindikasi tidak efektif (Hidayati, 2017). Maka dari itu, penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan kepada perusahaan. Pengawasan ini seiring dengan seberapa besar kepemilikan institusional ikut andil dalam penetapan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian Fitasari (2020) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik tax avoidance.

Sedangkan Salamah (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin besar pengawasan kepemilikan institusional maka tax avoidance yang dilakukan perusahaan akan semakin menurun. Oleh karena itu penelitian ini menguji hipotesis:



H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Komisaris dalam struktur manajemen adalah tingkat tertinggi setelah pemegang saham. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang kedudukannya tidak dipengaruhi apapun atau independen, tidak merupakan pemegang saham mayoritas, dan tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tingkat independensi perusahaan. Komisaris independen berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan stakeholders. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa asimetri informasi tersebut bisa mengakibatkan timbulnya kebijakan penghindaran pajak. Dengan pengawasan yang baik oleh komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Riziqiyah (2021) yang menjelaskan bahwa setiap penambahan proporsi komisaris independen maka terjadi penurunan tax avoidance. Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian Adhelia (2018), dimana dengan adanya kenaikan presentase komisaris independen maka tax avoidance akan mengalami penurunan. Rumusan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Avoidance

Metode

### **Metode**

Penelitian yang digunakan adalah explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Peneliti menggunakan metode explanatory research untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan

hubungan dan pengaruh antara variabel dependen dan independen yang ada di dalam hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap tax avoidance.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data pada periode 2018 sampai dengan 2022. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengunggah laporan tahunan selama periode penelitian tahun 2018-2022.
2. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.
3. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI yang tidak melaporkan laba negatif selama periode penelitian tahun 2018-2022.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 Perusahaan Manufaktur sebagai sampel penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 10 Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan dari tahun 2018-2022 yang menjadi sampel penelitian. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah  $10 \times 5 = 50$  sampel.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data tersebut didapatkan dari Laporan Keuangan Perusahaan yang dirilis oleh BEI dan Laporan Tahunan (Annual Report) masing-masing Perusahaan Manufaktur.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengambil data yang diperlukan berupa Laporan Keuangan yang dipublikasikan oleh BEI dan Laporan Tahunan (Annual Report) yang dipublikasikan oleh Perusahaan Manufaktur.

*Tabel 1. 4 Definisi Operasional Variabel*

Variabel	Definisi Konsep	Indikator/Pengukuran	Sumber
Profitabilitas	Laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun yang digunakan	$NPM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan t-1}}$ setelah pajak t-1	Damayanti, dkk (2020)

	untuk menilai kemampuan Perusahaan untuk memperoleh keuntungan		
Kepemilikan Manajerial	Proporsi kepemilikan saham oleh manajemen aktif Perusahaan	$KM = \frac{\text{Kepemilikan Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Fitasari (2020)
Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan saham oleh sebuah Lembaga	$INST = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Jumlah modal saham beredar}}$	Fitasari (2020)
Komite Audit	Proporsi pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan	$KA = \text{Jumlah komite audit}$	Fitasari (2020)
Komisaris Independen	Proporsi pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau komisaris lainnya	$KI = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah komisaris}}$	Riziqiyah (2021)
Tax Avoidance	Suatu upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak Perusahaan	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan Perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Riziqiyah (2021)

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, varian, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif bertujuan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tahapan analisis selanjutnya pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan sebelum menganalisis lebih lanjut data yang telah diperoleh. Uji asumsi klasik bertujuan agar model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan

serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa regresi linear berganda adalah sebuah regresi dimana regresi tersebut memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Persamaan regresi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: tax avoidance (CETR)

$\alpha$ : konstanta

$\beta_1$ : koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah

X1: Jumlah Dewan Pengawas Syariah

$\beta_2$ : koefisien regresi Kepemilikan Institusional

X2: presentase Kepemilikan Institusional

$\beta_3$ : koefisien regresi persentase Komite Audit

X3: persentase Komite Audit

$\beta_4$ : koefisien regresi presentase Komisaris Independen

X4: presentase Komisaris Independen

$\beta_5$ : koefisien regresi Profitabilitas / NPM

X5: rasio profitabilitas / NPM

$\varepsilon$ : error term

## Hasil

Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bersama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2015). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F yaitu jika nilai Sig < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variable terikat. Berikut adalah hasil dari Uji F:

*Tabel 1. 5 Uji F*



Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.237	5	0.047	2.850	0.026b
	Residual	0.733	44	0.017		
	Total	0.970	49			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), KI, KM, KA, NPM, INST

Tujuan dari uji t yaitu untuk menguji secara parsial pengaruh dari profitabilitas (NPM), kepemilikan manajerial, komite audit, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap Tax Avoidance. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan nilai Sig. Apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variable terikat secara parsial. Berikut adalah hasil dari Uji t:

Tabel 1. 6 Uji t

Variabel	B	Sig	Keterangan
Profitabilitas	0,050	0,262	Ditolak
Kepemilikan Manajerial	0,505	0,007	Diterima
Komite Audit	0,055	0,576	Ditolak
Kepemilikan Institusional	0,299	0,073	Ditolak
Komisaris Independen	0,421	0,108	Ditolak

#### Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang pertama yaitu untuk menguji apakah Profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,050 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,262 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis pertama "Profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur" ditolak.

#### Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang kedua yaitu untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,505 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis kedua "Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur" diterima.

#### Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang ketiga yaitu untuk menguji apakah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh komite audit terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,055 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,576 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis ketiga "Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur" ditolak.

#### Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang keempat yaitu untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,299 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,073 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis keempat "Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur" ditolak.

#### Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Untuk uji hipotesis yang kelima yaitu untuk menguji apakah komisaris independent berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh komisaris



independent terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 0,421 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,108 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis kelima "Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan manufaktur" ditolak.

## Daftar Pustaka

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI2014-2017). Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11.
- Affandi Fakhrun, Sunarko Bambang, Yunanto, Ary. The Impact of Cash Ratio, Debt To Equity Ratio, Receivables Turnover, Net Profit Margin, Return On Equity, and Institutional Ownership To Dividend Payout Ratio. *Journal of Research in Management*, 2019, 1.4.
- Arinta, Y. N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *BISNIS*, Vol. 6 No. 2, Des 2018 69, 6(2), 69-86.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. 16, 72-100.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228-241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Boediono, 2005, "Kualitas Laba Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur," *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VIII*, September 2005, Solo.
- Brown, K. B. (2012). *A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance*. Springer.
- Damayanti, S., Anggadini, S. D., & Bramasto, A. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Tingkat Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 132-138. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.107>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.983563>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60-83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>.

- Fitasari, A. N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 9(9), 1-23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3650/366>
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. Taxation and Corporate Governance. Working Paper.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Edisi Kede). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3288>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh corporate governance social responsibility dan good corporate governance terhadap pengindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053-1070.
- Hoque, J. et. al. (2011). Tax Evasion and Avoidance Crimes - A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh. *Faculty of Business Administration, Eastern University, Bangladesh*, 2(7), 150-156.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh. UPP STIM YKPN.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswoyo, Nurrohmat Agung. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri perbankan Indonesia. SNA X Makasar.
- Purbowati, Rachyu. (2021). "Pengaruh Good Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*. Vol. 4. No. 1. H. 61-76.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Dalam.... *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1(1), 108.



- Riziqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economy*, 21(1), 9-18
- Salamah, R. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 55.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI2*, 19(2), 85-98.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th edition). Pearson Canada Inc.
- Sirait, P. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Ekuilibria.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167-193. <https://doi.org/10.23887/jia.vli2.9994>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustakabarupress.
- Susanti, R. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan. *Manajemen Keuangan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Triyuwono, I. (2007). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ujjiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan ( Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur )". *Simposium Nasional Akuntansi X, IAI, 2007*.

# BAB II

## PENGARUH KOMITMEN INSTITUSI, KEMANDIRIAN KEUANGAN, INTERNASIONALISASI, DAN STATUS AKREDITASI TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL* PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA

Afila Dwi Hanifah<sup>1)</sup>, Henny Murtini<sup>2)</sup>, Dessy  
Ekaviana<sup>3)</sup>

Accounting study program, Faculty of Economics and  
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[afila29102@students.unnes.ac.id](mailto:afila29102@students.unnes.ac.id)<sup>1)</sup>,

[hennymurtini@mail.unnes.ac.id](mailto:hennymurtini@mail.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>,

[ekaviana@mail.unnes.ac.id](mailto:ekaviana@mail.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>



**Abstrak** Pengungkapan *intellectual capital* merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela dan menjadi bagian dari *intangible assets*. Aset terbesar penyusun perguruan tinggi merupakan aset tak berwujud sehingga *intellectual capital* penting untuk diungkapkan. Penelitian ini membuktikan secara empiris pengaruh komitmen institusi, kemandirian keuangan, internasionalisasi, dan status akreditasi terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dihadirkan pula variabel kontrol berupa kompleksitas, ukuran, dan status perguruan tinggi negeri. Populasi penelitian ini merupakan perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek yang terdaftar pada *website* PDDikti. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 47. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan *software* STATA versi 17. Variabel kemandirian keuangan dan internasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Komitmen institusi dan status akreditasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Variabel kontrol yang berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital* yaitu kompleksitas dan status perguruan tinggi negeri.

Kata kunci: *Intellectual Capital Disclosure, Komitmen Institusi, Kemandirian Keuangan, Internasionalisasi, Status Akreditasi.*

## **Pendahuluan**

Perguruan tinggi diharapkan senantiasa menjaga hubungan baik dengan setiap pihak pemangku kepentingannya salah satunya dengan melakukan *intellectual capital disclosure*. Pembentukan nilai organisasi yang terus meningkat seiring adanya perubahan ekonomi berbasis industri ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) membuat *intellectual capital disclosure* (ICD) pada perguruan tinggi negeri di Indonesia semakin berkembang. Akibatnya, keberlangsungan hidup (*going concern*) organisasi bukan

hanya dilihat dari aset fisiknya, melainkan juga bergantung pada aspek non-aset seperti inovasi, sistem informasi, dan pengetahuan yang dimiliki (Ma'wa & Rahmawati, 2023). Para pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui hal yang telah terjadi di perguruan tinggi dari sudut pandang pengembangan pengetahuan. Akibat hal tersebut selain pelaporan informasi wajib, perguruan tinggi diharapkan dapat melaporkan informasi sukarelanya seperti *intellectual capital disclosure* (ICD).

Ho *et al.* (2012) menyatakan bahwa jumlah dan jenis informasi *intellectual capital* yang diungkapkan dapat diputuskan sendiri oleh pihak perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa permasalahan yang terjadi ialah sifat *intellectual capital disclosure* (ICD) yang masih sukarela (*voluntary*). Penelitian terdahulu melaporkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia memiliki pengungkapan modal intelektual yang relatif rendah dan masih jauh dari 100 persen (Fathony & Ulum, 2018; Gobel *et al.*, 2020; Ma'wa & Rahmawati, 2023; Rahayu & Sudaryono, 2023; Rahayuningtyas & Triana, 2017; Susanti *et al.*, 2021). Bagi perguruan tinggi yang sebagian besar asetnya berbentuk aset tak berwujud, kurang adanya informasi yang diungkapkan mengenai modal intelektual dapat menyesatkan dan memengaruhi pengambilan kebijakan bagi *stakeholder* (Brusca *et al.*, 2019).

*Intellectual capital disclosure* merupakan penyampaian informasi terkait modal intelektual meliputi aset non-fisik dalam upaya penciptaan nilai yang meliputi kapasitas keterampilan, proses, kemitraan, jaringan kolaborasi, dan lain-lain (Secundo *et al.*, 2010). Praktik *intellectual capital disclosure* (ICD) pada perguruan tinggi menjadi hal bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik internal maupun eksternal untuk mengetahui dan menilai penciptaan nilai pada kinerja perguruan tinggi (Brusca *et al.*, 2019). Kesadaran mengenai isu *intellectual capital disclosure* menandakan bahwa manajer memenuhi aspek etika (moral) dalam teori *stakeholder*. Sedangkan, pemangku kepentingan memiliki hak



yang sama dalam memperoleh informasi terkait *intellectual capital* sehingga bermanfaat mengurangi asimetri informasi antara perguruan tinggi (manajemen) dan para *stakeholder* (Deegan & Unerman, 2011).

Instrumen mengenai *intellectual capital disclosure* (ICD) sudah banyak dikembangkan baik untuk sektor swasta dan sektor publik. Nicolo *et al.* (2021) mengklasifikasikan instrumen *intellectual capital disclosure* yang digunakan untuk universitas publik di Italia menjadi 29 item yang terbagi atas *human capital* (8 item), *structural capital* (10 item), dan *relational capital* (11 item). *Human capital* (modal manusia) terdiri dari kumpulan pengetahuan, pengalaman, kemampuan kognitif, keterampilan, dan kapabilitas yang dimiliki oleh semua sumber daya manusia seperti dosen, mahasiswa, dan peneliti. *Structural capital* (modal struktural) mewakili pengetahuan eksplisit dari institusi yang dimobilisasi melalui proses internal dan manajemen penelitian ilmiah serta teknis dalam rutinitas organisasi, prinsip-prinsip tata kelola, sistem informasi, basis data, inovasi, kekayaan intelektual, dan sumber daya teknologi lainnya. *Relational capital* (modal relasional) mencakup jumlah kerja sama, kemitraan, kolaborasi, dan jaringan yang dibangun antara perguruan tinggi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat. Hal tersebut juga menanamkan persepsi bahwa pemangku kepentingan eksternal dapat membentuk citra dan reputasi perguruan tinggi (Nicolo *et al.*, 2021). Di Indonesia sendiri Ulum (2019) telah mengembangkan instrumen *intellectual capital framework* yang berbasis pada IAPS 4.0 sehingga mampu memotret pelaporan *intellectual capital* di perguruan tinggi negeri. *Intellectual capital framework* terbagi menjadi tiga komponen yaitu *human capital* (HC) sebanyak 30 item, *structural capital* (SC) sebanyak 18 item, dan *relational capital* (RC) sebanyak 12 item.

Penelitian sebelumnya dari Aulia *et al.* (2019); Fathony & Ulum (2018); Gobel *et al.* 2020; Ma'wa & Rahmawati (2023); Rahayu & Sudaryono (2022) telah melakukan riset terkait pengungkapan

*intellectual capital* dengan objek perguruan tinggi baik swasta atau negeri di Indonesia. Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penambahan variabel independen yang baru diteliti di Indonesia seperti komitmen institusi dan kemandirian keuangan sehingga menjadi lebih kompleks. Pemilihan variabel tersebut didasarkan dengan alasan bahwa berdasarkan teori *stakeholder*, pihak pemangku kepentingan memiliki hak yang sama dalam organisasi, sehingga variabel independen mewakili *stakeholder* perguruan tinggi. Ruang lingkup objek penelitian yang terdiri dari perguruan tinggi negeri badan hukum, badan layanan umum, dan satuan kerja kementerian juga menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

### **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Kerangka implementasi *total quality management* dari teori *stakeholder* yang dikembangkan Venkatraman (2007) pada lingkup perguruan tinggi membagi pihak pemangku kepentingan menjadi dua yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal ialah pengelola perguruan tinggi dan pada penelitian ini diwakilkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dosen/staf kependidikan. Sedangkan *stakeholder* eksternal terbagi menjadi tiga yaitu *stakeholder* eksternal primer (mahasiswa), *stakeholder* eksternal sekunder (orang tua, masyarakat, organisasi sponsor), dan *stakeholder* eksternal tersier (pemerintah, pasar tenaga kerja, alumni). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa manajemen suatu organisasi dituntut untuk melakukan kegiatan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan karena para pemangku kepentingan memiliki hak yang sama untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan organisasi yang dapat memengaruhinya. Penjelasan mengenai konsep *intellectual capital disclosure* dalam teori *stakeholder* harus dipandang dari kedua bidang meliputi bidang etika (moral) atau bidang manajerial. Ketika manajer telah mengelola organisasi dalam upaya penciptaan nilai salah satunya dengan



melakukan *intellectual capital disclosure*, maka manajer telah memenuhi aspek etika (moral) dalam teori *stakeholder*. Bidang manajerial menjelaskan bahwa *intellectual capital* (IC) berkaitan dengan penciptaan nilai organisasi yang memanfaatkan seluruh daya dalam organisasi. Pengelolaan yang baik atas sumber daya dapat mendorong penciptaan nilai sehingga mampu membuat nilai tambah bagi organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi untuk kepentingan *stakeholder* (Susanti *et al.*, 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh komitmen institusi, kemandirian keuangan, internasionalisasi, dan status akreditasi terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain itu, dihadirkan pula variabel kontrol berupa kompleksitas, ukuran, dan status perguruan tinggi negeri. Alasan pemilihan variabel komitmen institusi ialah berdasarkan teori *stakeholder*, semakin tinggi intensitas *research & development* menandakan besarnya rasio belanja penelitian dan pengembangan jika dibandingkan total asetnya yang mengakibatkan perguruan tinggi melakukan pengungkapan modal intelektual. Intensitas *research & development* mampu menjadi informasi penting bagi *stakeholder* mengenai penciptaan nilai jangka panjang dan pengelolaan modal intelektual (Astuti & Wirama, 2016). Alfariza & Hermawan (2021); Sariningsih & Saputro (2020) telah membuktikan bahwa intensitas *research & development* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* di sektor perusahaan. Didukung pula oleh Mkumbuzi (2015) yang menemukan hasil bahwa intensitas *research & development* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *intangible asset*. Dengan demikian, perguruan tinggi yang memiliki intensitas *research & development* semakin besar berdampak positif terhadap *intellectual capital disclosure*.

### **H1: Komitmen institusi berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi negeri di Indonesia**

Kemandirian keuangan perguruan tinggi negeri merupakan kemampuan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk mencari dan mengelola sumber pendanaannya sendiri dalam rangka memenuhi aktivitasnya untuk mendukung sistem pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat serta memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana untuk kepentingan masyarakat dalam batas yang ditentukan perundang-undangan (Fajriani, 2019). Berdasarkan teori *stakeholder*, peningkatan kemandirian keuangan menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak bergantung pada penggunaan dana yang diberikan pihak luar. Hal tersebut membuat perguruan tinggi negeri mencari sumber pendanaan lain di luar bantuan pemerintah dan pendapatan yang berasal dari mahasiswa sehingga cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan *intellectual capital*. Melalui adanya *intellectual capital disclosure* diharapkan mampu menarik para *stakeholder* seperti organisasi sponsor untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi negeri dikarenakan kemandirian keuangannya telah baik. Oleh sebab itu, semakin tinggi kemandirian keuangan perguruan tinggi negeri, maka semakin luas *intellectual capital disclosure*. Laswad *et al.* (2005) menyatakan hasil yang sama bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Dengan demikian, semakin besar kemandirian keuangan berdampak positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

### **H2: Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi negeri di Indonesia**

Internasionalisasi perguruan tinggi merupakan kegiatan perguruan tinggi yang proses pelaksanaan aktivitasnya menyertakan unsur-unsur internasional untuk mencapai tujuan (Mali, 2020). Status



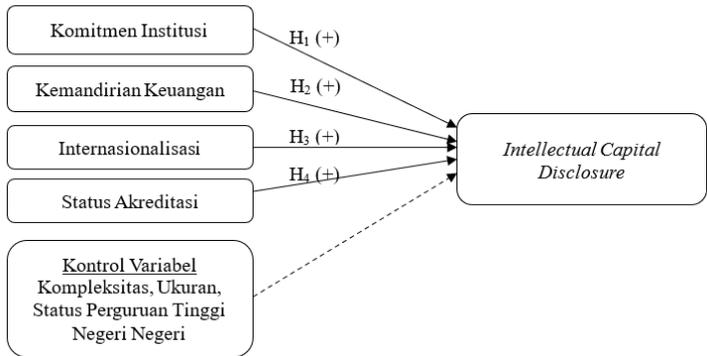
akreditasi internasional menjadi salah satu bukti internasionalisasi yang membuat perguruan tinggi dalam negeri memiliki kualitas yang setara dengan perguruan tinggi luar negeri (Ma'wa & Rahmawati, 2023). Berdasarkan teori *stakeholder*, tingginya kemauan perguruan tinggi untuk melakukan internasionalisasi membuat usaha perguruan tinggi semakin besar dalam melakukan pengungkapan *outcome* berupa informasi *intellectual capital* (IC) pada situs *official website*. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh lembaga akreditasi internasional yang mengsyaratkan implementasi *outcome based education* dalam melakukan penilaian akreditasi internasional (Arifin, 2019). Aulia *et al.* (2019); Ma'wa & Rahmawati (2023); Ramirez *et al.* (2019); Rossi *et al.* (2018) menyatakan bahwa internasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi.

### **H<sub>3</sub>: Internasionalisasi berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi negeri di Indonesia**

Akreditasi merupakan suatu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan penentuan kualitas dalam hal pendidikan di perguruan tinggi (Yulianingsih, 2016). Semakin unggul status akreditasi membuat pandangan masyarakat terhadap perguruan tinggi menjadi semakin baik (Saputro *et al.*, 2012). Berdasarkan teori *stakeholder*, semakin tinggi status akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi, maka *intellectual capital disclosure* yang dilakukan juga semakin besar. Perguruan tinggi negeri dengan status akreditasi yang tinggi cenderung menjaga reputasinya di mata *stakeholder*, sehingga pengungkapan *intellectual capital* juga tinggi. Status akreditasi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi dan program studi untuk dilihat pemangku kepentingan (Kamal & Rahmadiane, 2017). Gobel *et al.* (2020) pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa status akreditasi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*.

#### H4: Status akreditasi berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada perguruan tinggi negeri di Indonesia

Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir



#### Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Objek penelitian ini ialah perguruan tinggi negeri se-Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Metode *purposive sampling* digunakan untuk penentuan sampel penelitian. Jumlah populasi penelitian ialah sebanyak 125 perguruan tinggi negeri. Namun, dari 125 perguruan tinggi negeri, hanya 47 perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memenuhi kriteria sampel. Kecilnya jumlah sampel disebabkan karena kurangnya kesadaran perguruan tinggi negeri dalam mempublikasikan laporan keuangan dan laporan kinerja sehingga data terkait variabel independen penelitian tidak terpenuhi. Tahun observasi dalam penelitian ini adalah tahun 2022. Data yang dikumpulkan bersumber dari *official website* masing-masing perguruan tinggi negeri, *website* PDDikti Kemdikbud, *website* PINDAI DIKTI, dan *website* PKK BLU. Pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung mengakses informasi melalui *website* tersebut dan mengunduh berbagai laporan yang di *publish* perguruan tinggi negeri seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan tahunan melalui situs resminya. Data yang dikumpulkan ialah yang berkaitan dengan *intellectual capital*

*disclosure* (ICD), komitmen institusi, kemandirian keuangan, internasionalisasi, kompleksitas, ukuran institusi, status akreditasi, dan status perguruan tinggi negeri.

Tabel 2. 5 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Intellectual Capital Disclosure (Y)	Pengungkapan sukarela dalam bentuk sumber daya tak berwujud berupa pengetahuan dan kombinasi yang mampu menciptakan nilai organisasi meliputi tiga komponen yaitu human capital, structural capital, dan relational capital.	Metode content analysis dari framework intellectual capital disclosure (ICD) sebanyak 60 item dengan teknik five ways numerical coding system.  $ICD = \frac{n}{k} \times 100\%$ Keterangan: ICD: Intellectual capital disclosure n : Kualitas IC yang diungkapkan k : Total ICD framework	(Ma'wa & Rahmawati, 2023; Ulum, 2019)
Komitmen Institusi (X1)	Komitmen institusi adalah tekad dari perguruan tinggi negeri untuk menjalankan amanah tridarma perguruan tinggi meliputi aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Komitmen institusi pada penelitian ini hanya berfokus pada aspek penelitian dan pengembangan dan dicerminkan	Perbandingan R&D expenses terhadap total assets.	(Lu et al., 2010)

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
	menggunakan intensitas R&D.		
Kemandirian Keuangan (X2)	Kemampuan perguruan tinggi negeri dalam membiayai penyelenggaraan kegiatannya secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan yang bersumber dari pendanaan pemerintah.	Perbandingan realisasi pendapatan sendiri terhadap bantuan pemerintah dikali 100%	(Fajriani, 2019)
Internasionalisasi (X3)	Bentuk pencapaian tujuan perguruan tinggi negeri yang menggunakan unsur-unsur internasional salah satunya dicerminkan melalui program studi yang telah terakreditasi internasional.	Program studi terakreditasi internasional dibandingkan dengan jumlah seluruh program studi dikalikan 100%	(Vitolla et al., 2022)
Status Akreditasi (X4)	Status yang mencerminkan kualitas dari suatu perguruan tinggi negeri melalui penilaian yang dilakukan BAN-PT.	Rata-rata status akreditasi perguruan tinggi negeri dan program studi yang dikombinasikan dengan scoring.  Skor 4 = Unggul (A) Skor 3 = Baik sekali (B) Skor 2 = Baik (C) Skor 1 = Tidak terakreditasi	(Gobel et al., 2020)
Kompleksitas	Banyaknya program studi di suatu perguruan tinggi negeri yang tercatat pada masing-masing official website.	Jumlah seluruh program studi (prodi) di suatu perguruan tinggi negeri.	(Aulia et al., 2019)



Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Ukuran Institusi	Skala yang menentukan besar kecilnya suatu perguruan tinggi negeri dilihat dari jumlah mahasiswa.	Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri.	(Ma'wa & Rahmawati, 2023)
Status Perguruan Tinggi Negeri	Status perguruan tinggi negeri di Indonesia meliputi PTN-BH, PTN-BLU, dan PTN-Satker yang dibedakan akibat otonomi yang dimiliki.	Scoring tiga kategori 3 (PTN-BH) 2 (PTN-BLU) 1 (PTN-SATKER)	(Rahayunin gtyas & Triana, 2017)

Sumber: Data diolah (2024)

Setelah data diperoleh, dilakukan pengolahan data dan analisis untuk mendapatkan temuan secara empiris sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Setelah itu, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis menggunakan software STATA Versi 17.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel kontrol berupa komitmen institusi, kemandirian keuangan, intenasionalisasi, status akreditasi, kompleksitas, ukuran, dan status perguruan tinggi negeri terhadap variabel dependen yaitu intellectual capital disclosure. Tabel 1 menunjukkan definisi dan proksi dari setiap variabel penelitian. Persamaan regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini.

$$ICD = \alpha + \beta_1 RND + \beta_2 KMF + \beta_3 INTER + \beta_4 AKRE + \beta_5 COMP + \beta_6 SIZE + \beta_7 SPTN + e$$

Keterangan:

ICD : Intellectual Capital Disclosure

$\alpha$  : Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

e : Standard Error

- RND : Komitmen Institusi
- KMF : Kemandirian Keuangan
- INTER : Internasionalisasi
- AKRE : Status Akreditasi
- COMP : Kompleksitas
- SIZE : Ukuran Institusi
- SPTN : Status Perguruan Tinggi Negeri

## Hasil

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran dari data penelitian yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk setiap variabel. Tabel 2. Menunjukkan hasil dari statistika deskriptif penelitian ini.

*Tabel 2. 6 Statistik Deskriptif*

Variabel	Obs	Mean	Std. dev	Min	Max
Y ICD	47	0,61	0,10	0,40	0,84
X1 RND	47	0,02	0,04	0,00	0,18
X2 KMF	47	1,54	1,13	0,02	4,77
X3 INTER	47	0,10	0,13	0,00	0,42
X4 AKRE	47	3,06	0,42	2,00	3,90
COMP	47	97,11	67,87	6,00	290
SIZE	47	25.912,70	17.394,16	369,00	75.156,00
SPTN	47	2,04	0,81	1,00	3,00

Sumber: Output STATA 17

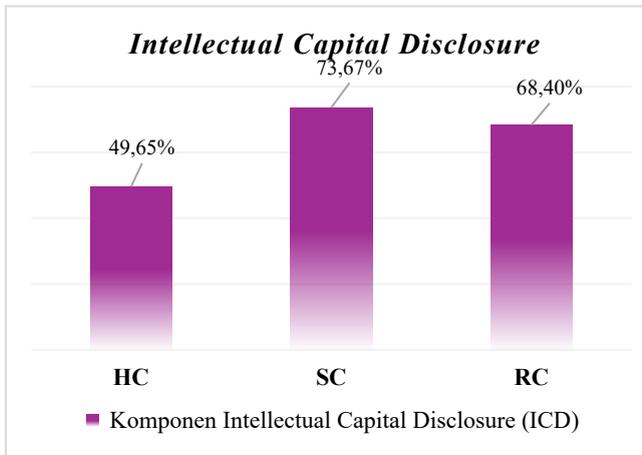
Keterangan: ICD: Intellectual capital disclosure; RND: Komitmen Institusi; KMF: Kemandirian Keuangan; INTER: Internasionalisasi; COMP: Kompleksitas; SIZE: Ukuran Institusi; AKRE: Status Akreditasi; SPTN: Status Perguruan Tinggi Negeri

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Nilai rata-rata (mean) dari intellectual capital disclosure (ICD) ialah sebesar 0,61 atau 60,60 persen. Hal ini mengartikan bahwa kualitas pengungkapan intellectual capital di masing-masing official website pada perguruan tinggi negeri di

Indonesia sudah relatif baik dikarenakan melebihi 0,50 atau 50 persen. Namun, secara umum rata-rata intellectual capital disclosure (ICD) pada perguruan tinggi negeri di Indonesia masih jauh dari nilai 100 persen, sehingga dapat dikatakan tingkat pengungkapannya masih rendah. Kondisi ini disebabkan karena sifat intellectual capital disclosure (IC) yang sukarela (voluntary) sehingga tidak semua perguruan tinggi negeri di Indonesia melakukan pengungkapan. Standar deviasi dari variabel intellectual capital disclosure (ICD) adalah sebesar 0,10 yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata (0,61). Besarnya nilai minimum pengungkapan intellectual capital adalah 0,42 atau 41,67 persen yang dimiliki oleh Universitas Samudra. Sedangkan, nilai tertinggi ini dimiliki oleh Universitas Indonesia sebesar 0,84 atau 84,17 persen.

Gambar 2 menunjukkan hasil rata-rata persentase dari setiap komponen intellectual capital disclosure yang bertujuan untuk mengetahui komponen intellectual capital yang paling banyak diungkapkan. Pengungkapan paling yang banyak ialah komponen structural capital (SC) sebesar 73,67 persen. Selanjutnya diikuti oleh komponen relational capital (RC) sebesar 68,40 persen dan terakhir yaitu human capital (HC) sebesar 49,65 persen. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa perguruan tinggi negeri di Indonesia secara relatif baik telah mengungkapkan dua komponen intellectual capital (IC) diatas 50 persen. Namun, satu komponen yaitu human capital masih perlu menjadi perhatian dikarenakan tingkat pengungkapannya yang masih rendah. Perguruan tinggi negeri di Indonesia lebih cenderung melakukan pengungkapan structural capital dan relational capital pada official website. Hal ini membuktikan jika komponen terpenting bagi perguruan tinggi merupakan structural capital. Komponen structural capital berisi mengenai proses sumber daya internal dan pengelolaan atas sistem pembelajaran seperti kurikulum, layanan kemahasiswaan, dan lain-lain. Komponen relational capital berhubungan dengan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di lingkup internasional, nasional, dan regional. Komponen human capital menjadi komponen yang paling sedikit melakukan pengungkapan. Alasannya ialah kurangnya pengungkapan terkait item beban kerja dosen dan jumlah mahasiswa internasional.

Gambar 2. 4 Grafik rata-rata komponen intellectual capital disclosure



Tabel 2. menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif komitmen institusi untuk 47 sampel penelitian ini. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki sebesar 0,02 atau 2 persen dan standar deviasi 0,04. Nilai terendah (minimum) yang dimiliki sebesar 0,00 yang dimiliki oleh Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nilai tertinggi (maksimum) yang dimiliki oleh variabel komitmen institusi yaitu sebesar 0,18 atau 18 persen. Nilai tersebut dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada yang mengartikan bahwa perguruan tinggi negeri tersebut memiliki komitmen institusi terbesar dalam hal intensitas research & development (R&D) dibandingkan perguruan tinggi negeri lainnya.

Nilai mean variabel kemandirian keuangan berdasarkan Tabel 2 yaitu sebesar 1,54 atau 154 persen. Hal ini berarti rata-rata kemandirian keuangan perguruan tinggi negeri di Indonesia masuk dalam kemampuan keuangan tinggi dikarenakan rasio kemandirian yang melebihi 100 persen. Pola hubungan yang ditunjukkan ialah delegatif, artinya rata-rata perguruan tinggi negeri telah mampu melaksanakan urusan otonominya sendiri seperti realisasi pendapatan yang melebihi bantuan pemerintah pusat (Halim, 2012). Nilai standar deviasi yang ditunjukkan yaitu 1,13, lebih kecil dari nilai rata-ratanya 1,54. Variabel kemandirian keuangan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 0,02 (2 persen) yang berarti kemandirian keuangan dari perguruan tinggi

negeri masih rendah sekali. Perguruan tinggi negeri yang memiliki persentase kemandirian keuangan sebesar 2 persen adalah Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. Nilai maksimum (tertinggi) dari variabel kemandirian keuangan adalah 4,77 (477 persen) yang berarti kemampuan keuangannya sangat mandiri. Nilai tertinggi tersebut dimiliki oleh Universitas Indonesia.

Nilai rata-rata (mean) variabel internasionalisasi dari 47 perguruan tinggi negeri se-Indonesia di bawah koordinasi Kemendikbudristek sebesar 0,10 atau 10 persen. Hal tersebut mengartikan masih rendahnya tingkat rata-rata program studi yang telah terakreditasi internasional jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah seluruh program studi. Nilai standar deviasi dari variabel internasionalisasi ditunjukkan oleh Tabel 2 sebesar 0,13, sedikit lebih banyak dari nilai rata-ratanya (0,10). Nilai minimum (terendah) dari internasionalisasi ialah sebesar 0 persen. Nilai minimum tersebut dimiliki oleh 20 perguruan tinggi negeri yang belum mampu mendapatkan akreditasi program studi internasional. Sedangkan nilai maksimum (tertinggi) yaitu sebesar 0,42 atau 42 persen. Perguruan tinggi negeri dengan nilai tertinggi tersebut adalah Universitas Airlangga. Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki variabel status akreditasi dari 47 sampel penelitian ini ialah sebesar 3,06, Standar deviasi yang ditunjukkan lebih rendah dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 0,42. Hasil analisis statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa variabel status akreditasi memiliki distribusi rentang dari 2,00 sampai 3,90. Artinya nilai minimum (terendah) yang dimiliki variabel status akreditasi ialah sebesar 2,00 dan nilai maksimum (tertinggi) sebesar 3,90. Perguruan tinggi negeri yang mendapatkan status akreditasi terendah pada tahun 2022 dibandingkan dengan lainnya adalah Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh hanya memiliki enam program studi dengan status akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi negeri dan program studi seluruhnya ialah baik (C). Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi perguruan tinggi negeri dengan status akreditasi tertinggi yaitu 3,90.

Variabel kontrol yaitu kompleksitas memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 97,11. Secara keseluruhan nilai standar deviasi yang dimiliki

sebesar 67,87 lebih rendah dari nilai rata-ratanya (97,11). Tabel 2. menunjukkan nilai minimum (terendah) dan maksimum (tertinggi) dari variabel kompleksitas masing-masing sebanyak 6 dan 290. Nilai minimum (terendah) adalah sebesar enam yang dimiliki oleh Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, sehingga menunjukkan jumlah program studi yang dimiliki hanya berjumlah enam pada tahun 2022. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki kompleksitas paling besar dibandingkan lainnya.

Rata-rata (mean) variabel kontrol ukuran ialah sebesar 25.912,70. Artinya rata-rata jumlah mahasiswa yang dimiliki 47 perguruan tinggi negeri di Indonesia yaitu sebanyak 25.912,70 mahasiswa. Tabel 2 menunjukkan nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-ratanya yaitu sebesar 17.394,16. Nilai minimum (terendah) dan maksimum (tertinggi) dari variabel ukuran masing-masing sebesar 369,00 dan 75.156,00. Perguruan tinggi negeri yang memiliki nilai minimum tersebut ialah Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh. Lain halnya dengan Universitas Brawijaya yang memiliki ukuran institusi paling besar yaitu 75.156,00 sehingga menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi negeri yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak pada tahun 2022.

Proksi pengukuran status perguruan tinggi negeri pada penelitian ini menggunakan scoring, sehingga akan diberi skor 3 jika status perguruan tinggi negeri adalah PTN-BH, diberi skor 2 jika status perguruan tinggi negeri adalah PTN-BLU, dan diberikan skor 1 jika status yang dimiliki adalah PTN-SATKER. Tabel 2. menunjukkan hasil statistik deskriptif dari variabel kontrol status perguruan tinggi negeri memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,04, sedangkan nilai standar deviasinya yaitu 0,81 lebih rendah dari rata-ratanya. Hasil analisis statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa variabel status perguruan tinggi negeri memiliki distribusi rentang nilai dari 1,00 sampai 3,00. Hal tersebut menunjukkan besarnya nilai terendah (minimum) yang dimiliki status perguruan tinggi negeri ialah 1,00, artinya status perguruan tinggi negeri yang dimiliki ialah satuan kerja (PTN-SATKER). Nilai tertinggi (maksimum) yang dimiliki oleh status perguruan tinggi negeri yaitu sebesar 3,00, artinya status perguruan tinggi negeri yang diperoleh ialah badan hukum.



Tabel 2. 7 Hasil Model Regresi Linear Berganda

ICD	Coefficient	t-hitung	P >  t	VIF	I/VIF
_Konstanta	0,56	8,96	0,00		
X1 Komitmen Institusi	-0,05	-0,23	0,82	2,01	0,50
X2 Kemandirian Keuangan	0,02	2,60	0,01	2,37	0,42
X3 Internasionalisasi	0,24	3,36	0,00	2,11	0,47
X4 Status Akreditasi	0,00	0,43	0,67	3,15	0,32
Kompleksitas	0,00	2,09	0,04	5,39	0,19
Ukuran	-0,04	-1,77	0,09	2,61	0,38
Status PTN	0,04	2,22	0,03	4,25	0,24
F (7, 39)	27,77				
Prob > F	0,00				
R-squared	0,83				
Adj R-squared	0,80				
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg	Prob>chi2 = 0,53 (homoskedastisitas)				
Shapiro-Wilk W test berdistribusi normal)	Prob>z = 0,58 (residual				

Sumber: Output STATA 17

Tabel 3 menunjukkan hasil regresi linear berganda menggunakan teknik ordinary least squares (Ghozali, 2021) dan telah memenuhi semua uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk W test menunjukkan nilai Prob>z sebesar 0,58. Nilai tersebut melebihi 0,05 sehingga dapat disimpulkan data telah berdistribusi secara normal. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Breusch-Pagan/Cook-Weisberg dihasilkan nilai Prob>chi2 senilai 0,53, lebih besar dari 0,05 dan dipastikan tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Terakhir, uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan VIF menunjukkan hasil bahwa nilai variance inflation factor (VIF) untuk setiap variabel independen (bebas) kurang dari 10 dan nilai tolerance (1/VIF) lebih dari 0,10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga model regresi dikatakan baik.

Uji signifikansi model menunjukkan perhitungan nilai prob > F sebesar 0,00 yang mengartikan bahwa signifikansi kurang dari 0,05. Kesimpulannya yaitu model yang digunakan untuk menguji variabel komitmen institusi, kemandirian keuangan, internasionalisasi, status

akreditasi, kompleksitas, ukuran institusi, dan status perguruan tinggi negeri terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia adalah model yang layak atau goodness of fit. Tabel 3 juga menunjukkan nilai adjusted r-square sebesar 0,80 atau 80 persen. Hal tersebut mengartikan bahwa pengaruh yang diberikan variabel penelitian yaitu komitmen institusi, kemandirian keuangan, internasionalisasi, status akreditasi, kompleksitas, ukuran institusi, dan status perguruan tinggi negeri terhadap intellectual capital disclosure (variabel dependen) pada perguruan tinggi negeri se-Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kemendikbudristek adalah sebesar 80 persen. Sisanya sebanyak 20 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar model penelitian ini. Nilai R square (R<sup>2</sup>) pada penelitian ini masuk dalam kategori kuat dikarenakan melebihi 0,67 (Chin, 1998).

*Tabel 2. 8 Hasil uji hipotesis penelitian*

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H1: Komitmen institusi berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia	Koefisien: -0,05 P >  t  : 0,82	H1 ditolak
H2: Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia	Koefisien: 0,02 P >  t  : 0,01	H2 diterima
H3: Internasionalisasi berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia	Koefisien: 0,24 P >  t  : 0,00	H3 diterima
H4: Status akreditasi berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia	Koefisien: -0,04 P >  t  : 0,09	H4 ditolak

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 4 menunjukkan bahwa hanya dua variabel independen yang berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital disclosure yaitu kemandirian keuangan dan internasionalisasi. Sedangkan variabel komitmen institusi dan status akreditasi tidak mampu memengaruhi intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa variabel kontrol yaitu kompleksitas

dan status perguruan tinggi negeri juga berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Lain halnya dengan variabel ukuran yang tidak mampu memengaruhi intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai  $P > |t|$  pada variabel komitmen institusi sebesar 0,82. Pengujian dilakukan menggunakan signifikansi 0,05, sehingga nilai  $P > |t|$  (0,82) lebih besar dari signifikansi 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar -0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen institusi tidak berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kurangnya kesadaran perguruan tinggi negeri dalam penggunaan dana penelitian dan pengembangan jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya pengaruh antara volume research & development dan keterbukaan intellectual capital yang diungkapkan. Adanya risiko kegagalan dalam penelitian cenderung membuat perguruan tinggi negeri enggan untuk mengungkapkan secara keseluruhan biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada publik (Kurniawati & Suharti, 2023). Komitmen institusi yang diukur menggunakan rasio beban research & development terhadap total aset tidak mampu memengaruhi luasnya pengungkapan intellectual capital di perguruan tinggi negeri pada penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramirez & Tejada (2019) bahwa research intensity tidak memiliki pengaruh terhadap intellectual capital disclosure pada universitas negeri di Spanyol. Astuti & Dewa (2016) melakukan penelitian dengan objek perusahaan menemukan hasil bahwa intensitas research & development tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian Kurniawati & Suharti (2023) juga menyatakan tidak adanya pengaruh aktivitas research & development terhadap pengungkapan intellectual capital. Rendahnya kesadaran perusahaan dalam hal pengungkapan biaya research & development dan rawannya risiko kegagalan penelitian membuat perusahaan menutup informasi atas biaya R&D. Perusahaan cenderung meminimalkan kemungkinan kerugian dimasa depan dengan membatasi intellectual capital disclosure terutama yang berkaitan dengan hal penelitian dan pengembangan.

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai  $P > |t|$  sebesar 0,01 dan koefisiennya senilai 0,02, sehingga kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia dikarenakan signifikansinya kurang dari 0,05. Perguruan tinggi negeri dengan kemandirian keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan intellectual capital untuk menarik para stakeholder agar melakukan kerjasama yang salah satunya mampu menambah pendanaan perguruan tinggi negeri. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan menunjukkan semakin baiknya kualitas dan daya saing perguruan tinggi sehingga intellectual capital disclosure yang dilakukan semakin luas (Laswad et al., 2005). Adanya intellectual capital disclosure mampu menjadi informasi bagi stakeholder perguruan tinggi seperti organisasi sponsor. Organisasi sponsor baik entitas swasta atau pemerintah berhak mendapatkan informasi untuk menilai kemampuan perguruan tinggi negeri yang salah satunya dapat dilihat melalui intellectual capital sebelum memberikan keputusan melaksanakan kerjasama. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nicolo et al. (2021) bahwa kinerja keuangan yang di proksikan dengan kemandirian keuangan mampu memengaruhi pengungkapan intellectual capital pada perguruan tinggi negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas dengan kinerja keuangan yang lebih tinggi terdorong untuk mengungkapkan informasi intellectual capital daripada universitas dengan kinerja keuangan yang lebih rendah. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa universitas telah mengelola secara efisien dananya.

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa variabel internasionalisasi memiliki nilai  $P > |t|$  sebesar 0,00, sehingga melebihi 0,05. Nilai koefisien yang dimiliki ialah 0,24, artinya internasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori stakeholder yang dikembangkan oleh Freeman (1984), bahwa manajemen suatu organisasi dituntut untuk melakukan kegiatan yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan dikarenakan para pemangku kepentingan memiliki hak yang sama untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan organisasi yang dapat memengaruhinya. Perguruan tinggi negeri yang semakin banyak memiliki persentase



program studi terakreditasi internasional terhadap total program studinya cenderung melakukan pengungkapan yang semakin luas terkait pencapaian outcome dalam pelaksanaan aktivitas pembelajarannya. Hal tersebut disebabkan adanya syarat implementasi outcome-based education oleh lembaga akreditasi internasional ketika penilaian akreditasi internasional (Arifin, 2019). Oleh karena itu, apabila persentase internasionalisasi yang dimiliki perguruan semakin besar, maka sangat relevan ketika informasi intellectual capital berupa outcome tersebut diungkapkan kepada publik. Perguruan tinggi negeri dalam hal ini telah melakukan kegiatan yang diharapkan para pemangku kepentingan berupa pengungkapan informasi intellectual capital dan para pemangku kepentingan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh informasi tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Ramirez et al. (2019) dan Rossi et al. (2018) bahwa internasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital disclosure di universitas. Penelitian yang dilakukan Aulia et al. (2019) menunjukkan hasil bahwa program internasional berpengaruh terhadap pengungkapan intellectual capital (IC) pada Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Selain itu, penelitian Ma'wa & Rahmawati (2023) juga menemukan hasil yang sama bahwa internasionalisasi berpengaruh positif terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi.

Tabel 4 menunjukkan bahwa status akreditasi memiliki nilai  $P > |t|$  sebesar 0,09, sehingga melebihi signifikansi 0,05. Nilai koefisien yang ditunjukkan ialah -0,04. Artinya, status akreditasi tidak memiliki pengaruh terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Status akreditasi tidak hanya dilihat dari perguruan tinggi namun juga program studi yang dimiliki. Berdasarkan data empiris penelitian ini, perguruan tinggi negeri yang memiliki status akreditasi unggul (A) tidak menjamin bahwa program studi yang dimiliki seluruhnya memiliki akreditasi yang sama. Perguruan tinggi negeri umumnya lebih berfokus pada pengungkapan hasil akreditasi yang didapatkan dikarenakan hal tersebut sudah cukup untuk menunjukkan kepada pihak stakeholder terkait kualitas dan citra baik yang dimiliki sehingga perguruan tinggi negeri tidak melakukan pengungkapan

intellectual capital. Akibatnya tingkat intellectual capital disclosure menjadi rendah. Melalui status akreditasi, masyarakat dapat mengetahui informasi secara cepat terutama kualitas dari perguruan tinggi seperti program studi, daya saing antar program studi, hingga perguruan tinggi negeri itu sendiri. Oleh sebab itu, status akreditasi yang tinggi tidak mampu memengaruhi tingkat intellectual capital disclosure. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fathony & Ulum (2018) yang menghasilkan temuan bahwa status akreditasi tidak memiliki pengaruh terhadap intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel kontrol kompleksitas memiliki nilai  $P > |t|$  sebesar 0,04 dan koefisiennya 0,00. Hal tersebut memiliki arti bahwa kompleksitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital disclosure pada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ma'wa & Rahmawati (2023) bahwa kompleksitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap intellectual capital disclosure di perguruan tinggi negeri. Hasil yang sama juga didukung oleh temuan Aulia et al. (2019) bahwa kompleksitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital. Rossi et al. (2018) pada penelitiannya juga menghasilkan temuan bahwa kompleksitas yang tinggi membuat intellectual capital disclosure pada Universitas di Italia semakin luas. Tingginya kompleksitas menandakan semakin banyak program studi yang dimiliki sehingga membuat perguruan tinggi negeri melakukan pengungkapan intellectual capital. Jumlah program studi yang semakin banyak menandakan tingginya variasi ilmu dan sumber daya yang dimiliki termasuk pihak stakeholder seperti dosen dan karyawan yang terlibat sehingga mendorong perguruan tinggi melakukan pengungkapan informasi (Vitolla et al., 2022).

Tabel 3 juga menunjukkan besarnya nilai variabel kontrol ukuran yaitu 0,67 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa ukuran tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual di perguruan tinggi negeri. Falqueto et al. (2019) menyatakan bahwa mahasiswa merupakan salah satu pihak pemangku kepentingan yang dianggap kurang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan penerapan



perencanaan strategis perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa merupakan pemangku kepentingan yang tidak memberikan tekanan pada perguruan tinggi negeri untuk melakukan pengungkapan intellectual capital (Vitolla et al., 2022). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ma'wa & Rahmawati (2023) bahwa ukuran perguruan tinggi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap intellectual capital disclosure. Didukung pula oleh Rossi et al. (2018) dan Vitolla et al. (2022) melalui penelitiannya yang menghasilkan temuan bahwa ukuran tidak mampu membuktikan pengaruhnya terhadap pengungkapan intellectual capital di universitas.

Variabel kontrol status perguruan tinggi negeri memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan intellectual capital disclosure dikarenakan nilai  $P > |t|$  sebesar 0,03, lebih kecil dari 0,05 berdasarkan tabel 3. Adanya tuntutan yang lebih besar dari pihak stakeholder seperti pemerintah mengenai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi negeri membuat tingginya pengungkapan intellectual capital. Hal tersebut disebabkan oleh keistimewaan otonomi yang dimiliki setiap perguruan tinggi terutama yang berstatus badan hukum. Adanya keistimewaan yang dimiliki PTN-BH membuat pemerintah berharap agar perguruan tinggi negeri menjadi mandiri terutama dalam menghimpun dana non APBN yang bersumber dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berharap agar perguruan tinggi negeri semakin meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan. Akibatnya terdapat dorongan yang lebih besar dari perguruan tinggi yang memiliki status PTN-BH untuk mengungkapkan value ke mata publik dibandingkan perguruan tinggi negeri yang berstatus PTN-BLU dan PTN-Satker (Ma'wa & Rahmawati, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ma'wa & Rahmawati (2023); Ulum & Novianty (2012); Rahayuningtyas & Triana (2017) bahwa variabel status perguruan tinggi berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital disclosure yang disebabkan otonomi yang dimiliki PTN-BH.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan internasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap

pengungkapan modal intelektual (intellectual capital disclosure), sementara komitmen institusi dan status akreditasi tidak berpengaruh. Kemandirian keuangan yang baik meningkatkan reputasi perguruan tinggi dan menarik kerjasama dari pemangku kepentingan. Selain itu, semakin banyak program studi terakreditasi internasional, semakin luas pengungkapan informasi terkait pencapaian akademik.

Variabel kontrol yang dianalisis, yaitu kompleksitas, ukuran, dan status perguruan tinggi negeri, menunjukkan bahwa hanya kompleksitas dan status perguruan tinggi yang berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Oleh karena itu, perguruan tinggi negeri disarankan untuk meningkatkan kemandirian keuangan, internasionalisasi, kompleksitas, dan status mereka untuk memperluas pengungkapan informasi. Stakeholder internal dan eksternal juga memiliki peran penting dalam proses pengungkapan ini.

Keterbatasan penelitian meliputi penggunaan proksi yang hanya mencerminkan intensitas research & development untuk mengukur komitmen institusi, serta pengukuran kemandirian keuangan yang kurang menjelaskan sumber pendapatan dari pihak lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengukuran yang lebih akurat dan mengeksplorasi sumber daya perguruan tinggi melalui berbagai media, termasuk sosial media, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengungkapan modal intelektual.

## Referensi

- Alfariza, N. N., & Hermawan, S. (2021). The effect of institutional ownership, company size, research and development (R&D) on extent intellectual capital disclosure. *Business and Economics*, 5, 1–18.
- Arifin, P. (2019). Akreditasi perguruan tinggi: akreditasi internasional prodi. Satuan Penjaminan Mutu Institut Teknologi Bandung. <https://spm.itb.ac.id/artikel/12659-2/>
- Astuti, N. M. A., & Wirama, D. G. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, tipe industri dan intensitas research and development pada pengungkapan modal intelektual. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 522–548.
- Aulia, D., Ulum, I., & Wahyuni, E. D. (2019). Pengaruh ukuran, kompleksitas, program internasional, dan status akreditasi terhadap pengungkapan intellectual capital pada Universitas Muhammadiyah di Indonesia.



- Brusca, I., Cohen, S., Manes-rossi, F., & Nicolò, G. (2019). Intellectual capital disclosure and academic rankings in European universities. Do they go hand in hand? *Meditari Accountancy Research*, 28(1), 51-71. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2019-0432>
- Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern methods for business research*. In *Statistical Strategies for Small Sample Research* (Issue April). <http://books.google.com.sg/books?hl=en&lr=&id=EDZ5AgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA295&dq=chin+1998+PLS&ots=47qB7ro0np&sig=rihQBibvT6S-Lsj1H9tXe9dX6Zk#v=onepage&q&f=false>
- Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Unregulated corporate reporting decisions: Considerations of systems oriented theories: Financial accounting theory.
- Fajriani. (2019). Analisis efisiensi, efektivitas, dan kemandirian keuangan pada badan layanan umum di Universitas Tadulako. *Katalogis*, 6(9), 36-48.
- Falqueto, J. M. Z., Hoffmann, V. E., Gomes, R. C., & Mori, S. S. O. (2019). Strategic planning in higher education institutions: What are the stakeholders' roles in the process? <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10734-019-00455-8> Strategic
- Fathony, M., & Ulum, I. (2018). University' characteristics, accreditation status, and intellectual capital disclosure: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economics and Research*, 9(6), 23-36.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (X). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gobel, I. C., Juanda, A., Ulum, I., & Mudrifah, M. (2020). Determinants of intellectual capital disclosure in non-vocational higher education in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2102154>
- Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah (3rd ed.). Salemba Empat.
- Ho, H., Chau, K., & Cheung, P. (2012). Intellectual capital disclosure and initial public offerings: Evidence from Hong Kong. *Journal of Applied Economics and Business Research*, 2(2), 56-68.
- Kamal, B., & Rahmadiane, G. D. (2017). Pengaruh persepsi akreditasi prodi dan promosi terhadap keputusan memilih program studi akuntansi pada Politeknik Harapan Bersama. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 145-158.
- Kurniawati, U., & Suharti, S. (2023). Pengaruh intensitas research & development dan ownership retention terhadap intellectual capital

- disclosure pada perusahaan yang melakukan IPO di BEI. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 363–378.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.
- Lu, Y. H., Tsai, C. F., & Yen, D. C. (2010). Discovering important factors of intangible firm value by association rules. *International Journal of Digital Accounting Research*, 10(July 2009), 55–85. [https://doi.org/10.4192/1577-8517-v10\\_3](https://doi.org/10.4192/1577-8517-v10_3)
- Ma'wa, A., & Rahmawati, I. P. (2023). Determinan pengungkapan intellectual capital pada perguruan tinggi. *Jurnal Review Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 35–52. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i1>.
- Mali, M. . (2020). Internasionalisasi kampus sebagai strategi perguruan tinggi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(1), 68–78.
- Mkumbuzi, W. P. (2015). Firm resources, corporate governance and the disclosure of intangible assets. *Asian Social Science*, 11(24), 113–128. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n24p113>
- Nicolo, G., Raimo, N., Polcini, P. T., & Vitolla, F. (2021). Unveiling the link between performance and intellectual capital disclosure in the context of Italian public universities. *Evaluation and Program Planning*, 88(January). <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2021.101969>
- Rahayu, N. E., & Sudaryono, E. A. (2022). Correlation between university accreditation and web based intellectual capital disclosure. In *Proceedings of The 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics* (pp. 437–444). <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320773>
- Rahayu, N. E., & Sudaryono, E. A. (2023). The influence of internationality and location on disclosure of intellectual capital: a studies in higher education. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 12(1), 46. <https://doi.org/10.25273/jap.v12i1.13118>
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Triana, E. (2017). Modal intelektual dan daya saing perguruan tinggi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 153–162. <https://doi.org/10.18196/jai.180279>
- Ramirez, Y., Merino, E., & Manzanegue, M. (2019). Examining the intellectual capital web reporting by Spanish universities. *Online Information Review*, 43(5), 775–798. <https://doi.org/10.1108/OIR-02-2018-0048>
- Ramirez, Y., & Tejada, A. (2019). Digital transparency and public accountability in Spanish universities in online media. *Journal of Intellectual Capital*, 20(5), 701–732. <https://doi.org/10.1108/JIC-02-2019-0039>



- Rossi, F. M., Nicolò, G., & Polcini, P. T. (2018). New trends in intellectual capital reporting. Exploring online intellectual capital disclosure in Italian universities. 19. <https://doi.org/10.1108/JIC-09-2017-0119>
- Saputro, F. C., Anggraeni, W., & Mukhlason, A. (2012). Pembuatan dashboard berbasis web sebagai sarana evaluasi diri berkala untuk persiapan penilaian akreditasi berdasarkan standar badan akreditasi nasional perguruan tinggi. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), A397–A402. <http://ejurnal2.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/1141>
- Sariningsih, W., & Saputro, F. E. (2020). Firm size, profitabilitas, leverage, jenis perusahaan audit, jenis industri, penelitian dan pengembangan sebagai determinan pengungkapan modal intelektual. *Jurnal Akunida*, 6(2), 26. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3564>
- Secundo, G., Margherita, A., Elia, G., & Passiante, G. (2010). Intangible assets in higher education and research: Mission, performance or both? *Journal of Intellectual Capital*, 11(2), 140–157. <https://doi.org/10.1108/14691931011039651>
- Susanti, S., Agarina, M., Pranyoto, E., & Safitriani, F. (2021). Pengungkapan intellectual capital pada perguruan tinggi swasta peraih Webometrics 2021 di Lampung. *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 55–64. <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/2937%0Ahttps://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/download/2937/1258>
- Ulum, I. (2019). Intellectual Capital Framework Perguruan Tinggi Di Indonesia Berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi (Iaps) 4.0. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 309. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.10227>
- Ulum, I., & Novianty, N. (2012). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan intellectual capital pada official website perguruan tinggi Indonesia. 1–22.
- Venkatraman, S. (2007). A framework for implementing TQM in higher education programs. *Quality Assurance in Education*, 15(1), 92–112. <https://doi.org/10.1108/09684880710723052>
- Vitolla, F., Raimo, N., Nicolò, G., & Ricciardelli, A. (2022). Exploring intellectual capital disclosure and its determinants in knowledge-based institutions: empirical evidence from international universities. *Measuring Business Excellence*, 27(2), 227–245. <https://doi.org/10.1108/MBE-01-2022-0020>
- Yulianingsih, Y. (2016). Manajemen akreditasi program studi pada perguruan tinggi. *Al-Idarah Kependidikan Islam*, 5(1), 93.

# BAB III

## DETERMINAN *INTERNAL CONTROL DISCLOSURE* PADA LAPORAN KEUANGAN DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

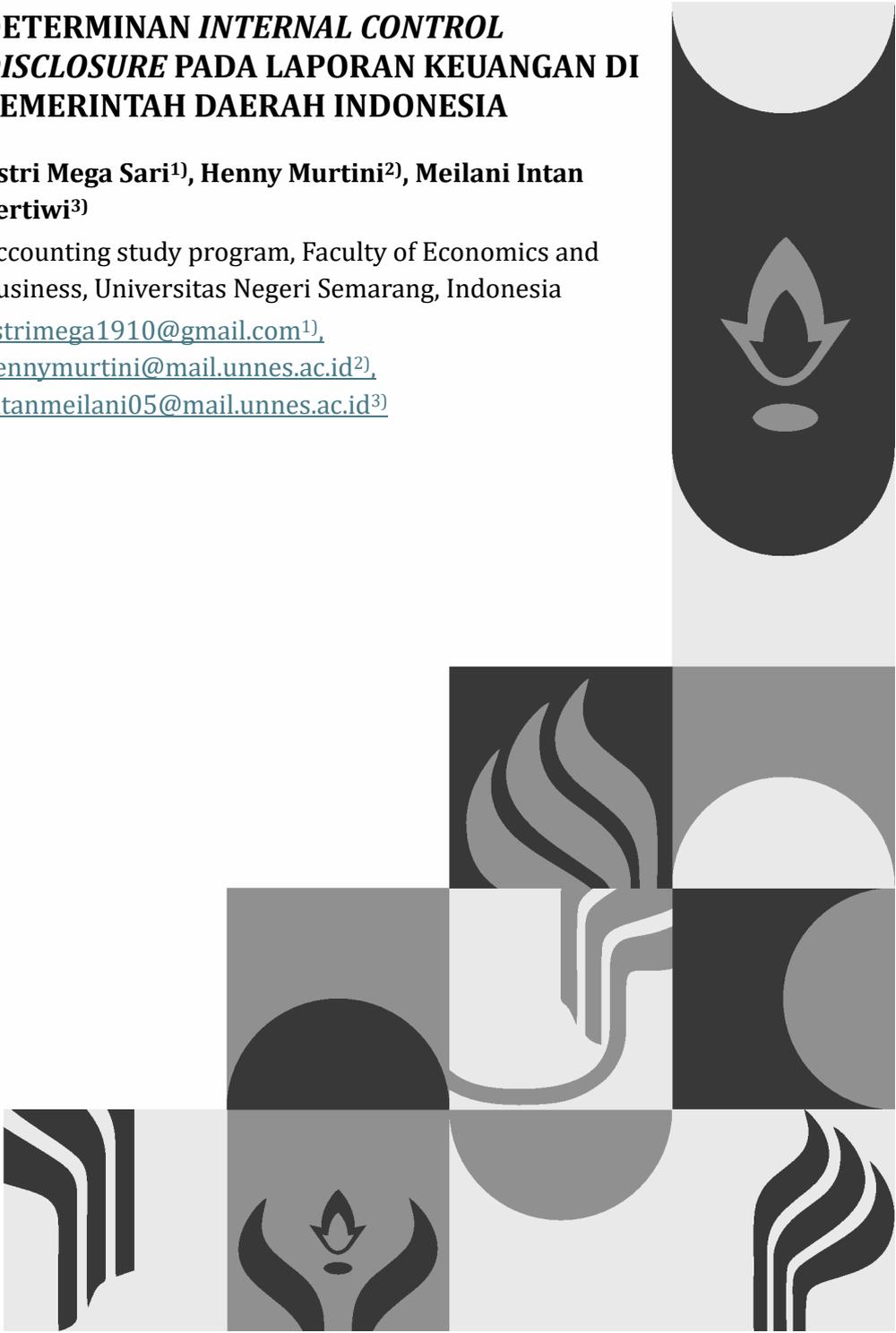
**Astri Mega Sari<sup>1)</sup>, Henny Murtini<sup>2)</sup>, Meilani Intan Pertiwi<sup>3)</sup>**

Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[astrimega1910@gmail.com<sup>1\)</sup>](mailto:astrimega1910@gmail.com),

[hennymurtini@mail.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:hennymurtini@mail.unnes.ac.id),

[intanmeilani05@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:intanmeilani05@mail.unnes.ac.id)



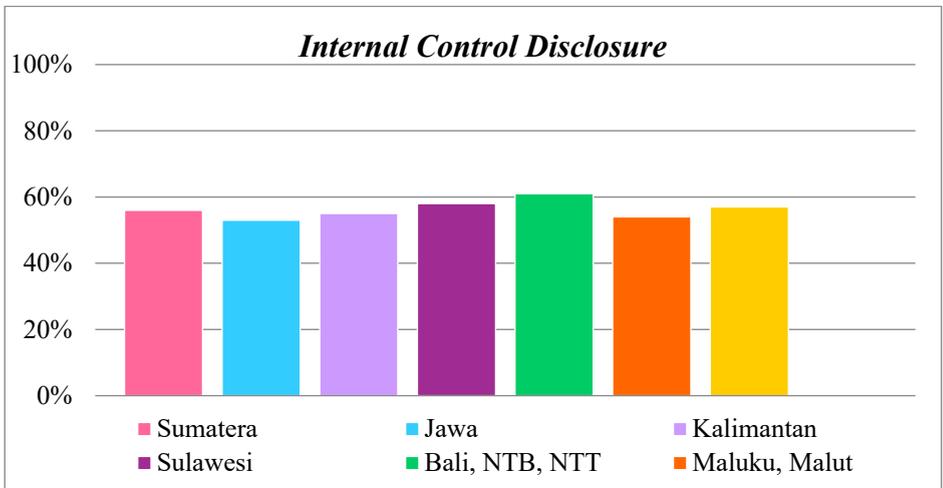
**Abstrak** Topik ini menarik untuk dibahas karena pemerintah selaku steward diharapkan memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat selaku principal terkait pelaksanaan internal control. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris determinan *internal control disclosure* pada laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Populasi yang diambil penelitian ini merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 203 unit analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan alat analisis SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *human resource quality* berpengaruh positif terhadap internal control disclosure. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap internal control disclosure, sedangkan umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah dan pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh.

Kata kunci: Internal Control Disclosure, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Human Resource Quality.

## **Pendahuluan**

Pengungkapan Pengendalian Internal (*Internal Control Disclosure*) pada lingkup pemerintahan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat (*principal*) dalam menciptakan tata kelola yang baik. Kondisi ini digambarkan dengan akuntabilitas dan transparansi melalui pelaksanaan kegiatan pelaporan salah satunya dengan pelaksanaan pengungkapan *internal control*. Pengungkapan *internal control* merupakan cara untuk memberikan informasi yang dilakukan untuk merefleksikan efisiensi, efektivitas, dan keberlangsungan *internal control* dalam suatu organisasi (Leng & Ding, 2011). Setiap daerah perlu melakukan pengungkapan *internal control* untuk mengetahui informasi mengenai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan *internal control* di setiap tahunnya.

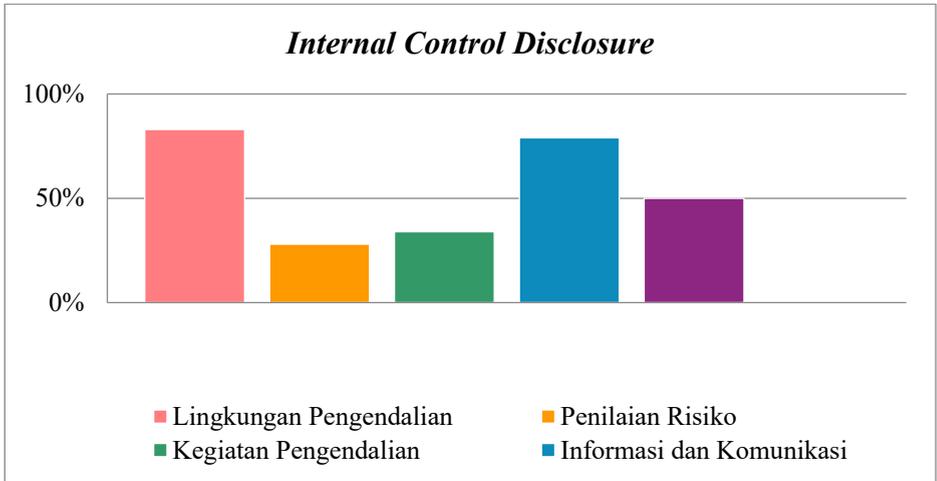
*Gambar 3. 4 Grafik Pengungkapan Internal Control pada Pemerintah Daerah di Indonesia*



Sumber: Observasi peneliti (2024)

Penelitian terkait pengungkapan *internal control* pada laporan keuangan di pemerintah daerah belum ditemukan. Penelitian ini melakukan observasi untuk mengetahui fenomena pengungkapan *internal control* yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten/kota dengan item pengungkapan didasarkan pada prinsip *internal control* menurut COSO (2013). Kerangka COSO (2013) terdiri dari lima komponen yang meliputi 17 prinsip *internal control* yaitu lingkungan pengendalian (lima prinsip), penilaian risiko (empat prinsip), kegiatan pengendalian (tiga prinsip), informasi dan komunikasi (tiga prinsip), serta pemantauan (dua prinsip). Besarnya pengungkapan diperoleh dengan variabel *dummy* yaitu 1 bagi prinsip yang telah diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung pada laporan keuangan dan 0 sebaliknya. Gambar 1.3 menunjukkan pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan analisis wilayah yang terdiri dari Sumatera; Jawa; Kalimantan; Sulawesi; Bali, NTB, NTT; Maluku, Malut; dan Papua, Pabar. Masing-masing persentase pengungkapan sebesar 56 persen, 53 persen, 55 persen, 58 persen, 61 persen, 54 persen, dan 57 persen. Sehingga diperoleh hasil temuan bahwa rata-rata pengungkapan *internal control* sebesar 57 persen dibawah penelitian Arisandi *et al.* (2022) dan Priantaka & Dewayanto (2019). Pengungkapan tersebut tergolong rendah mengingat pentingnya informasi *internal control* bagi masyarakat.

Gambar 3. 5 Grafik Pengungkapan Internal Control berdasarkan Komponen COSO pada Pemerintah Daerah di Indonesia



Sumber: Observasi peneliti (2024)

Komponen *internal control* menurut COSO (2013) terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil observasi pada Gambar 1.4 menunjukkan pengungkapan *internal control* berdasarkan komponen penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan memperoleh persentase rendah. Masing-masing persentase komponen tersebut sebesar 28 persen, 34 persen dan 50 persen, artinya pemerintah daerah kurang mengungkapkan ketiga komponen *internal control* kepada masyarakat. Sedangkan, komponen lain misalnya lingkungan pengendalian, serta informasi dan komunikasi memperoleh persentase masing-masing sebesar 83 persen dan 79 persen. Ketimpangan persentase pengungkapan pada komponen *internal control* menandakan minimnya pengungkapan *internal control* pada beberapa komponen. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan belum sepenuhnya mencapai 100 persen sehingga pemerintah masih perlu memperbaiki serta memperhatikan luasnya pengungkapan *internal control* khususnya pada pemerintah daerah kabupaten atau kota Rendahnya pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021 menandakan bahwa pemerintah dalam menyelesaikan tanggung jawabnya rendah. Fenomena

tersebut menyebabkan munculnya risiko kepercayaan masyarakat (*principal*) terhadap pemerintah daerah (*steward*). Risiko kepercayaan masyarakat ini menjadi salah satu urgensi dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemenuhan informasi terkait *internal control* kepada publik. Penelitian ini menghadirkan kontribusi variabel pertumbuhan ekonomi dan *human resource quality* sebagai kebaruan penelitian. Pemilihan kedua variabel tersebut dikarenakan pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan *human resource quality* terhadap pengungkapan *internal control* pada laporan keuangan di pemerintah daerah belum ditemukan. Pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengungkapan *internal control* telah dilakukan oleh penelitian Hooghiemstra *et al.* (2015) pada 29 perusahaan di dunia dengan proksi *logaritma* Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sedangkan penelitian ini melakukan pengujian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan proksi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas harga konstan daerah.

### **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Teori *stewardship* dijadikan sebagai kerangka dasar dalam menjelaskan pengaruh setiap variabel independen terhadap dependen di objek penelitian organisasi sektor publik pada penelitian ini. Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) menjelaskan situasi seorang manajer sebagai *steward* dapat bertanggung jawab serta bertindak sesuai kepentingan *principal*. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyelesaian tanggung jawab serta pemenuhan keinginan masyarakat sesuai dengan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) dan dikembangkan oleh Saidin & Ali (2023). Teori *stewardship* beranggapan bahwa pemerintah sebagai *steward* bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat selaku *principal*. *Steward* mengupayakan untuk memenuhi kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan melaksanakan dan mengungkapkan *internal control*. Besar



kecilnya tingkat pengungkapan internal control dapat dipengaruhi oleh steward maupun principal.

Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan dan mensejahterakan publik serta memberikan pertanggungjawaban kepada publik (Dinah & Darsono, 2023). Pendapatan asli daerah menjadi salah satu pos pada laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik karena menjadi sumber pembangunan daerah. Teori *stewardship* menyatakan besar kecilnya pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan *internal control*. Pemerintah daerah (*steward*) berupaya untuk memberikan pertanggungjawaban terlaksananya *internal control* penerimaan daerah melalui pelaporan keuangan dan pengungkapan *internal control* sehingga masyarakat (*principal*) dapat memperoleh informasi yang memadai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

### **H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control***

Pendekatan *stewardship* mendorong pemerintah daerah (*steward*) untuk bertindak dengan mengutamakan kepentingan masyarakat (*principal*) (Pasoloran, 2001). Ukuran pemerintah daerah dengan sumber daya yang besar mendorong pemerintah (*steward*) untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya guna meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) dan digunakan untuk kepentingan masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah yang besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dalam pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud dari akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

### **H<sub>2</sub>: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control***

Umur pemerintah daerah berkaitan erat dengan pengalaman administrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang lebih tua mampu menyelesaikan proses administrasi lebih

unggul daripada pemerintah daerah yang lebih muda (Rofiq & Arza, 2021). Salah satu bentuk administrasi yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah adalah melakukan pengungkapan *internal control*. Terpenuhinya proses administrasi oleh pemerintah (*steward*) merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas kepada masyarakat (*principal*) sesuai dengan teori *stewardship*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

### **H<sub>3</sub>: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control***

Teori *stewardship* beranggapan bahwa pemerintah akan berusaha maksimal untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Herawati *et al.*, 2016). Sesuai teori *stewardship*, pemerintah (*steward*) harus tetap berupaya mencapai tujuan pemerintahan untuk memenuhi keinginan masyarakat (*principal*). Luasnya rentang kendali tidak dapat menggugurkan tanggung jawab dan kewajiban dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Salah satu tanggung jawab yang perlu diselesaikan adalah pelaksanaan *internal control* dan pelaksanaan pengungkapan *internal control*. Pemerintah dengan rentang kendali yang luas perlu memperluas pengungkapan sebagai bentuk pemenuhan informasi sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

### **H<sub>4</sub>: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control***

Pemerintah daerah (*steward*) yang dipimpin oleh sumber daya manusia unggul lebih mudah mencapai tujuan dan memenuhi kehendak masyarakat (*principal*). Pemerintah (*steward*) perlu mengerahkan kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan informasi yang berkualitas (Herawati *et al.*, 2016). Salah satu cara untuk memperoleh kemampuan dan keahlian yang cukup adalah dengan pendidikan yang ditempuhnya. Kepala daerah (*steward*) yang memiliki pendidikan yang semakin tinggi memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik untuk



menghasilkan informasi melalui pengungkapan *internal control*. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

**H<sub>5</sub>: Pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control***

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mampu mengindikasikan pemerintah (*steward*) telah memenuhi kehendak masyarakat (*principal*) dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tinggi mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan karena pemerintah cenderung memperhatikan kewajiban untuk mematuhi regulasi yang ada (Hajrianti, 2022). Tingginya pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan fokus pemerintah dalam menyelesaikan tanggung jawab atas perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah dengan dilakukannya pengungkapan pengendalian internal pada pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas perwujudan akuntabilitas pemerintahan ini sejalan dengan teori *stewardship*. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

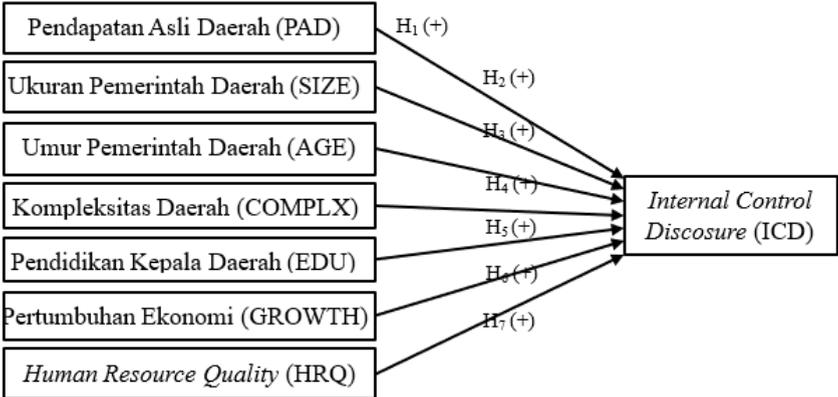
**H<sub>6</sub>: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control***

Indeks pembangunan manusia yang tinggi menjadikan pemerintah daerah termotivasi dalam memperluas pengungkapan informasi pada laporan keuangan untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya (Utami & Sulardi, 2019). Tingginya *human resource quality* suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut didominasi dengan masyarakat (*principal*) yang memiliki kualitas hidup tinggi. Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah selaku *steward* perlu bekerja sama dengan masyarakat selaku *principal* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerja sama masyarakat dengan pemerintah dapat berupa pengawasan dan pemantauan atas pemenuhan tanggung jawab pemerintah khususnya terkait pengungkapan *internal control*

sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan *human resource quality* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*.

*H<sub>7</sub>: Human resource quality berpengaruh positif terhadap*

Gambar 3. 6 Kerangka Berpikir



**pengungkapan *internal control***

Sumber: Gambar diolah (2024)

**Metode**

Populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sejumlah 514 pemerintah daerah yang telah menyajikan laporan keuangan. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 214 pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada proses pengolahan data ditemukan sebanyak 11 data outlier yang kemudian dikecualikan dari sampel penelitian. Total unit analisis yang sesuai kriteria sebanyak 203. Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 yang berasal dari BPK-RI. Data lain berasal dari Badan Pusat Statistik berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yurniwati & Rizaldi (2015) yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai acuan ukuran analisis lingkungan pengendalian pemerintah. Unsur

*internal control* pada pemerintah daerah memiliki perbedaan dengan perbankan maupun perusahaan. Unsur tersebut terdiri dari lima unsur meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang kemudian dijabarkan menjadi 25 sub unsur. Penelitian ini menjadikan sub unsur *internal control* pada regulasi ini sebagai acuan item pengungkapan.

Tabel 3. 6 Nilai Item Pengukuran Internal Control Disclosure

Dimensi Variabel	Nilai
Regulasi terkait item <i>internal control</i>	Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Item ada dan telah dikomunikasikan	Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Item telah diterapkan sebagian besar	Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Evaluasi terkait item <i>internal control</i>	Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Pengembangan item <i>internal control</i>	Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0

Sumber: Modifikasi dari Perka No. 4 Tahun 2016

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan mengawasi serta menemukan kekurangan ataupun kelemahan sistem pengendalian intern menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Regulasi ini dimodifikasi dan dijadikan sebagai acuan penentuan nilai serta bobot pengungkapan *internal control* pada penelitian ini. Rincian nilai item pengungkapan *internal control* disajikan pada Tabel 1. Setiap item pengungkapan akan memperoleh nilai maksimum sebesar 5. Perbedaan item pengungkapan pada lingkup pemerintahan dengan perusahaan menjadikan adanya perbedaan pengukuran. Pemilihan pengukuran ini disesuaikan dengan kebutuhan pengungkapan *internal control* pada lingkup pemerintah daerah. Indeks pengungkapan dalam penelitian ini dihitung dengan:

$$\begin{aligned}
 & \text{Internal Control Disclosure (ICD)} \\
 & = \frac{\text{Skor pengungkapan}}{\text{Skor maksimum pengungkapan}}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

$$\text{Skor pengungkapan} = \sum (\text{Item yang diungkapkan} \times \text{Nilai item pengungkapan (Tabel 1)})$$

Skor maks pengungkapan = Total item pengungkapan × Nilai maks item pengungkapan (Tabel 1)

Tabel 3. 7 Operasional Variabel

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
<i>Internal Control Disclosure</i> (Y)	Pengungkapan <i>internal control</i> (ICD) adalah suatu cara untuk memberikan informasi terkait efektivitas, efisiensi, dan keberlangsungan <i>internal control</i> dalam suatu organisasi yang terdiri dari lima unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.	Kelima unsur tersebut kemudian dijabarkan menjadi 25 item pengungkapan dengan bobot pengukuran masing-masing sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016. $ICD = \frac{Skor\ Pengungkapan}{Bobot\ Pengungkapan}$	(Leng & Ding, 2011) (Perka BPKP No 4 2016)
Pendapatan Asli Daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pendapatan daerah yang diperoleh melalui pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerahnya.	$PAD = Ln (Realisasi PAD)$	(Saputro & Mahmud, 2015) (Simbolon & Kurniawan, 2018)
Ukuran Pemerintah Daerah (X2)	Ukuran pemerintahan daerah ( <i>SIZE</i> ) merupakan suatu variabel untuk mengukur sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.	$SIZE = Ln (Total\ Aset)$	(Adiputra <i>et al.</i> , 2018) (Andesti & Agustin, 2022)
Umur Pemerintah Daerah (X3)	Umur pemerintah daerah ( <i>AGE</i> ) adalah tahun terbentuknya pemerintah daerah sesuai peraturan	$AGE = Tahun\ penelitian - Tahun\ perolehan\ otonomi$	(Rofiq & Arza, 2021)

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
	perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah bersangkutan.		
Kompleksitas Daerah (X4)	Kompleksitas ( <i>COMPLX</i> ) adalah tingkatan diferensiasi yang dapat menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan.	$COMPLX = \sum \text{Kecamatan}$	(Rahmiyatun <i>et al.</i> , 2018) (Andesti & Agustin, 2022)
Pendidikan Kepala Daerah (X6)	Latar belakang pendidikan ( <i>EDU</i> ) merupakan salah satu karakteristik yang menjadi ukuran kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh suatu individu.	<i>Scoring</i> 1= Pendidikan min. S1 2 = Pendidikan min. S2 3 = Pendidikan min. S3	(Leng & Ding, 2011)
Pertumbuhan Ekonomi (X5)	Pertumbuhan ekonomi ( <i>GROWTH</i> ) diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.	$GROWTH = \frac{PDRB t1 - PDRB t}{PDRB t - 1} \times 100\%$	(Hasyim, 2016) (Andesti & Agustin, 2022)
<i>Human Resource Quality</i> (X7)	Sumber daya manusia ( <i>HRQ</i> ) adalah kemampuan dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungan, sedangkan prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.	<i>Human Resource Quality</i> $= \sum IPM$	(Choi <i>et al.</i> , 2013) (Yaya & Suprobo, 2019)

Sumber: Data diolah (2024)

Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Selain itu, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis SPSS Versi 25. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah, pendidikan kepala daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *human resource quality* terhadap variabel dependen yaitu *internal control disclosure*. Tabel 2 menunjukkan deskripsi dan metode pengukuran setiap variabel penelitian. persamaan regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini.

$$ICD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SIZE + \beta_3 AGE + \beta_4 COMPLX + \beta_5 EDU + \beta_6 GROWTH + \beta_7 HRQ + \varepsilon$$

Keterangan:

ICD	= <i>Internal Control Disclosure</i>
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien Regresi
e	= <i>Standard Error</i>
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
SIZE	= Ukuran Pemerintah Daerah
AGE	= Umur Pemerintah Daerah
COMPLX	= Kompleksitas Daerah
EDU	= Pendidikan Kepala Daerah
GROWTH	= Pertumbuhan Ekonomi
HRQ	= <i>Human Resource Quality</i>

## Hasil

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran dari data penelitian yang dapat dilihat melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk setiap variabel. Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif penelitian ini.

*Tabel 3. 8 Analisis Statistik Deskriptif*

Variabel	Obs	Mean	Min	Max
<i>Internal Control Disclosure</i> (Y)	203	0,51	0,45	0,50
Pendapatan Asli Daerah (X1)	203	25,21	22,30	28,50
Ukuran Pemerintah Daerah (X2)	203	28,61	27,40	31,90
Umur Pemerintah Daerah (X3)	203	41,00	7,00	49,50
Kompleksitas Daerah (X4)	203	14,46	2,00	51,00
Pendidikan Kepala Daerah (X5)	203	2,14	1,00	3,00
Pertumbuhan Ekonomi (X6)	203	0,07	0,00	0,20
<i>Human Resource Quality</i> (X7)	203	68,46	32,84	85,70

Sumber: *Output SPSS 25, 2024*

Analisis statistik inferensial pada penelitian ini terdiri dari uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik atau uji prasyarat yang harus terpenuhi pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *asympt.sig* sebesar 0,200 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , berarti bahwa model regresi memiliki data residual yang telah berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Sedangkan, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji park menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai *sig* lebih dari 0,05.

*Tabel 3. 9 Analisis Regresi Linear Berganda*

Variabel Independen	Koefisien	t-hitung	Sig
Konstanta	0,58968	10,81	0,00
Pendapatan Asli Daerah	0,01013	6,43	0,00
Ukuran Pemerintah Daerah	-0,01463	-6,14	0,00
Umur Pemerintah Daerah	0,00002	0,87	0,39
Kompleksitas Daerah	-0,00022	-1,58	0,12
Pendidikan Kepala Daerah	-0,00105	-0,82	0,41
Pertumbuhan Ekonomi	0,06223	2,44	0,02
<i>Human Resource Quality</i>	0,00127	5,87	0,00

F-hitung	41,14
F-tabel	2,06
Sig. F	0,00
<i>Adjusted R Square</i>	0,58

Sumber: Data sekunder yang diolah (2024)

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linear berganda yang menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah, pendidikan kepala daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *human resource quality* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan *internal control*. Nilai *adjusted r-square* sebesar 0,58 atau 58 persen berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 58 persen dan sisanya sebesar 42 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 3. 10 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H <sub>1</sub> : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: 0,01013 Sig: 0,00	H <sub>1</sub> diterima
H <sub>2</sub> : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: - 0,01463 Sig: 0,00	H <sub>2</sub> ditolak
H <sub>3</sub> : Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: 0,00002 Sig: 0,39	H <sub>3</sub> ditolak
H <sub>4</sub> : Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: - 0,00022 Sig: 0,12	H <sub>4</sub> ditolak
H <sub>5</sub> : Pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: - 0,00105 Sig: 0,41	H <sub>5</sub> ditolak
H <sub>6</sub> : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: 0,06223 Sig: 0,02	H <sub>6</sub> diterima
H <sub>7</sub> : <i>Human resource quality</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>internal control</i> pada pemerintah daerah	Koefisien: 0,00127 Sig: 0,00	H <sub>7</sub> diterima

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 5 menunjukkan hanya tiga variabel independen yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control* yaitu pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *human resource quality*. Sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *internal control*. Variabel lain yaitu umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah, dan pendidikan kepala daerah tidak mampu mempengaruhi pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,01013. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hubungan antara *steward* dan *principal* dibangun berdasarkan kepercayaan sesuai sifat dasar manusia yang bertanggung jawab, berintegrasi dan tidak merugikan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah pelaksanaan *internal control* atas pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah mendorong pemerintah daerah (*steward*) untuk memberikan pertanggungjawaban terlaksananya *internal control* penerimaan daerah berupa pengungkapan *internal control* sehingga masyarakat (*principal*) dapat memperoleh informasi yang memadai atas pelaksanaan *internal control* khususnya pada penerimaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Jaya & Sisdyani (2014) menunjukkan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi melalui situs resmi pemerintah. Pendapatan asli daerah yang tinggi mencerminkan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan secara kompleks pada laporan keuangannya.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi

sebesar -0,01463. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Ukuran pemerintah daerah dengan sumber daya yang besar mendorong pemerintah (*steward*) untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya guna meminimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*) dan digunakan untuk kepentingan masyarakat (*principal*). Semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka memberikan kemudahan bagi pemerintah (*steward*) dalam hal pemenuhan harapan masyarakat (*principal*). Pemerintah daerah yang besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dalam pelaporannya sebagai wujud dari akuntabilitas publik. Salah satu hal yang perlu diungkapkan ialah pengendalian internal pemerintah daerah. Namun, pemerintah daerah yang memiliki sumber daya yang semakin besar cenderung fokus dalam pengelolaan dan pengendaliannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki kekayaan yang besar tidak selalu memiliki pengungkapan *internal control* yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Weli *et al.* (2020) bahwa ukuran memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan *internal control*.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel umur pemerintah daerah sebesar 0,39 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00002. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya pengungkapan *internal control*. Umur pemerintah daerah tidak dapat mencerminkan pengalaman yang dimiliki oleh pemerintahan. Hal tersebut juga dikarenakan adanya *reshuffle* pejabat pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi pengalaman pemerintah daerah tersebut. *Reshuffle* pejabat pemerintahan tersebut juga sudah tertuang pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah daerah cenderung melakukan pengungkapan yang bersifat monoton. Pengungkapan yang monoton berarti bahwa pemerintah dikatakan tidak memperbaiki pengungkapan dari pengalaman yang



sebelumnya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Simbolon & Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel kompleksitas daerah sebesar 0,12 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,00022. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Semakin kompleks suatu daerah dapat menghambat keberhasilan untuk mencapai tujuan dikarenakan semakin luas rentang kendalinya. Luasnya rentang kendali tersebut cenderung mempersulit pemerintah dalam mengambil keputusan khususnya dalam tata kelola pemerintahan. Kompleksitas dilihat dari banyaknya kecamatan yang membangun daerah tersebut. Banyaknya kecamatan di suatu daerah tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya pengungkapan *internal control*. Semakin banyak kecamatan di suatu daerah belum dapat menggambarkan rentang kendali pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan menurut UU No. 23 Tahun 2014 jumlah kecamatan dijadikan sebagai persyaratan dasar pembentukan daerah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan cakupan wilayahnya. Berdasarkan regulasi tersebut, pembentukan pemerintah daerah kabupaten paling sedikit mencakup lima kecamatan, sedangkan kota paling sedikit mencakup empat kecamatan. Hal tersebut juga berarti bahwa, luasnya rentang kendali pemerintahan kurang tepat jika diprosikan dengan jumlah kecamatan karena jumlah kecamatan hanya mencerminkan cakupan wilayah suatu daerah dan tidak mencerminkan kompleksitas daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulana & Handayani (2015) yang menyatakan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan wajib pada laporan keuangan.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pendidikan kepala daerah sebesar 0,41 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,00105. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah daerah yang memiliki pendidikan tinggi tidak selalu melakukan pengungkapan *internal control* yang baik. Hal tersebut dapat

disebabkan karena berbagai faktor misalnya pendidikan yang tidak sejalan dan tidak berkaitan dengan keuangan maupun manajemen risiko. Pemerintah daerah yang berpendidikan tinggi tidak selalu memiliki kompetensi mengenai pengungkapan *internal control* sehingga latar belakang yang dimilikinya tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan *internal control*. Menurut penelitian Saidin & Ali (2023), Dewayanto *et al.* (2017), dan Stefany & Wijaya (2017), kompetensi ekonomi dan akuntansi menjadi pendorong dalam penyusunan laporan keuangan sehingga kualitas pengungkapan *internal control* semakin tinggi. Kompetensi akuntansi mampu menggambarkan kemampuan individu terkait pemahamannya terhadap laporan keuangan. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui data penelitian latar belakang pendidikan ekonomi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yaitu sebesar 33 persen kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan sisanya sebesar 67 persen memiliki latar belakang pendidikan selain ekonomi.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,06223. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dinilai mampu mengindikasikan pemerintah (*steward*) telah memenuhi kehendak masyarakat (*principal*) dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat menyebabkan pemerintah daerah lebih fokus dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah dengan dilakukannya pengungkapan pengendalian internal pada pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas perwujudan akuntabilitas pemerintahan ini sejalan dengan teori *stewardship*. Aspek penting yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah dalam lingkup regional adalah PDRB daerah tersebut (Majid, 2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hooghiemstra *et al.* (2015) yang



menyatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi yang diproksikan oleh PDB berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*. Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel *human resource quality* sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,00127. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *human resource quality* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah selaku *steward* perlu bekerja sama dengan masyarakat selaku *principal* dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tingginya *human resource quality* suatu daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut didominasi dengan masyarakat (*principal*) yang memiliki kualitas hidup tinggi. Kerja sama masyarakat dengan pemerintah dapat berupa pengawasan dan pemantauan atas pemenuhan tanggung jawab pemerintah khususnya terkait pengungkapan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Semakin tinggi pemenuhan tanggung jawab pemerintah dalam mengungkapkan informasi sebagai bentuk akuntabilitas publik ini berarti bahwa pengungkapan *internal control* juga tinggi. Penelitian Choi *et al.* (2013) menyatakan bahwa keberadaan *human resource* sebagai personel *internal control* berpengaruh positif terhadap remediasi atas *internal control weaknesses* yang telah diungkapkan sebelumnya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulyati *et al.* (2024) yang memperoleh hasil bahwa *human development* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan pada pemerintah daerah di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *human resource quality* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*. Namun, variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internal control*, dan umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah serta pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh. Pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan *human resource quality* semakin tinggi mampu berpengaruh pada *internal control disclosure* yang tinggi pula. Pendapatan asli daerah yang tinggi meningkatkan urgensi pelaksanaan

*internal control*, sehingga pemerintah juga perlu melakukan pengungkapan informasi pelaksanaan tersebut kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan tata kelola yang baik, salah satunya dengan pelaksanaan *internal control* yang perlu ditindaklanjuti dengan diadakannya pengungkapan. Sedangkan Tingginya *human resource quality* mampu mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan tanggung jawab, salah satunya dengan melaksanakan pengungkapan *internal control*.

Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan urgensi pelaksanaan dan pengungkapan *internal control*. Pemerintah daerah perlu memastikan komponen masyarakatnya memiliki *human resource quality* yang baik sehingga memiliki kepedulian lebih terkait tanggung jawab pemerintah khususnya pada pengungkapan *internal control*. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap determinan mengenai pengungkapan *internal control* menggunakan teori lainnya misalnya teori *stakeholder* sehingga mampu menggambarkan determinan pengungkapan *internal control* dari berbagai pihak pengguna laporan keuangan. Variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan yaitu umur pemerintah daerah dapat digantikan dengan variabel lain misalnya masa jabatan kepala daerah, pengukuran kompleksitas daerah dapat digantikan dengan besarnya populasi, sedangkan variabel pendidikan kepala daerah dapat digantikan dengan pengukuran latar belakang pendidikan ekonomi sehingga mampu berpengaruh terhadap *internal control disclosure*.

Keterbatasan pada penelitian ini ialah proksi yang digunakan untuk mengukur umur pemerintah daerah kurang mencerminkan pengalaman suatu daerah dalam mengelola pemerintahannya. Variabel pendidikan kepala daerah juga belum mencerminkan kemampuan dan pengetahuan kepala daerah terkait pengungkapan *internal control*. Data penelitian ini hanya berasal dari satu tahun penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran yang lebih akurat untuk variabel independen yang belum mampu berpengaruh terhadap pengungkapan *internal control*.



## Referensi

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. In *Asian Journal of Accounting Research* (Vol. 3, Issue 1, pp. 123–138). <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Andesti, M., & Agustin, H. (2022). Pengaruh kompleksitas daerah, ukuran pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 131–149. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.468>
- Arisandi, A., Islami, H. A., & Soeprajitno, R. R. W. N. (2022). Internal control disclosure and financial reporting quality : Evidence from banking sector in Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 3797. <https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i02.p15>
- Choi, J.-H., Choi, S., Hogan, C. E., & Lee, J. (2013). The effect of human resource investment in internal control on the disclosure of internal control weaknesses. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32(4), 169–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.2308/ajpt-50514>
- COSO. (2013). *The 2013 COSO Framework & SOX Compliance*. In J. S. McNally (Ed.), *The Accountants and Financial Professionals in Business*.
- Dewayanto, T., Suhardjanto, D., Bandi, & Setiadi, I. (2017). Ownership structure, audit committee, and internal control disclosure : Indonesia and Philippines. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 353–363.
- Dinah, L. S., & Darsono. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja modal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–13.
- Hajrianti, N. (2022). Pengaruh sosioekonomi terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. In *Jurnal Ecogen* (Vol. 5, Issue 1, p. 37). <https://doi.org/10.24036/jmpe.v5i1.12741>
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro. Kencana*.
- Herawati, E., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2016). Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *JIAM - Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1).
- Hooghiemstra, R., Hermes, N., & Emanuels, J. (2015). National culture and internal control disclosures: A cross-country analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 357–377. <https://doi.org/10.1111/corg.12099>
- Jaya, J. D., & Sisdyani, E. A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal pada kelengkapan pengungkapan

- informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah provinsi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 285–303.
- Leng, J., & Ding, Y. (2011). Internal control disclosure and corporate governance: Empirical research from Chinese Listed Companies. *Technology and Investment*, 2(4), 286–294. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4236/ti.2011.24029>
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. In *Accounting Analysis Journal* (Vol. 4, Issue 4, pp. 1–11).
- Pasoloran, O. (2001). Teori stewardship : Tinjauan konsep dan implikasinya pada akuntabilitas organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 419–432.
- Priantaka, I. K., & Dewayanto, T. (2019). Struktur kepemilikan, dewan komisaris, dan pengungkapan pengendalian internal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–13.
- Putra, D. A., Z.A, K., & Indriasari, D. (2023). Analisis faktor-faktor tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 12(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10403719>
- Rahmiyatun, F., Muchtar, E., & Lestari, R. (2018). Kajian mengenai kelemahan pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. In *Jurnal Mitra Manajemen* (Vol. 2, Issue 1, pp. 13–23). <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i1.32>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 4 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/kaltim/files/PeraturanKeputusan-Kepala-BPKP-tahun-2016-PERKA-Nomor-04-Th-2016.pdf>
- Peraturan KPU Nomor 1, (2020).
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, umur pemerintah daerah, status pemerintah daerah, jumlah penduduk, jumlah SKPD, belanja pegawai dan leverage terhadap kemandirian keuangan daerah. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Saidin, S. Z., & Ali, E. I. E. (2023). The relationship between organizational characteristics and the quality of local government financial statements.

- Public and Municipal Finance, 12(2), 117–128.  
[https://doi.org/10.21511/pmf.12\(2\).2023.10](https://doi.org/10.21511/pmf.12(2).2023.10)
- Saputro, A. S., & Mahmud, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 4(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aa.v4i3.8299>
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *MODUS*, 30(1), 54–70.
- Stefany, & Wijaya, H. (2017). Pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 82–100.
- Ulyati, S., Adelia, Sabila, M., Mutia, K., Rahmawaty, Darwanis, & Fahlevi, H. (2024). Website Sustainability Disclosure, Government Size, and Human Development: Evidence from Indonesian Local Governments. 2024 ASU International Conference in Emerging Technologies for Sustainability and Intelligent Systems (ICETISIS), 1–5.  
<https://doi.org/10.1109/ICETISIS61505.2024.10459537>
- Utami, S. R., & Sulardi, S. (2019). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 19, Issue 2, p. 253). <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436>
- Weli, W., Sjarief, J., & Madyakusumawati, S. (2020). Supervision mechanism and quality of the internal control system disclosure. *Accounting*, 6, 1419–1428. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.8.007>
- Yaya, R., & Suprobo, H. S. (2019). Determinants of weaknesses in internal control of provincial government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 296–309. <https://doi.org/10.18196/jai.2003130>
- Yurniwati, & Rizaldi, A. (2015). Control Environment Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case. In *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (Vol. 211, pp. 844–850).  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.111>

# BAB IV

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN METODE WEIGHTED AVERAGE

Nazilatul Ulya<sup>1)</sup>, Henny Murtini<sup>2)</sup>, Atik Ul  
Mussanadah<sup>3)</sup>

Accounting study program, Faculty of Economics and  
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[nazilaulya02@gmail.com](mailto:nazilaulya02@gmail.com)<sup>1)</sup>,

[hennymurtini@mail.unnes.ac.id](mailto:hennymurtini@mail.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>,

[atikulmussa@mail.unnes.ac.id](mailto:atikulmussa@mail.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>



**Abstrak** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel ukuran pemerintahan, jumlah penduduk, umur pemerintahan, dan kompleksitas pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah 1.542 Kabupaten/Kota di Indonesia TA. 2020-2022. Sampel ditentukan dengan menggunakan tabel sampel *Isaac* dan *Michael*. Penelitian ini menggunakan metode *random sampling* menggunakan laporan BPK RI tahun 2020-2022 sebanyak 240 sampel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi Stata MP versi 17. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk dan umur pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah, Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah

## **Pendahuluan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih belum optimal yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemandirian dan ketidakefisienan keuangan daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibanding dana dari pemerintah pusat yang dapat mengakibatkan pemerintah daerah kurang menggali potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, tingkat efisiensi keuangan daerah di Indonesia tahun 2017-2021 memiliki rata-rata sebesar 100,69 persen atau dikategorikan tidak efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih rendah. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang rendah mengindikasikan manajemen keuangan daerah tidak dikelola dengan tepat yang menimbulkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang baik (Nzama, 2024).

Pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana *et al.*, 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Evaluasi hasil atau capaian kinerja menjadi tolak ukur untuk menilai kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan upaya meningkatkan PAD. Pengukuran kinerja keuangan digunakan pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga bagi masyarakat untuk mengevaluasi efektivitas pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik (Djuniar & Zuraida, 2018).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Sari, 2016). Dengan kata lain, kinerja keuangan dapat dideteksi dengan melakukan analisis laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah karena laporan keuangan merupakan alat penting yang memuat informasi mengenai posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai. Analisis menggunakan metode rata rata tertimbang (*weighted average*) melalui empat indikator rasio keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan suatu daerah secara komprehensif. Empat rasio keuangan tersebut meliputi rasio kemandirian, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Analisis rasio keuangan tersebut menjadikan masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya apakah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan pengalokasiannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Masdiantini & Erawati, 2016).

Pemerintah daerah di Indonesia sering dijumpai bahwa PAD cenderung lebih kecil dari dana perimbangan. Realisasi PAD seluruh kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2017 sampai 2021 lebih kecil dibanding dengan dana perimbangan yang berarti tingkat ketergantungan keuangan daerah tinggi dan tingkat kemandirian yang rendah. PAD yang kecil juga dapat menyebabkan menurunnya proporsi pendapatan daerah dan menyebabkan defisit anggaran. Defisit anggaran yang ekstrim dapat terjadi akibat kurangnya pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan kontrol dalam mengalokasikan APBD. Daerah yang



mengalami defisit anggaran salah satunya adalah Kabupaten Jepara. APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 mengalami defisit sekitar Rp 80 miliar yang disebabkan oleh PAD yang belum mencapai target senilai Rp 31 miliar dan tingkat likuiditas anggaran yang tidak stabil disebabkan oleh salah satunya SiLpa (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran). Kasus yang sama terjadi pada Kabupaten Pangandaran yang mengalami defisit anggaran yang cukup besar mencapai Rp 351 miliar pada tahun 2023 sehingga diperlukan efisiensi keuangan daerah dengan menerapkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Efisiensi keuangan daerah sangat penting dilakukan karena menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan (Widodo, 2022). Efisiensi keuangan daerah kabupaten atau kota di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 rata-rata sebesar 100,69 persen atau dapat dikatakan tidak efisien. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah daerah masih rendah dikarenakan belum dapat menekan jumlah belanja daerah (Fathah, 2017).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor finansial, faktor lingkungan, dan faktor kesejahteraan (Alfi & Sari, 2023). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya ukuran pemerintah. Ukuran pemerintah adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu (Noviyanti & Kiswanto, 2016). Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena aset yang dimiliki cukup untuk melakukan berbagai pembiayaan. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar lebih fleksibel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan sumber daya daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri *et al.* (2023) berkesimpulan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti

& Suryandari (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah jumlah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu daerah melalui adanya permintaan dan penawaran (Alfi & Sari, 2023). Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah yang diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) berkesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfi & Sari (2023) yang memberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nashiruddin & Witono (2024) dan Saldi *et al.* (2021) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Umur pemerintah adalah salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Umur pemerintah merupakan tahun dibentuknya suatu pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut (Setyaningrum & Syafitri, 2014). Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut sudah berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewata *et al.* (2018) berkesimpulan bahwa umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa



umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kompleksitas pemerintah. Kompleksitas pemerintah merupakan tingkatan diferensiasi pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan (Saputro & Mahmud, 2015). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempresentasikan kompleksitas pemerintah di Indonesia. SKPD berfungsi untuk menjalankan fungsi eksekutif dan berkoordinasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. SKPD atau perangkat pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) dan Wijayanti & Suryandari (2020) berkesimpulan bahwa kompleksitas pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian terdahulu masih banyak memberikan hasil yang berbeda dan tidak konsisten dengan penelitian lainnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti hendak menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Teori yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah teori *stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori *stewardship* pada pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Teori *stewardship* menggambarkan situasi bahwa pemerintah daerah sebagai steward bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan terlaksana dengan baik dan digunakan sesuai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai principal (Gatawa, 2022). Sehingga teori *stewardship* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, umur pemerintah, dan kompleksitas pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, topik sentral pada penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, dianggap penting untuk penelitian ini. Penggunaan pengukuran empat rasio keuangan dengan metode *weighted average* sebagai ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dan perbedaan model penelitian dapat menjadi orisinalitas penelitian ini. Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun 2020- 2022.

## **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

*Stewardship* adalah sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana manajemen sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik atau principal (Gatawa, 2022). Teori *stewardship* dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991, yang mengatakan bahwa pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (*principal*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama. Teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai *principal* sedangkan keberadaan pemerintah daerah sebagai *steward*. Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi sektor publik yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya di bidang keuangan dengan baik sesuai kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahannya untuk mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai *principal*. Ketika pemerintah telah berhasil mencapai tujuan tersebut maka masyarakat akan puas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah atas pelayanan publik yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan ukuran pemerintah sebagai variabel independen. Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya daerah tersebut dengan dapat melihat total aset yang dimiliki daerah (Pratiwi & Aryani, 2017). Besarnya ukuran pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional melalui total aset yang cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran (Safitri *et al.*, 2023). Pemerintah daerah dengan aset yang besar diasumsikan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Seiring dengan bertambahnya aset yang dimiliki suatu daerah juga besar



tuntutan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan hasil penelitian Safitri *et al.* (2023) dan Zamzami & Rakhman (2023) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>1</sub>: Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk suatu wilayah akan memengaruhi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik (Dewata *et al.*, 2018). Jumlah penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat yang tentunya akan menjadi tambahan pendapatan bagi daerah. Masyarakat dapat lebih memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan lainnya yang dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal serta mendukung terciptanya kinerja keuangan daerah yang baik. Didukung dengan hasil penelitian Rofiq & Arza (2021) dan Dewata *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>2</sub>: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Umur pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa lama pemerintah daerah tersebut berlangsung sejak didirikan (Alfi & Sari, 2023). Umur pemerintah menunjukkan tahun didirikannya suatu kabupaten atau kota yang ditetapkan melalui undang-undang tentang pembentukan daerah. Semakin lama pembentukan suatu pemerintah daerah berarti pemerintahan daerah tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dalam mengelola daerahnya yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Rofiq & Arza, 2021). Pengalaman yang dimaksud adalah pemerintah daerah dalam menjalankan sistem administratifnya yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses administratif tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Peningkatan pendapatan daerah tersebut dapat mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Didukung dengan hasil penelitian Alfi & Sari (2023) dan Kramaric & Miletic (2022) yang menyatakan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>3</sub>: Umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

Kompleksitas pemerintah merupakan tingkatan diferensiasi yang ada pada pemerintah daerah yang menyebabkan konflik atau masalah dalam rangka pencapaian tujuan (Saputro & Mahmud, 2015). Kompleksitas pemerintah menggambarkan kondisi berbagai faktor yang memengaruhi tata kelola pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat digunakan sebagai cerminan tingkat diferensiasi di Indonesia. Jumlah SKPD menggambarkan banyaknya urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Jumlah SKPD yang banyak dalam suatu pemerintah daerah akan semakin kompleks dan sulit saat berkoordinasi antar SKPD lainnya yang menyebabkan potensi pencatatan



laporan keuangan tidak akurat. Pemerintah daerah dengan tingkat kompleksitas yang tinggi akan mempunyai jumlah dan jenis transaksi yang lebih signifikan. Semakin besar jumlah SKPD yang dimiliki, semakin kompleksnya pemerintahan yang dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah karena dihadapkan oleh berbagai tindak kecurangan dan penyelewengan keuangan (Wijayanti & Suryandari, 2020). Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang lebih besar untuk setiap divisi yang berbeda sehingga akan menyulitkan ketika akan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi yang berbeda.

**H<sub>4</sub>: Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.**

### Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari data keuangan dan non-keuangan. Data keuangan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI dan data non-keuangan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan website resmi masing-masing pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.542 pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun anggaran 2020-2022. Ukuran sampel ditentukan menggunakan tabel *Isaac* dan *Michael* dengan tingkat kesalahan 10. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang menghasilkan 240 data sampel.

Tabel 4. 3 Definsi Operasional

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	KK	$KK = (RK \times 25\%) + (RN \times 25\%) + (RF \times 25\%) + (RE \times 25\%)$ Keterangan :	

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
		KK = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah RK = Rasio Kemandirian RN = Rasio Ekonomi RF = Rasio Efektivitas RE = Rasio Efisiensi Pembobotan rata-rata tertimbang ( <i>weighted average</i> ) pada masing-masing perhitungan rasio keuangan sebesar 25%.	(Mega & Saring, 2022)
Ukuran Pemerintah	UKP	Ukuran Pemerintah = Logaritma Total Aset	(Rofiq & Arza, 2021)
Jumlah Penduduk	PEND	Jumlah Penduduk = Total Penduduk berdasar	(Priyono <i>et al.</i> , 2018)
Umur Pemerintah	UMP	Umur Pemerintah = $\sum$ Tahun Pengesahan berdasarkan UU - Tahun Pengamatan	(Dewata <i>et al.</i> , 2018)
Kompleksitas Pemerintah	KP	Kompleksitas Pemerintah = Jumlah SKPD	(Wijayanti & Suryandari, 2020)

## Hasil

Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk setiap variabel dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah, umur pemerintah, dan kompleksitas pemerintah mempunyai nilai mean lebih besar dari standar deviasi ( $Y = 0.75 > 0.05$  ;  $UKP = 28.91 > 0.74$ ;  $UMP = 52.30 > 22.35$  ;  $KP = 45.50 > 10.27$ ) dapat disimpulkan bahwa data tersebar secara merata dan mempunyai simpangan data yang cukup baik. Sedangkan untuk variabel jumlah penduduk memiliki nilai mean lebih rendah dari standar deviasi ( $PEND = 677742.6 < 695012.9$  artinya data tidak tersebar secara merata dan mempunyai simpangan data yang kurang baik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan uji *Skewness and Kurtosis tests for normality* menunjukkan hasil yang baik yaitu nilai probabilitas  $0.87 > 0.05$  lebih kecil dari nilai signifikansi. Selanjutnya, uji multikolinieritas dengan nilai *tolerance* menunjukkan nilai yang lebih dari 0.10 dan perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF)

lebih kecil dari 10 dengan nilai *tolerance* (UKP = 0.51; PEND = 0.40; UMP = 0.84; KP = 0.64) dan  $VIF < 10$  (UKP = 1.96; PEND = 1.2.50; UMP = 1.18; KP = 1.57). Sedangkan uji heteroskedastisitas dengan uji *White* menunjukkan nilai  $Prob > chi^2$  sebesar 0.24 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 artinya data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari penyimpangan dan memenuhi uji asumsi klasik. Koefisien determinasi menunjukkan nilai 0.38 yang memiliki arti bahwa model penelitian ini mampu menjelaskan 38% variabel independen yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan 62% lainnya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Hasil pengujian hipotesis dengan signifikansi ( $\alpha=5\%$ ) disajikan pada tabel 2. Penentuan model estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa hasil terbaik *random effect model*, yang terpilih dua kali yaitu pada uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 4. 4 Hasil Penelitian

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H1: Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: 0.04. P-Value 0.00	H1 diterima
H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: 9.03. P-Value: 0.26	H2 ditolak
H2: Umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: -0.00. P-Value: 0.42	H3 ditolak
H2: Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Koefisien: -0.00. P-Value: 0.00	H4 diterima

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Besarnya suatu ukuran pemerintah yang dilihat dari aset yang dimiliki dapat memengaruhi pelayanan publik yang diberikan serta sarana dan prasarana yang

memadai. Semakin besar total aset yang dimiliki daerah memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai pembiayaan kegiatan operasional dengan aset sendiri (Safitri *et al.*, 2023). Pemerintah daerah harus memelihara dan mengelola aset dengan optimal serta memperhatikan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Didukung oleh teori *stewardship*. Pemerintah daerah sebagai *steward* harus mengelola aset dengan optimal. Aset yang dimiliki dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sebagai *principal*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zamzami & Rakhman (2023) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Besar atau kecilnya jumlah penduduk tidak dapat memberikan pungutan yang optimal terhadap pendapatan daerah dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan dan rendahnya penghasilan masyarakat serta sebaran penduduk yang tidak merata. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak didorong oleh peningkatan kualitas hidup menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah serta tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori *stewardship* belum mampu mengatasi permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui jumlah penduduk. Asumsi pada teori *stewardship* yakni terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, peningkatan penduduk di suatu daerah tidak menjamin bahwa masyarakat taat dan patuh terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Masyarakat sebagai *principal* tidak mampu dalam memberikan sumber daya yang maksimal kepada pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nashiruddin & Witono (2024) dan Saldi *et al.* (2021) menyatakan bahwa jumlah



penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebagai cerminan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Umur Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak. Umur pemerintah yang sudah lama berdiri atau baru pemekaran tidak menjamin bahwa daerah tersebut lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah yang sudah lama berdiri belum tentu dapat dikatakan lebih mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan dengan daerah yang baru pemekaran. Oleh karena itu, umur pemerintah daerah tidak dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori *stewardship* belum mampu mengatasi permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui umur pemerintah. Umur administratif pemerintah daerah tersebut tidak mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran steward dengan lebih meyakinkan masyarakat bahwa daerah tersebut telah cukup berpengalaman, sehingga masyarakat sebagai principal tidak mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima. Kompleksitas pemerintah merupakan tingkat diferensiasi yang ada dalam pemerintahan baik di internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi pemerintah daerah yang dicerminkan oleh jumlah SKPD. Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki maka semakin kompleks pula pemerintahannya dan dapat mendorong terjadinya penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kompleksitas yang tinggi dihadapkan dengan tantangan yang besar terhadap tindak

penyelewengan dan kecurangan keuangan seperti penyalahgunaan kas dan persediaan yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020). Organisasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi akan menghadapi kesulitan ketika akan melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi dalam pemerintah daerah yang sangat berbeda. Didukung oleh teori *stewardship*. Jumlah SKPD sebagai pemerintah daerah (*steward*) telah memberikan sumber daya dalam mengelola aset daerah. Jumlah SKPD yang kecil dan tidak terlalu besar dapat memudahkan dalam koordinasi antar divisi yang berbeda dalam pemerintah daerah. Kemudahan tersebut menimbulkan keakuratan dalam proses administrasi dan pencatatan laporan keuangan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, umur pemerintah, dan kompleksitas pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka disimpulkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan. Jumlah penduduk dan umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menyarankan supaya pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pengelolaan aset secara efisien dan efektif serta melakukan pemeliharaan aset secara berkala untuk dapat memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga harus lebih mengefisiensikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengelola keuangan. Jumlah SKPD yang kecil atau cukup dalam suatu pemerintah daerah diharapkan dapat lebih baik dalam mengelola APBD.

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memperluas penggunaan variabel independen lainnya yang diduga dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kinerja



keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan nilai adjusted r<sup>2</sup> pada penelitian ini masih kecil yaitu 36 persen, artinya masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih signifikan yang memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengujian empiris selanjutnya dapat menggunakan perspektif teori dan metode riset yang berbeda sehingga dapat memberikan representasi terkait kinerja keuangan pemerintah daerah lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Alfi, M., & Sari, V. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 584–598.
- Bulo, Y. (2020). Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kota Bontang. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1, 1–14. <https://doi.org/10.29264/jiam.v4i3.5029>
- Chrisman, J. (2019). Stewardship Theory: Realism, Relevance, and Family Firm Governance. *Entrepreneurship: Theory and Practice*, 43(6), 1051–1066. <https://doi.org/10.1177/1042258719838472>
- Dewata, E., Jauhari, H., Aprianti, S., & Hijria, E. (2018). The Effects of Local Government Characteristics and Audit Opinion on The Performance of District and City Governments in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 151–162. <https://doi.org/10.24815/jdab.v5i2.9057>
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445–255. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Gatawa, G. (2022). Financial Stewardship of Cooperatives. *Advance: Social Sciences and Humanities*, 1–9. <https://doi.org/10.31124/advance.19350134.v1>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS. Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang.

- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147-155. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i2.4176>
- Masdiantini, P., & Erawati. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150-1182.
- Mega, M., & Saring, S. (2022). Factors Affecting The Financial Performance of Local Government An-Tecedents in Indonesia. *International Business and Accounting Research Journal*, 6(1), 15-23. <https://doi.org/10.35474/ibarj.v6i1.231>
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3837691>
- Noviyanti, A., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Nugroho, T., & Prasetyo, N. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27-34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2005). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=460>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Ramadana, S., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831-1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Rofiq, I., & Arza, F. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 705-719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2023). The Effect of PAD, Capital Expenditures, Government Size, and Budget Changes on

- Regional Financial Performance (in Central Java Province in 2019-2021). *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 10(4), 201–208. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v10i4.63>
- Sari, I. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 3(1), 679–692.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2014). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*.
- Susanto, E., & Murtini, H. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–9. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9110>
- Tani, S., Amaliah, T., & Usman. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 239–249. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.4358>
- Wahyudin, A. (2015). *Metodologi Penelitian Penelitian Bisnis & Pendidikan*.
- Widodo, S. (2022). Financial Performance of City/Municipality Government Before and After Balance Transfer Fund Allocation. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(1), 38–55. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.118>
- Wijayanti, & Murtini, H. (2015). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Empat Siklus Penganggaran. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7865>
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v9i1.22483>
- Zain, W. (2016). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. *Jurnal UNM*, 1(12), 13.
- Zamzami, F., & Rakhman, F. (2023). Determinants of Local Government Financial Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 332–347. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0148>

# BAB V

## DETERMINANTS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF BLUD REGIONAL PUBLIC HOSPITALS

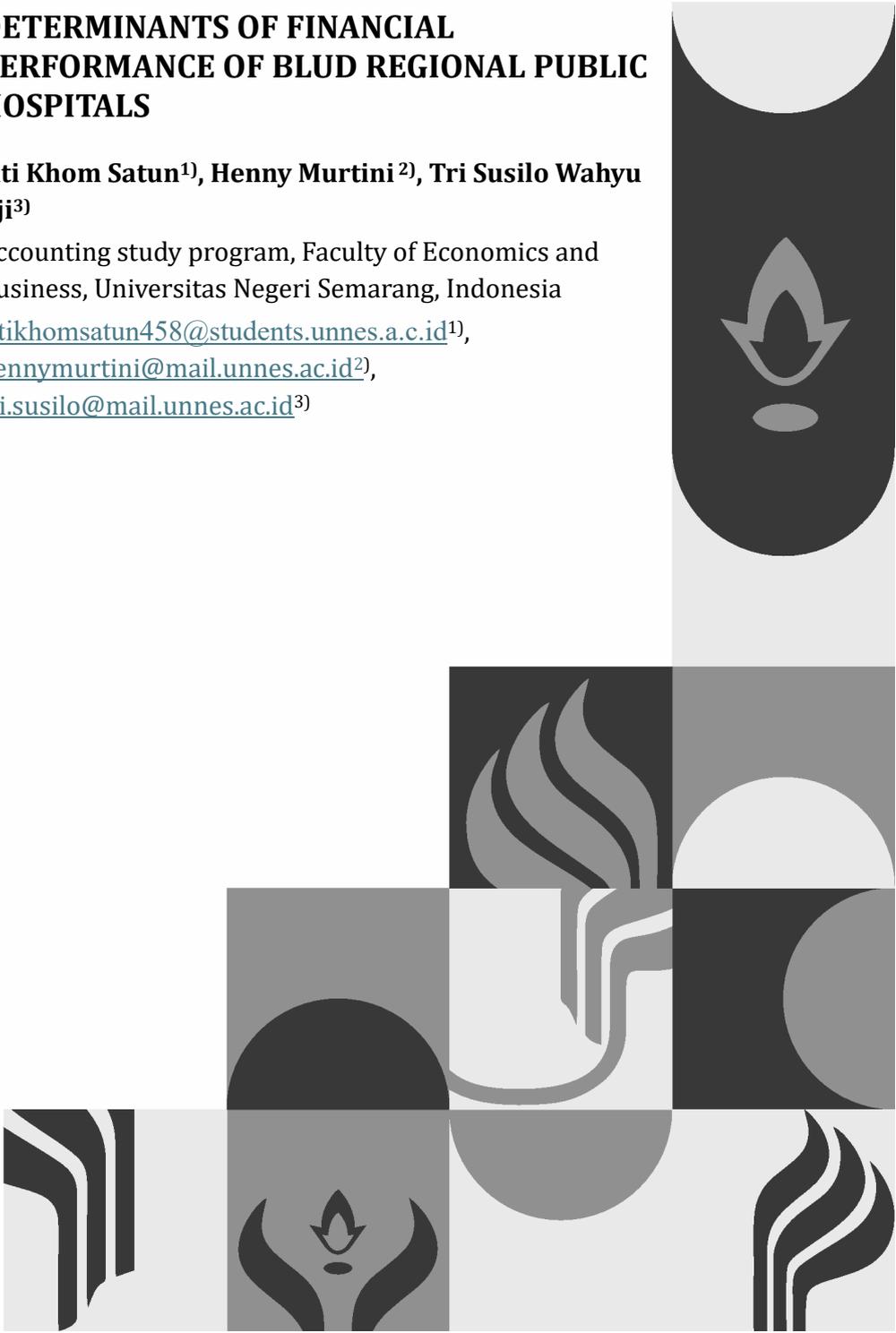
**Siti Khom Satun<sup>1)</sup>, Henny Murtini<sup>2)</sup>, Tri Susilo Wahyu Aji<sup>3)</sup>**

Accounting study program, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[sitikhomsatun458@students.unnes.ac.id](mailto:sitikhomsatun458@students.unnes.ac.id)<sup>1)</sup>,

[hennymurtini@mail.unnes.ac.id](mailto:hennymurtini@mail.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>,

[tri.susilo@mail.unnes.ac.id](mailto:tri.susilo@mail.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>



**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, program jaminan kesehatan nasional, *hospital size*, dan *billing ratio*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder pada rumah sakit umum daerah yang berstatus sebagai badan layanan umum daerah pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan menggunakan software StataMP versi 17. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan program jaminan kesehatan nasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Variable *hospital size* dan *billing ratio* berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

## **Pendahuluan**

Peran rumah sakit sebagai institusi publik sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kinerja keuangan sebagai perwujudan capaian layanan rumah sakit dari target atau rencana rumah sakit dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan melalui indikator keuangan. Penilaian kinerja keuangan penting bagi rumah sakit karena dapat mencerminkan kemampuan rumah sakit dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (Meitasari & Budiasih, 2016).

Rumah sakit pemerintah daerah merupakan satuan kerja pemerintah yang fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit umum daerah (RSUD) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai ketergantungan yang besar pada pemerintah terutama dalam sumber pendanaan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan operasional. Bentuk tanggung jawab dari diberikannya sumber dana adalah rumah sakit terus meningkatkan kinerja keuangannya. Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu rumah sakit (Agustin et al., 2023).

Rumah sakit umum daerah menjadi salah satu wadah pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian kinerja keuangan

dapat dilakukan oleh pemerintah daerah selaku prinsipal yang memberikan wewenang kepada rumah sakit (*steward*) untuk mengelola anggaran yang telah diberikan untuk kegiatan operasional dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan rumah sakit. Imbal balik rumah sakit dalam mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan pemerintah berupa transparansi, fleksibilitas, dan akuntabilitas mengenai kondisi keuangan (Chayatin, 2022).

Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu badan publik dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai sasaran, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program untuk jangka waktu tertentu. Penilaian kinerja keuangan bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai aliran dana, penggunaan dana, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini penting dilakukan agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal serta sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan dimasa yang mendatang (Heriasman et al., 2022).

Kinerja keuangan diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas (Wijayanti & Sriyanto, 2015). Semakin bagus kinerja keuangan menandakan bahwa rumah sakit tersebut sudah mampu mengelola keuangannya dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan tujuan utamanya. Rumah sakit menganalisis anggaran pengeluaran kesehatan berupa biaya perawatan pasien, pembelian peralatan medis, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan medis lainnya serta melakukan pengendalian terhadap anggaran pengeluaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada pasien (Sukmawati & Susilo, 2023).

Kinerja keuangan rumah sakit juga ditentukan oleh kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan, seperti program asuransi kesehatan dan sistem layanan kesehatan. Dengan adanya kebijakan dan regulasi tersebut, rumah sakit perlu menganalisis kembali pengelolaan keuangannya. Rumah sakit berperan sebagai delegasi dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam program pelayanan kesehatan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan kepada rumah sakit



dipertanggungjawabkan dalam bentuk penerapan optimal sarana yang dimiliki demi tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas (Sulaksono & Darmansyah, 2017).

Kinerja keuangan pada sektor publik dikatakan baik apabila terjadi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas pelaksanaan anggaran (KPPN Sorong, 2019). Instalansi farmasi Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi permasalahan pada tahap perencanaan dan pengadaan obat yaitu ketidaksesuaian anatara rencana kebutuhan obat dengan realisasi pengadaan obat yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran pengadaan obat dan kemampuan penyedia obat/distributor menyediakan obat (Ta'au et al., 2020).

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) belum berjalan secara efektif dikarenakan adanya konflik kepentingan antar pelaku kebijakan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, dan Satuan Kerja (Satker) BLUD, selain itu isi dari PPK-BLUD dianggap kurang memperhatikan prinsip fleksibilitas dan kemudahan bagi BLUD. Kondisi lingkungan pemerintahan yang masih menunjukkan kuatnya kultur birokrasi dalam pengelolaan keuangan dan secara konsisten melaksanakan prosedur keuangan dengan rujukan pada peraturan yang berlaku umum bagi satuan kerja instansi pemerintah mengakibatkan implementasi PPK BLUD belum memberikan manfaat yang optimal bagi BLUD dan masyarakat (Ariyani, 2021).

Pengalokasian anggaran yang belum berjalan dengan efektif menjadi permasalahan utama dalam kinerja keuangan rumah sakit. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan anggaran yang belum berjalan secara maksimal. Anggaran kesehatan reguler pada tahun 2023 naik menjadi Rp 169,8 triliun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar Rp 130,4 triliun (Harsono, 2020). Kenaikan anggaran ini diharapkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong industri farmasi yang kuat, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer maupun rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal. Namun, pada rapat Rancangan Undang-Undang Kesehatan pada tahun 2023, alokasi anggaran kesehatan menjadi salah satu bahasan utama dari lima topik

teratas. Alokasi anggaran kesehatan dan jaminan kesehatan nasional belum berjalan dengan baik (Harsono, 2023).

Beberapa faktor seperti belanja modal, program jkn, *hospital size*, *billing ratio* yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan rumah sakit. Teori *stewardship* menyatakan bahwa para manajer tidak termotivasi untuk mencapai tujuan pribadi namun berorientasi pada hasil tujuan utama mereka, yaitu kepentingan organisasi. Dalam hal prinsipalnya adalah pemerintah daerah kota/kabupaten yang memberikan kewenangan dan pendanaan. Rumah sakit umum daerah adalah *steward* atau pelakunya dengan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada hakikatnya organisasi pemerintah didirikan dan diarahkan untuk kepentingan bersama, khususnya kesejahteraan masyarakat (Stephanus, 2018)

Lestari & Hapsari (2020) menyatakan bahwa penyelenggaraan dan alokasi belanja modal yang baik dan aplikatif diharapkan akan menghasilkan infrastruktur yang baik serta efektivitas di berbagai sektor, sehingga berdampak pada produktivitas masyarakat yang tinggi dan tercapainya tujuan rumah sakit yakni kesejahteraan masyarakat. Penelitian Zamzami & Rakhman (2023) memberikan hasil berbeda bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, bahwa belanja modal selalu menjadi permasalahan yang sering dikaitkan dengan praktik kecurangan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Proyek belanja modal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh manfaat ekonomi misalnya pembangunan rumah sakit.

Wijayani (2018) menyatakan pendapatan dari terciptanya program jaminan kesehatan nasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Program jaminan kesehatan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memudahkan pelayanan kesehatan sehingga jumlah kunjungan di rumah sakit kementerian kesehatan semakin meningkat. Hasil tersebut bertentangan dengan Sholeh (2022) yang menyatakan bahwa program jaminan kesehatan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Program ini memang tidak menjamin peningkatan pendapatan di rumah sakit meskipun terdapat kenaikan jumlah kunjungan pasien.



Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah *hospital size*. Magdalena et al. (2017) memberikan hasil yang serupa, *firm size* yang diukur dengan jumlah karyawan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, jumlah karyawan dapat diartikan sebagai sumber daya manusia yang merupakan salah satu aset penting dari suatu perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Miszczyńska & Miszczyński (2021), yang menyatakan bahwa *firm size* berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. *Firm size* yang diukur dari besar kecilnya total aset yang dimiliki tidak dapat menaikkan kinerja keuangan, sistem pengelolaan keuangan yang masih lemah menjadi permasalahan utama dalam hal ini.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan rumah sakit adalah *billing rasio*. Rhomadhona & Ismunawan (2022) memberikan hasil yang menyatakan rasio penagihan berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Sistem kerja yang dibangun oleh perusahaan dalam bentuk piutang kecil menunjukkan bahwa sistem penagihan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Hutapea & Septriawan (2022) memberikan hasil yang berbeda bahwa rasio penagihan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Lemahnya kebijakan perusahaan dalam melakukan penagihan piutang berdampak pada penurunan kinerja keuangan. Sebaiknya piutang dikendalikan dan dikelola dengan sebaik mungkin untuk mengatasi dampak piutang tak tertagih pada perusahaan (Tanuma, 2020).

### **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Belanja modal didefinisikan sebagai Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli aset atau meningkatkan nilai aset tetap untuk memberi manfaat pada beberapa periode akuntansi dan melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah ditunjukkan dengan realisasi belanja modal. Definisi ini dikembangkan dari penelitian (Ati et al., 2023). Belanja modal dapat dikatakan berhasil jika belanja modal tepat mutu, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, sasaran yang tepat, dan harga yang tepat (Riadi,

2020). Belanja modal dikeluarkan untuk fasilitas rumah sakit, baik berupa pengadaan maupun pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang tersinkronisasi dapat membantu operasional rumah sakit agar berjalan lebih lancar dan maksimal serta menjadi rujukan pengobatan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mengelola anggaran belanja modalnya dengan baik. Penjelasan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Lestari et al., (2021), dan Priya et al. (2019), yang menyimpulkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, pengalokasian dan pengelolaan yang baik dapat menciptakan infrastruktur yang menunjang sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Zamzami & Rakhman (2023) memberikan hasil yang sebaliknya, sehingga ditetapkan hipotesis 1 sebagai berikut:

### **H1. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLUD Rumah Sakit**

Teori *stewardship* menyatakan setiap pimpinan tidak memiliki motivasi untuk tujuan pribadi, namun hanya untuk tujuan bersama. Pelayanan yang unggul menjadi tujuan utama dari pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh rumah sakit melalui program kesehatan. Rumah Sakit menjalankan perannya bekerja sama dengan BPJS untuk melaksanakan program JKN secara bertanggung jawab. Tujuan dibuatnya program JKN adalah untuk memastikan peserta mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang memenuhi kebutuhan utama kesehatannya (Wijayani, 2018).

Dampak pelaksanaan program JKN terlihat pada pemanfaatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di sebagian besar kelompok masyarakat. Pemerintah harus terus memperluas cakupan JKN, terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya untuk mengurangi biaya keuangan terkait biaya pengobatan rumah tangga yang tidak tertanggung oleh JKN, pemerintah pusat harus mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk menutupi biaya rutin non-medis sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan (Saputri & Murniati, 2023).



Upaya rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan optimal adalah berperan sebagai fasilitas kesehatan. Jaringan fasilitas kesehatan terbagi menjadi tiga kelompok utama yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan pendukung. Fasilitas kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan non spesialisistik, sedangkan fasilitas kesehatan lanjutan menyelenggarakan pelayanan spesialisistik dan subspecialistik. Fasilitas kesehatan pendukung menyelenggarakan pelayanan obat, optik, dan dukungan medis lainnya (Putri, 2014).

Penjelasan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari *et al.* (2021) dan Wijayani (2018) menyimpulkan pendapatan dari program JKN memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan, dengan adanya program JKN rumah sakit mengalami peningkatan kunjungan rawat inap yang sebagian besar merupakan peserta dari BPJS. Sejalan dengan Abdi *et al.*, (2020) kebijakan reformasi sektor kesehatan yang dijalankan pemerintah Iran dapat mengurangi total *out of pocket* yang dirasakan oleh sekelompok masyarakat subnasional. Penelitian Sholeh (2022) yang memberikan hasil bahwa program JKN berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, perbedaan pencatatan klaim atas biaya pasien antara rumah sakit dan INACBG. Selisih perbedaan pencatatan tersebut harus diakui oleh rumah sakit sebagai bentuk kerugian, sehingga ditetapkan hipotesis 2 sebagai berikut:

## **H<sub>2</sub>: Program Jaminan Kesehatan Nasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD**

Teori *stewardship* menyatakan setiap pimpinan tidak termotivasi untuk mencapai tujuan pribadi, namun hanya untuk mencapai tujuan bersama dengan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Rumah sakit ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan di bidang kesehatan oleh pemerintah daerah. Rumah sakit wajib meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi agar dapat bersaing dengan baik. Upaya menghadapi persaingan tersebut, maka rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia yang baik kinerjanya. Sumber daya manusia di rumah sakit

terdiri dari berbagai macam yaitu tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan serta tenaga non medis (Turnip & Soewondo, 2022).

Jumlah pegawai merupakan tenaga yang sangat penting dalam sebuah rumah sakit. Keberhasilan rumah sakit dalam melakukan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh penataan dan pengelolaan pegawai untuk melakukan kegiatan pokok. Jumlah pegawai yang tinggi menunjukkan rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang lebih unggul dibandingkan jumlah pegawai yang sedikit, namun sedikit banyaknya jumlah pegawai berdampak pada kenaikan atau penurunan belanja pegawai. Jumlah pegawai yang tinggi juga disebabkan oleh kenaikan permintaan terhadap tenaga kesehatan karena adanya pembangunan rumah sakit baru atau penambahan instansi spesialis. Jumlah pegawai yang tinggi berdampak pada kenaikan belanja pegawai, namun diiringi dengan kenaikan kinerja keuangan rumah sakit melalui kenaikan pendapatan jasa layanan. Belanja pegawai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sumber pendapatannya berasal dari pendapatan asli daerah (Wijayanti & Sriyanto, 2015).

Penjelasan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Sulaksono & Darmansyah (2017) dan Setiadi (2021) bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hamzah & Nurhayati (2014) rumah sakit yang memiliki ukuran besar maka dimungkinkan untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan bisnis dan memudahkan dalam memberikan layanan masyarakat yang sesuai. Penelitian Sari *et al.* (2020) dan Miszczyńska & Miszczyński (2021) yang memberikan hasil berkebalikan bahwa *firm size* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Isbanah (2015) semakin besar ukuran rumah sakit, semakin rendah kinerja keuangan karena belum didukung dengan pengelolaan yang bagus, sehingga ditetapkan hipotesis 3 sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Hospital Size berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD**

Teori *stewardship* menyatakan setiap manajer tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan pribadi, namun hanya untuk tujuan bersama. Rumah sakit



sebagai pelaksana dalam pelayanan kesehatan bertugas untuk menstabilkan pendapatan dengan segera menagih piutang yang dimiliki. Piutang digunakan rumah sakit untuk membiayai operasionalnya, sehingga semua pelayanan bisa berjalan dengan lancar. Manajer rumah sakit harus membuat kebijakan yang sesuai dan tepat agar semua piutang segera terpulihkan. Besar jumlah piutang yang dapat terpulihkan berdampak pada kinerja keuangan melalui pendapatan rumah sakit, semakin besar jumlah piutang yang terpulihkan maka rumah sakit dapat membiayai operasionalnya tanpa melakukan pinjaman kepada pihak lain. Begitu juga sebaliknya semakin kecil jumlah piutang yang terpulihkan dapat menyebabkan terhambatnya pembiayaan operasional rumah sakit.

Rumah sakit bekerjasama dengan banyak pihak dan terbentuklah transaksi piutang, terutama dengan pihak BPJS. Semakin banyak mitra kerjasama, maka akan semakin banyak kemungkinan terjadinya transaksi piutang, sehingga diperlukan manajemen piutang. Manajemen piutang rumah sakit merupakan bagian yang penting dari sistem keuangan kesehatan. Penerapan kebijakan yang tepat dengan menggunakan teknologi yang memadai menjadi strategi agar rumah sakit dapat memastikan keberlanjutan keuangannya. Manajemen piutang yang kuat dan tepat juga akan meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat (kms.kemkes, 2023).

Penjelasan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rhomadhona & Ismunawan (2022) dan Ilmayani & Lau (2020) bahwa rasio penagihan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dengan adanya pengelolaan yang baik piutang dapat tertagih secara lancar. Penelitian Hutapea & Septriawan (2022) dan Tanuma (2020) yang memberikan hasil yang berkebalikan, rasio penagihan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Kenaikan rasio penagihan menunjukkan kinerja keuangan rumah sakit yang menurun dengan adanya kemacetan perputaran piutang, sehingga ditetapkan hipotesis 4 sebagai berikut:

#### **H<sub>4</sub>: *Billing Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD**

##### **Metode**

Populasi dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah di Jawa-Bali pada tahun 2021-2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: (1) RSUD yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); (2) RSUD menyampaikan laporan keuangan tahun anggaran berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022; dan (3) RSUD memiliki data lengkap terkait variabel penelitian yaitu belanja modal, program jaminan kesehatan nasional, *hospital size*, dan *billing ratio*.

##### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan hasil dari kegiatan atas program yang telah dijalankan rumah sakit dalam mengelola alokasi sumber daya dan penggunaan anggaran untuk kegiatan otonomi wilayahnya dalam periode tertentu. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Halim & Hanafi (2018). Indikator dalam penilaian kinerja keuangan sebagai berikut:

Rasio kemandirian diartikan sebagai rasio yang menilai independensi rumah sakit dalam konteks membiayai pembangunan, pelayanan masyarakat, dan urusan rumah sakit lainnya yang menunjukkan perbandingan pendapatan jasa dibagi dengan pendapatan dari subsidi pusat, subsidi provinsi dan pinjaman. Definisi ini dikembangkan dari definisi Siswanto *et al.*, (2020). Rasio kemandirian diukur dengan perbandingan pendapatan dengan subsidi ditambah provinsi plus pinjaman:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan jasa}}{\text{Subsidi pusat dan provinsi} + \text{pinjaman}}$$

Rasio ekonomis digunakan untuk mengukur tingkat penghematan belanja yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, diukur dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang



dianggarkan. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Polii *et al.*, (2020). Semakin besar realisasi ekonomis menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk (Hartati, 2020). Rasio ekonomis diukur dengan membandingkan realisasi pengeluaran terhadap anggaran pengeluaran:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}}$$

Rasio aktivitas merupakan kemampuan daerah untuk merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang ditentukan dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan daerah. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Ati *et al.*, (2023). Semakin besar realisasi aktivitas menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk (Hartati, 2020). Rasio aktivitas diukur dengan perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan:

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}}$$

Rasio efisiensi merupakan pengukur kontribusi sektor publik terhadap *outputnya* yang ditunjukkan dengan perbandingan realisasi biaya terhadap realisasi pendapatan. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Ati *et al.*, (2023). Semakin banyak jumlah pengeluaran yang mendekati jumlah pendapatan maka menunjukkan kinerja keuangan yang baik, karena rumah sakit telah menjalankan semua program yang dianggarkan melalui realisasi pendapatan (Masdiantini & Erawati, 2016). Rasio efisiensi diukur dengan perbandingan realisasi pengeluaran terhadap realisasi pendapatan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}}$$

Empat rasio keuangan rumah sakit digunakan sebagai proksi kinerja keuangan dalam penelitian ini, sehingga diperlukan satu data atas variabel dependen untuk kepentingan pengujian model regresi data panel. Oleh sebab itu, dilakukan analisis faktor dengan menggunakan metode *principal components* sehingga dihasilkan skor faktor yang kemudian menjadi data variabel dependen yaitu kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD. Untuk menguji model analisis faktor

berdasarkan korelasi antara rasio digunakan KMO MSA atau *Kaiser-Meyer Olkin Measure Of Sampling Adequacy* (Ghozali, 2013). Hasil uji analisis menunjukkan dari empat rasio dapat digunakan sebagai pengukuran. Hasil uji analisis validitas faktor dengan StataMP versi 17 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. 9 Hasil KMO

Variabel	KMO	Presentase
Rasio Mandiri	0,5193	25%
Rasio Efektivitas	0,5213	25%
Rasio Efisiensi	0,5101	25%
Rasio Ekonomis	0,5101	25%
Overall	0,5153	100%

Sumber: data diolah, 2024

Masdiantini & Erawati (2016), penentuan besarnya kinerja keuangan dengan nilai skor faktor melalui *principal component* yaitu dari hasil penelitian ini sebesar 25%.

#### Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli aset atau meningkatkan nilai aset tetap untuk memberi manfaat pada beberapa periode akuntansi dan melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah ditunjukkan dengan realisasi belanja modal. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Ati *et al.*, (2023). Variabel belanja modal diukur dengan *logaritma natural* realisasi belanja modal sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln realisasi belanja modal}$$

#### Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program jaminan kesehatan nasional merupakan program perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan pasien JKN. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Wijayani (2018). Variabel Program Jaminan Kesehatan Nasional diukur dengan *logaritma natural* pendapatan pasien JKN sebagai berikut:

*Program JKN = Ln pendapatan kunjungan pasien JKN*

*Hospital size*

*Hospital size* merupakan gambaran mengenai besar kecilnya rumah sakit yang ditunjukkan oleh realisasi total pegawai yang dimiliki. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Sari *et al.*, (2020). Variabel *Hospital Size* diukur dengan *logaritma natural* jumlah pegawai sebagai berikut:

$$Hospital\ Size = Ln\ jumlah\ karyawan$$

*Billing Ratio*

*Billing ratio* adalah rasio penyelesaian umumnya yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak piutang yang dapat dikumpulkan berdasarkan total piutang dengan membandingkan jumlah piutang yang tertagih terhadap total piutang. Definisi ini dikembangkan dari penelitian Rhomadhona & Ismunawan (2022). variabel *billing ratio* diukur dengan membandingkan jumlah piutang tertagih dengan total piutang sebagai berikut:

$$Billing\ ratio = \frac{jumlah\ piutang\ yang\ tertagih}{total\ piutang} 100\%$$

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Data yang diperoleh merupakan data sekunder penerbitan laporan keuangan rumah sakit umum daerah yang berstatus sebagai badan layanan umum daerah tahun 2021-2022 di Jawa-Bali. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier data panel dan uji asumsi kalsik dengan menggunakan StataMP versi 17. Regresi dalam penelitian ini ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Tabel 5. 10 Operasional Variabel

Variabel	Singkatan	Pengukuran	Singkatan
Kinerja Keuangan	Y	$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan jasa}}{\text{subsidi pusat} + \text{provinsi} + \text{pinjaman}} \\ \text{Rasio Ekonomis} &= \frac{\text{realisasi pengeluaran}}{\text{anggaran pengeluaran}} \end{aligned}$	Masdianti & Erawati (2016)

Variabel	Singkatan	Pengukuran	Singkatan
		$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}}$ $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi pengeluaran}}{\text{realisasi pendapatan}}$ Analisis faktor dengan skor 25%.	
Belanja Modal	BM	$\text{Belanja Modal} = \text{LN realisasi belanja modal}$	Ati et al. (2023)
Program Jaminan Kesehatan Nasional	JKN	$\text{Program JKN} = \text{LN pendapatan kunjungan pasien}$	Ati et al. (2023)
Hospital Size (X4)	HS	$\text{Hospital Size} = \text{LN jumlah pegawai}$	Magdalena et al. (2017)
Billing Ratio (X5)	BR	$\text{Billing Ratio} = \frac{\text{piutang tak tertagih}}{\text{total piutang}} \times 100\%$	Hutapea & Septriawan (2022)

## Hasil

Tabel 5. 11 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja					
Keuangan	43	0	4.36	1.75	0.928
Belanja Modal	43	0	27.53	20.97	8.382
Program JKN	43	0	25.47	18.64	9.250
Hospital Size	43	0	8.69	5.21	2.814
Billing Ratio	43	0	0.81	0.140	0.202

(Sumber: Data sekunder diolah, 2024)

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran data dengan memeriksa *mean*, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Berikut disajikan tabel data statistik deskriptif seluruh variabel penelitian. Nilai *mean* kinerja keuangan sebesar 1,751 dan nilai standar deviasi sebesar 0,928. Nilai sebesar 1,751 diartikan bahwa kinerja keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit adalah

17,51% yang masih tergolong rendah Kinerja keuangan memiliki nilai *mean* sebesar 1,75 yang menunjukkan kategori sedang, sehingga faktor-faktor yang dapat menaikkan kinerja keuangan perlu ditingkatkan kembali.

Belanja modal memiliki nilai *mean* sebesar 20,97 menunjukkan kategori sangat tinggi bahwa rumah sakit umum daerah telah merealisasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional memiliki nilai *mean* sebesar 18,64 menunjukkan kategori tinggi yang artinya rumah sakit telah menjalankan program JKN sesuai kewajibannya dan harus ditingkatkan kembali. *Hospital size* memiliki nilai *mean* sebesar 5,21 menunjukkan kategori sedang, yang artinya jumlah karyawan dapat mencerminkan *hospital size* cenderung rendah. *Billing ratio* memiliki nilai *mean* yang lebih kecil dari standar deviasi yaitu 0,14 terhadap 0,20. Nilai *mean* sebesar 0,14 menunjukkan kategori rendah, sehingga rumah sakit umum daerah perlu melakukan peningkatan piutang yang tertagih melalui frekuensi penagihan.

Tabel 5. 12 Hasil Uji Normalitas

Variable	Obs	W	V	Z	Prob>z
r	43	0,95016	2,083	1,551	0,06042

(Sumber: Data sekunder diolah, 2024)

Uji normalitas dari penelitian ini menggunakan uji *Shapiro-Wilk test* digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data dikatakan normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 (*probability value* > 0,05). Gambar di bawah menunjukkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal yang dibuktikan dengan *prob* sebesar 0,06042 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 5. 13 Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	VIF	1/VIF
Belanja Modal	1,45	0,70
Program JKN	1,73	0,58
<i>Hospital Size</i>	1,41	0,70
<i>Billing Ratio</i>	1,12	0,90

(Sumber: Data sekunder diolah, 2024)

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan korelasi bivariat, yaitu jika nilai korelasi menunjukkan angka kurang dari 0,10 (<0,10), maka variabel yang dicari tidak bermasalah. Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan seluruh variabel penelitian pada masing-masing model koefisien regresi semuanya unggul pada level 0,10 dan nilai koefisien semuanya kurang dari 10, artinya bahwa model regresi data panel pada penelitian ini tidak mempunyai permasalahan multikolinearitas dan uji asumsi klasik selanjutnya dapat dilaksanakan.

Tabel 5. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

$$\text{chi2}(14) = 10.31$$

$$\text{Prob} > \text{chi2} = 0.7388$$

Caameron & Trivedi's decomposition of IM-test

Source	chi2	df	P
Heteroskedasticity	10,31	14	0,7388
Skewness	6,72	4	0,1512
Kurtosis	0,50	1	0,4788
Total	17,54	19	0,5533

Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji White yaitu jika nilai Prob. menunjukkan angka diatas 0,05 (<0,05), maka variabel penelitian tidak mempunyai masalah heteroskedastisitas. Nilai Prob>chi2 sebesar 0,74 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian mempunyai nilai Prob. di atas 0,05 maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti model regresi data panel dalam penelitian ini tidak mempunyai masalah heteroskedastisitas.

Nilai *adjusted R-Squared* sebesar 0,447 atau 44,7 persen disajikan pada Tabel 6. Artinya kapasitas variabel belanja modal, program jaminan kesehatan nasional, *hospital size*, dan *billing ratio* mampu menjelaskan variabel kinerja keuangan sebesar 44,7%. Sedangkan 55,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai F sebesar 8,97 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,005), maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen (belanja modal, program jaminan kesehatan nasional, *hospital size*, dan *billing ratio*) dengan model regresi umum yang mempengaruhi variabel terikat khususnya kinerja keuangan. Tabel 6 menunjukan uji-t statistik dan kesimpulan hipotesis.

Tabel 5. 15 Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.
_Konstanta	1.035	3.34	0.001
Belanja Modal	0.055	3.58	0.000
Program JKN	0.037	2.47	0.013
<i>Hospital Size</i>	-1.185	-4.14	0.000
<i>Billing Ratio</i>	-1.135	-2.04	0.041
F-hitung	8.97		
Sig. F	0.000		
<i>Adjusted R Square</i>	0.447		

(Sumber: Data sekunder diolah, 2024)

Nilai konstanta sebesar 1,305 artinya apabila variabel belanja modal, program jkn, *hospital size* dan *billing ratio* bernilai 0 atau konstan, maka nilai variabel kinerja keuangan adalah sebesar 1,305. Variabel belanja modal (BM) memiliki koefisien regresi sebesar 0,055 dan menunjukkan arah positif yang artinya, apabila terjadi peningkatan 1 satuan belanja modal (BM) akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan (KK) sebesar 0,055 dan dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. Variabel jaminan kesehatan nasional (JKN) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,037 dan menunjukkan arah positif, artinya jika variabel program jaminan kesehatan nasional terjadi peningkatan 1 satuan maka akan menaikkan kinerja keuangan sebesar 0,037 dan diasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Variabel *hospital size* (HS) memiliki koefisien regresi sebesar -1,185 dan menunjukkan arah negatif yang artinya, apabila terjadi peningkatan 1 satuan *hospital size* (HS) akan menyebabkan penurunan sebesar -1,185 dan dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. Variabel *billing ratio* (RP) mempunyai nilai koefisien sebesar -1,135 dan menunjukkan arah negatif, artinya jika rasio penagihan meningkat sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar -1,135 dan diasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD

Besarnya realisasi belanja modal yang dimiliki rumah sakit digunakan untuk biaya pemeliharaan dan pembelian peralatan untuk membangun

infrastruktur rumah sakit. Ketersediaan peralatan yang memadai dapat menunjang infrastruktur rumah sakit menjadi dan sumber utama rujukan pengobatan, sekaligus menunjukkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal (Sulaksono & Darmansyah, 2017). Selain itu, peningkatan infratraktur fasilitas rumah sakti akan menghasilkan tingkat layanan yang lebih stabil (Zamzami & Rakhman, 2023). Hasil penelitian ini konsisten dengan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. Teori *stewadrship* menjelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan pribadi namun oleh tujuan hasil utama mereka, yang dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Tingginya realisasi belanja modal menandakan rumah sakit telah melaksanakan semua program yang dianggarkan melalui belanja modal. Rumah sakit terus berupaya untuk memiliki infrastruktur yang tersedia dan lengkap untuk mendukung pelayanan medis. Hasil penelitian ini mendukung Lestari & Hapsari (2020) dan Burhan *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berdampak positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD

Pendapatan yang diterima rumah sakit digunakan untuk menutup biaya operasional rumah sakit sehari-hari. Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan suatu bentuk pendapatan yang diterima rumah sakit yang berkaitan langsung dengan pemerintah karena merupakan salah satu program kesehatan masyarakat. Sumber pendapatan rumah sakit antara lain anggaran APBD, transfer pemerintah (pusat dan provinsi), pinjaman, pendapatan pelayanan pasien umum, pendapatan kemitraaan, pendapatan investasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang tinggi melalui program jaminan kesehatan dapat meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit. Hasil penelitian ini serupa dengan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis yang dikembangkan pada tahun 1991. Teori *stewadrship* menjelaskan bahwa para manajer hanya termotivasi untuk mencapai tujuan utama yaitu dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Sebelum menjadi peserta BPJS, masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan



karena faktor ekonomi (Lestari *et al.*, 2021). Melalui program jaminan kesehatan nasional ini, masyarakat mendapatkan manfaat fasilitas pelayanan kesehatan setelah menjadi peserta BPJS. Salah satu dampak positif yang paling terlihat adalah peningkatan jumlah kunjungan pasien, baik rawat inap maupun jalan melalui BPJS. Penelitian ini mendukung Wijayani 2018, yang menyatakan program JKN memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pengaruh *Hospital Size* terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD

Pegawai merupakan aset penting yang dimiliki rumah sakit. Pegawai merupakan salah satu aset penting yang dimiliki rumah sakit. Besar kecilnya suatu rumah sakit dapat diukur dari jumlah aset (jumlah pegawai) yang dimiliki rumah sakit tersebut. Pengaruh negatif *hospital size* terhadap kinerja keuangan dimungkinkan karena jumlah pegawai yang tinggi dapat meningkatkan jumlah anggaran belanja pegawai sehingga menurunkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang tinggi dapat menurunkan kinerja keuangan rumah sakit.

Bukti empiris menunjukkan bahwa RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak pada tahun 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 769 karyawan dengan realisasi beban pegawai sebesar 68.526.346.055, terjadi peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2022 menjadi 821 orang, peningkatan jumlah pegawai ini berdampak pada total beban pegawai tahun 2022 menjadi 74.086.057.130. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pegawai berarti terjadi peningkatan belanja pegawai, sehingga akan menurunkan kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada 1991. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa para manajer hanya termotivasi untuk mencapai tujuan dasarnya, yang dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya suatu rumah sakit tidak bias dianggap sebagai jaminan kinerja yang baik (Isbanah, 2015). Oleh karena itu, para pengguna laporan keuangan dapat menjadikannya sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Isbanah, 2015) dan menunjukkan

bahwa *hospital size* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD.

#### Pengaruh *Billing Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah BLUD

Penelitian ini menggunakan metode membandingkan jumlah piutang tak tertagih dengan jumlah total piutang untuk menghitung besarnya variabel *billing ratio*. Besar kecilnya jumlah piutang yang dapat dipulihkan berdampak pada arus kas penerimaan rumah sakit. Meningkatnya jumlah piutang tak tertagih menyebabkan keterlambatan penerimaan kas sehingga mengganggu status arus kas yang dialokasikan untuk biaya operasional harian rumah sakit (Hutapea & Septriawan, 2022). Selanjutnya rumah sakit harus mengendalikan dan mengelola piutang dengan sebaik-baiknya oleh pelayana administrasi atau penatusahaan agar jumlah piutang yang dapat diperoleh kembali semakin meningkat. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi namun hanya untuk tujuan utamanya yaitu kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal. Besarnya piutang yang dapat ditagih oleh suatu rumah sakit dapat dijadikan sebagai jaminan baik kinerja rumah sakit tersebut.

*Billing ratio* yang semakin tinggi menunjukkan rumah sakit belum mengelola dan mengembangkan kebijakan penagihan piutang, sehingga membuat piutang tersebut tertunggak. Kendala yang sering muncul disebabkan oleh pending klaim yang terlambat dan perbedaan tarif antara rumah sakit dengan BPJS. Penyebab pending klaim sering mengalami keterlambatan adalah berkas tidak lengkap, coding kurang tepat, kurangnya kunjungan pemeriksaan, dan kurangnya pembuktian perbaikan. Apabila klaim pertama ditolak maka dilakukan klaim lanjutan dan itu mengakibatkan tertahannya pembayaran oleh BPJS (Maulida & Djunawan, 2022). Piutang harus dikendalikan dan dikelola dengan sebaik mungkin oleh penatusahaan piutang agar perputaran piutang menjadi lebih lancar sehingga berdampak pada peningkatan angka penagihan dan kemungkinan menurunkan jumlah piutang bermasalah (Tanuma, 2020).

*Tabel 5. 16 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian*



Hipotesis	Koefisien	Sig.	Hasil
H <sub>1</sub> : Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD	0,055	0,000	Diterima
H <sub>2</sub> : Program JKN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD	0,037	0,013	Diterima
H <sub>3</sub> : <i>Hospital Size</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD	-1,185	0,000	Ditolak
H <sub>4</sub> : <i>Billing Ratio</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Rumah Sakit BLUD	-1,135	0,041	Ditolak

(Sumber: Data sekunder diolah, 2024)

## Kesimpulan

Belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Belanja modal digunakan untuk pembelian dan perbaikan peralatan rumah sakit, prasarana, dan sarana penunjang pelayanan medis. Semakin banyak program yang dilaksanakan melalui pendanaan belanja modal, semakin besar kemungkinan rumah sakit tersebut menjadi sumber utama rujukan pengobatan, sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik. Program jaminan kesehatan nasional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. *Hospital size* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Jumlah pegawai yang bertinggi berdampak pada kenaikan anggaran belanja pegawai. Jumlah pegawai yang tinggi berdampak pada meningkatnya anggaran biaya pegawai yang tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan rumah sakit. Semakin banyak jumlah karyawan maka semakin rendah kinerja keuangannya. *Billing ratio* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi *billing ratio* hal ini menandakan adanya masalah pada penagihan rumah sakit, semakin kecil *billing ratio* mempengaruhi keuntungan rumah sakit dikarenakan jumlah piutang dapat dikembalikan semakin besar.

Penelitian ini *hospital size dan billing ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan rumah sakit umum daerah BLUD. Kenaikan jumlah pegawai dapat menaikkan anggaran belanja pegawai yang tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan jasa rumah sakit serta kebijakan penagihan piutang masih belum bagus. Rumah sakit umum daerah dapat membuat manajemen penagihan piutang yang baru dan penatausahaan untuk

penagihan piutang serta meningkatkan pendapatan jasanya. Hasil penelitian ini belanja modal dan program JKN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan rumah sakit umum daerah BLUD, maka rumah sakit perlu meningkatkan realisasi semua program yang dianggarkan dengan belanja modal dan terus meningkatkan jumlah penerima dari program JKN termasuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul yaitu keterlambatan pengajuan klaim kepada BPJS.

Kontribusi variabel independen (belanja modal, pendapatan jaminan kesehatan nasional, *hospital size*, dan *billing ratio*) dalam penelitian ini menyumbangkan 44.7% pengaruh terhadap kinerja keuangan, sehingga masih banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti tindak lanjut atas rekomendasi audit yang awalnya akan digunakan dalam penelitian ini namun karena keterbatasan data yang diperoleh sehingga belum dapat digunakan. Keterbatasan yang dialami oleh peneliti adalah minimnya data yang bisa diakses melalui *website* rumah sakit umum daerah di Indonesia. Data yang bisa akses hanya di wilayah Jawa-Bali, maka peneliti selanjutnya dapat menambahkan obyek penelitian berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh Indonesia, apabila data wilayah lain telah bisa diakses pada tahun setelah penelitian ini.

## Referensi

- Abdi, Z., Hsu, J., Ahmadnezhad, E., Majdzadeh, R., & Harirchi, I. (2020). An analysis of financial protection before and after the Iranian health transformation plan. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 26(9), 1025–1033. <https://doi.org/10.26719/emhj.19.026>
- Ariyani, A. (2021). Kajian kemandirian keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(3), 311–322. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.108>
- Ati, C. S., Baidlowi, I., Ainiyah, N., & Bahril Ilmiddaviq, M. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat II di provinsi Jawa Timur periode 2018-2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(4), 110–118. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1994>



- Burhan, M., Kartini, & Darwis, S. (2022). Pengaruh kemandirian keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi (Vol. 18).
- Chayatin, N. (2022). Analisis kinerja keuangan rumah sakit umum daerah. *Journal of Universitas Airlangga*.  
[https://www.researchgate.net/publication/357808040\\_ANALISIS\\_KINERJA\\_KEUANGAN\\_RUMAH\\_SAKIT\\_UMUM\\_DAERAH](https://www.researchgate.net/publication/357808040_ANALISIS_KINERJA_KEUANGAN_RUMAH_SAKIT_UMUM_DAERAH)
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Hanafi, M. M. (2018). Analisis laporan keuangan. UPP STIM YKPN.
- Hamzah, A., & Nurhayati, N. (2014). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Harsono, F. H. (2020). Belanja COVID-19 Tak Lagi Ada, Anggaran Kesehatan 2023 Fokus di 7 Hal Ini. <https://www.liputan6.com/health/read/5044320/belanja-covid-19-tak-lagi-ada-anggaran-kesehatan-2023-fokus-di-7-hal-ini>
- Harsono, F. H. (2023). Isu Rumah Sakit Duduki Peringkat Teratas Masukan Publik Terkait RUU Kesehatan. <https://www.liputan6.com/health/read/5255232/isu-rumah-sakit-duduki-peringkat-teratas-masukan-publik-terkait-ruu-kesehatan>
- Hartati, A. (2020). Pengukuran kinerja sektor publik: teori dan aplikasi: performance measurement/pengukuran kinerja (Issue July).
- Hutapea, M. J., & Septriawan, M. R. (2022). Pengaruh piutang tak tertagih terhadap arus kas pada PT Sinar Rezeki Mas Makmur. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ilmayani, N. F., & Lau, E. A. (2020). Analisis pengendalian piutang usaha pada PT. Astra Multifinance (SPEKTRA) Samarinda. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/RJABM/article/view/4681/4526>
- Isbanah, Y. (2015). Pengaruh ESOP, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan di bursa efek Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 15(1), 28. <https://doi.org/10.17970/jrem.15.150103.id>
- kms.kemkes. (2023). Piutang Rumah Sakit. <https://kms.kemkes.go.id/pengetahuan/detail/6522bdd1037a7adc0f6821>
- KPPN Sorong. (2019). Menilik indikator kinerja keuangan sektor publik. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sorong/id/data-publikasi/berita-terbaru/2910-menilik-indikator-kinerja-keuangan-sektor-publik.html>

- Lestari, E., & Hapsari, D. W. (2020). Pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah (pad), dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten/kota di provinsi D.I Yogyakarta tahun 2013-2018).
- Lestari, W., Trisnantoro, L., & Andayani, N. L. P. E. P. (2021). Gambaran kinerja rumah sakit sebelum dan sesudah era jaminan kesehatan nasional (jkn) (Vol. 24).
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Terjadinya gejolak sosial pada tahun 1999 memunculkan lahirnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah y. 1150–1182.
- Maulida, E. S., & Djunawan, A. (2022). Analisis penyebab pending klaim berkas BPJS kesehatan pelayanan rawat inap rumah sakit universitas Airlangga. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(6), 374–379. <https://doi.org/10.14710/mkmi.21.6.374-379>
- Meitasari, I. G. A. S., & Budiasih, I. G. A. nyoman. (2016). pengaruh ukuran perusahaan, dan struktur modal loan to desifit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Miszczynska, K., & Miszczyński, P. (2021). Debt, ownership, and size: the case of hospitals in Poland. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094596>
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara berdasarkan konsep value for money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788.
- Putri, A. E. (2014). Paham JKN : Jaminan Kesehatan Nasional.
- Rhomadhona, R. R., & Ismunawan. (2022). Pengaruh receivable turnover, rasio tunggakan, rasio penagihan dan average collaction period terhadap laba perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Riadi, M. (2020, November). Belanja Modal (Pengertian, Kriteria, Jenis, dan Kebijakan). <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/belanja-modal.html>.
- Saputri, N. S., & Murniati, S. (2023). Kajian dampak bantuan iuran program jaminan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).
- Sari, T. D., Titsari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh kepemilikan manajerial, komite audit, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. *Upajiwa Dewantara*, 4.



- Setiadi, I. (2021). Pengaruh kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 4, 669–679. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Siswanto, Saptadi, S., & Bakhtiar, A. (2020). Implementation of KPKU (kriteria performa kinerja unggul) method to increase the company performance at PT. XYZ.
- Ta'au, D. K., Pareta, D. N., Kanter, J. W., & Tumbel, S. L. (2020). Evaluasi perencanaan dan pengadaan obat di instalasi farmasi dinas kesehatan daerah provinsi Sulawesi Utara. *Biofarmasetikal Tropis*, 3(2), 72–76. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i2.287>
- Tanuma, Y. (2020). Analisis Piutang tak tertagih terhadap profitabilitas pada Perusahaan CV. Anugrah Sukses. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*.
- Turnip, H., & Soewondo, P. (2022). Analisis manajemen anggaran pada rumah sakit rujukan di masa pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 124. <https://doi.org/10.7454/eki.v7i2.5993>
- Wijayani, R. W. (2018). Dampak implementasi program jaminan kesehatan nasional(JKN) terhadap kinerja keuangan rumah sakit vertikal kementerian kesehatan. In *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* (Vol. 07, Issue 03).
- Wijayanti, H. T., & Sriyanto. (2015). Evaluasi kinerja pelayanan dan keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisni & Perbankan*.

# BAB VI

## DETERMINAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

**Valentina Febria Eka Amanda<sup>1)</sup>, Henny Murtini<sup>2)</sup>,  
Ardhana Reswari Hasna Pratista<sup>3)</sup>**

Accounting study program, Faculty of Economics and  
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[febriamanda89@gmail.com](mailto:febriamanda89@gmail.com)<sup>1)</sup>,

[hennymurtini@mail.unnes.ac.id](mailto:hennymurtini@mail.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>,

[ardhanareswari@mail.unnes.ac.id](mailto:ardhanareswari@mail.unnes.ac.id)<sup>3)</sup>



**Abstrak** Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan cita-cita pemerintah dan tujuan dari otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan operasionalnya tanpa bergantung dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan empat variable independent, yakni investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan kemakmuran. Populasi dalam penelitian ini yakni pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dengan indeks kemandirian fiskal terendah. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 155 unit analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan *software* StataMP Versi 17. Variable ukuran pemerintah dan kemakmuran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variable investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dan variable jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Investasi, Ukuran Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Kemakmuran

## **Pendahuluan**

Kemandirian keuangan daerah adalah terkait cara pemerintah daerah mengelola pendapatan asli daerahnya sendiri serta mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat ataupun pinjaman yang beredar (Purnama, 2016). Kemandirian keuangan suatu daerah merupakan cita-cita pemerintah serta tujuan dari otonomi daerah, yakni adanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diterapkan karena adanya kesempatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta membiayai semua kegiatan operasional dalam pemerintahan (Sari, 2023). Adanya kemandirian keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat

mengetahui lebih dalam mengenai hal-hal ataupun kondisi daerah setempatnya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya diharapkan memegang prinsip akuntabilitas serta transparan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana pendapatan asli daerah yang baik serta bertanggungjawab. Dengan tersebut, pemerintah daerah akan mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakatnya. Adanya kesempatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam pengoptimalan penentuan aturan penarikan pajak dengan memegang prinsip tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan hanya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Factor-faktor yang memengaruhi keberhasilan otonomi daerah yakni kemampuan sumber daya manusia yang meliputi aparatur pemerintah maupun masyarakat, sumber daya alam, keuangan, kemampuan manajemen serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, berikut beberapa contoh kasus dari kemandirian keuangan daerah. Tahun 2019, mayoritas kabupaten atau kota di Indonesia bagian timur berada pada kondisi belum mandiri secara finansialnya, selain itu di Indonesia bagian barat juga masih banyak kabupaten atau kota yang baru menuju mandiri keuangan daerahnya. Tahun 2019 hanya beberapa kabupaten atau kota dalam lingkup pulau jawa yang dapat dikatakan cukup mandiri dalam membiayai semua kegiatan operasional pemerintah. Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengatakan bahwa dari 503 pemerintah daerah yang ada di Indonesia, diketahui sebanyak 443 dari 503 pemerintah daerah masuk ke dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang rendah, serta hanya 2% yang telah mandiri secara finansialnya. Tahun 2019 masih adanya provinsi yang mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebesar 13,9 Triliun untuk membiayai semua kegiatan operasional dalam pemerintahan. Kemudian selain itu, masih banyaknya daerah kabupaten atau kota yang mengalami tingkat pendapatan asli daerah yang rendah sehingga masih bergantung dengan suntikan dana dari pemerintah pusat. Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan bahwa



masih banyak kabupaten atau kota di Indonesia yang masih rendah pendapatan asli daerahnya, sehingga hal tersebut meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya telah dilakukan secara ekstensif, namun menunjukkan hasil inkonsisten sehingga sulit untuk ditarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini peneliti menambah satu variabel yaitu investasi dengan harapan dapat menambah keanekaragaman penelitian ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan kemakmuran dalam hubungannya menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan daerah. Eliza & Murtini (2014) mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Akan tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hamzami Ulfi (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Investasi pada daerah yang besar dapat disimpulkan bahwa pemerintah berhasil mengelola keuangan untuk pembangunan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan investasi serta kepemilikan modal saham yang besar.

Penelitian lebih lanjut mengenai kemandirian keuangan daerah mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan jumlah asset yang dimiliki daerah. Pemerintah dengan asset besar dinilai mampu membiayai semua kegiatan operasional pemerintahannya menggunakan asset yang dimiliki, dan mengurangi ketergantungan adanya dana dari pemerintah pusat ataupun mengurangi tindakan pengambilan pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014), Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah

daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Riset lain mengatakan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Pemerintah harus dapat melakukan strategi untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik untuk menghindari adanya demografi penduduk pada tahun kedepannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfi & Sari (2023) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Kemudian penelitian menurut Natoen *et al.*(2019) mengatakan bahwa penduduk tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa kemakmuran dapat mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eliza & Murtini (2014) dan Riswanda & Wahyudin (2014) mengatakan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin tingginya kemakmuran, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang diterima sehingga menyebabkan peningkatan finansial daerah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masdiantini & Erawati (2016) yang menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Melihat masih terdapat permasalahan mengenai kemandirian keuangan daerah serta masih terdapatnya inkonsistensi pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian terdahulu, menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud menguji kembali hubungan variabel investasi, ukuran pemerintah daerah, penduduk, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan daerah.



## **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah suatu teori yang menggambarkan hubungan dua individu antara *steward* (pengelola) dan *principals* (masyarakat) untuk mencapai tujuan organisasi yang tercipta karena adanya kepercayaan sama lain (Nurhayati et al., 2021). Donaldson & Davis (1991) mengatakan bahwa teori *stewardship* sangat sesuai diterapkan didunia pemerintahan karena kekuasaan tertinggi berada di masyarakat. Maka dengan adanya teori *stewardship* ini dapat membantu terwujudnya cita-cita atau tujuan organisasi, yakni tujuan antara masyarakat dan pemerintahan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik. Teori *stewardship* mengasumsikan adanya komitmen terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain (Secchi, 2017). Anton (2010) menekankan bahwa pemerintah sebagai *steward*, pemerintah harus mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi dengan memberikan manfaat maksimal pada organisasi.

Pemerintah sebagai pengelola harus dapat mengelola semua sumber pendapatan asli daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni melakukan pemerataan mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan yang memadai dan tersedianya sarana dan prasarana dalam pemerintahan. Lapangan pekerjaan yang memadai dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam daerah. Kemudian besarnya kepemilikan modal pemerintah pada badan usaha lainnya dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang baik. Tersedianya fasilitas pada masyarakat dapat memicu peningkatan pendapatan dari masyarakatnya. Masyarakat sebagai pemilik yakni dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan melakukan pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya dengan tepat waktu. Kemudian memberikan inovasinya untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah (Sundaramurthy & Lewis, 2003).

Keterkaitan teori *stewardship* dengan investasi adalah pemerintah sebagai *steward* atau pengelola berhak melakukan pengelolaan serta upaya dalam meningkatkan investasi pada daerahnya. Kepemilikan modal yang besar dalam pemerintahan terhadap badan usaha lainnya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Besarnya investasi disuatu daerah akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi serta pemerataan pembangunan disetiap daerah. Pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfi (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

$H_1$  : Investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan besarnya asset yang dimiliki oleh pemerintahan. Asset merupakan kekayaan daerah dalam bentuk infrastruktur serta sarana dan prasarana (Riswanda & Wahyudin, 2014). Ukuran pemerintah yang baik yakni yang dapat dikelola pemerintah dengan baik sehingga menghasilkan jumlah yang besar. Pemerintah memiliki tuntutan untuk mengelola serta menjaga dengan baik asset yang dimilikinya serta melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat bagi Masyarakat dan pemerintah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) dan Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

$H_2$  : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih yang bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Semakin besar penduduk disuatu wilayah, maka akan meningkatkan permintaan serta penawaran ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian semakin besar penduduk disuatu daerah juga akan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada Masyarakat agar pemerintah



mendapatkan pengakuan dari Masyarakat mengenai kinerja pemerintah yang baik. Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rofiq & Arza (2021) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Jumlah penduduk yang besar diimbangi dengan kebijakan ataupun aturan dari pemerintah dengan tujuan tercapainya cita-cita masyarakat dengan pemerintah.

H<sub>3</sub> : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kemakmuran merupakan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan. Kemakmuran erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi penduduk setempat. Semakin besar pendapatan masyarakatnya, maka daerah tersebut semakin mandiri serta sejahtera. Kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan perkapita daerah tersebut. Diberlakukannya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

H<sub>4</sub> : Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

## **Metode**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dengan indeks kemandirian fiskal terendah tahun 2020-2022. Metode purposive sampling digunakan untuk penentuan sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 183 unit analisis dan hanya 155 yang memenuhi kriteria sampel. Data yang dikumpulkan bersumber dari

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI dan data pada Badan Pusat Statistik. Data yang dikumpulkan berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah, investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan kemakmuran.

Tabel 6. 5 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai semua kegiatannya tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat.	KKD = PAD/Subsidi Pemerintah Pusat + Pinjaman x 100%	(Ermawati & Aswar, 2020)
Investasi	Investasi merupakan Tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.	Investasi = $\Sigma$ Investasi Jangka Panjang	(Ulfi, 2022)
Ukuran Pemerintah Daerah	Ukuran pemerintah merupakan seberapa banyak sumber daya ekonomi atau aset yang dimiliki suatu daerah.	Ukuran Pemerintah Daerah = Total Aset Periode Tertentu	(Riswanda & Wahyudin, 2014)
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk merupakan berapa banyak jumlah orang yang bertempat tinggal lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun dengan tujuan untuk menetap di daerah tersebut.	Jumlah Penduduk = Data Sensus Penduduk	(Rofiq & Arza, 2021)
Kemakmuran	Kemakmuran atau wealth merupakan kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan.	Wealth = PDRB Per kapita	(Riswanda & Wahyudin, 2014)

## Hasil

Hasil analisis deskriptif mengenai kemandirian keuangan daerah, investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan kemakmuran dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 6. 6 Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Min	Max	Std
KKD	155	75,8	1,00	151,00	43,39
Investasi	155	178.310,8	17731,00	2.555.86,90	371.694,08
Size Jumlah Penduduk	155	4.459,9	1232,00	47.024,10	5.671.497,09
Kemakmran	155	748,7	28,00	2.880,00	668,51
	155	27.754,4	0,00	4.077,26	50.410,81

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Uji asumsi klasik atau uji prasyarat terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil regresi data panel sebelumnya dinyatakan bahwa model penelitian ini adalah Random Effect Model (REM) dimana pada model ini pengujian yang diwajibkan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas. Hasil uji normalitas diperoleh nilai probability sebesar 0.46 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yakni 0.05. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dan nilai korelasi antar variable independent dibawah 10.00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian besaran koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.43, hal ini disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variable independent yang berpengaruh terhadap variable dependen sebesar 43% dan 57% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti.

Tabel 6. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig
Investasi	-0.73	-0.92	0.359
Ukuran Pemerintah Daerah	0.23	2.03	0.043
Penduduk	-0.00	-3.65	0.000
Kemakmuran	0.47	5.94	0.000
Konstanta	51.79	4.00	0.000
F-hitung	4.789		
Sig.F	0.000		

Tabel 6. 8 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Hasil	Keputusan
H <sub>1</sub> : Investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,359. P>t : -0,73	H <sub>1</sub> ditolak
H <sub>2</sub> : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,043. P>t : 0,23	H <sub>2</sub> diterima
H <sub>3</sub> : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,000. P>t : -0.00	H <sub>3</sub> ditolak
H <sub>4</sub> : Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.	Koefisien: 0,000. P>t : 0,47	H <sub>4</sub> diterima

Tabel 5 menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat investasi di setiap pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia. Selain itu kepemilikan modal saham pada pemerintah daerah pada badan usaha lainnya mempengaruhi besaran keuntungan yang dihasilkan berdasarkan nominal investasi yang disetorkan. Selain itu nilai investasi yang tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun menyebabkan daerah mengalami ketertinggalan dalam pemerataan pemabngunan daerah. Hal ini berdasarkan data yakni investasi di Kota Sorong pada tahun 2020 terhadap PT Bank Papua hanya memiliki modal saham kurang dari 20 persen, hal ini menyebabkan Kota Sorong tidak dapat melakukan penambahan investasi selama tiga tahun berturut-turut, dan mengalami ketertinggalan dalam pembangunan. Berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kepemilikan modal saham terhadap badan usaha diatas 50 persen memudahkan Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan Eliza & Murtini (2014) yang menyatakan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfi (2022) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian statistik mengenai hipotesis tersebut menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.043 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan telah terbukti diterima. Hal ini berarti semakin besar total asset di daerah, maka pemerintahan mampu membiayai semua kegiatan menggunakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari asset yang dimiliki. Kemudian besarnya asset yang dimiliki pemerintah dapat meningkatkan pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah harus melakukan transparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan asset pemerintahan. Azzahra & Wibowo (2019) menyatakan bahwa semakin besar total asset dalam pemerintahan, maka semakin banyak modal yang ditanam serta banyaknya perputaran uang dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan data di lapangan, bahwa Kota Surabaya memiliki total asset yang besar pada tiga tahun. Akibatnya Kota Surabaya maju dalam hal Pembangunan, pemenuhan sarana dan prasarana serta kota yang telah mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) dan Lubis & Ningsi (2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan dan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian statistik mengenai hipotesis tersebut, menunjukkan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni penduduk berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, secara empiris hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini terbukti ditolak. Lebih lanjut, nilai signifikansi dalam variabel ini sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan kearah negatif. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya penduduk disuatu daerah, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah tersebut. Selain itu, banyaknya penduduk disuatu daerah juga menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi oleh

pemerintah, serta belum terlaksanakannya pembayaran pajak atau retribusi tepat waktu oleh wajib pajak. Persebaran penduduk terbanyak dalam penelitian ini berada di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan beberapa factor yang memengaruhinya, seperti letaknya yang strategis, kebutuhan pangan yang tercukup, serta iklim yang sesuai dan lain sebagainya. Jumlah penduduk yang banyak harus dapat dikendalikan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan untuk pemerintahan kedepannya. Hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Natoen *et al* (2019) yang menyatakan bahwa penduduk berpengaruh secara signifikan kearah negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil pengujian statistik mengenai hipotesis tersebut menunjukkan kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga, secara empiris hipotesis keempat (H4) diterima. Lebih lanjut, nilai signifikansi variabel kemakmuran sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.047 kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti besarnya tingkat kemakmuran daerah yang dilihat dari pendapatan domestik regional bruto perkapita dapat mempengaruhi kemandirian keuangan suatu daerah. Kemakmuran bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang ada pada daerah tersebut, sehingga pemerintah serta Masyarakat harus dapat mengelola serta menggunakan dana dengan sebaik mungkin untuk mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini menyatakan bahwa kabupaten atau kota dengan kemakmuran tinggi yakni di Kota Surabaya. Meskipun adanya pandemi Covid-19, pendapatan perkapita Kota Surabaya tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan sektor industri di Surabaya berada dalam keadaan unggul semua, meliputi sektor konstruksi, reparasi, industri pengolahan dan lainnya. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswanda & Wahyudin (2014) dan Harumiati *et al* (2014) yang menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah.



## Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yakni investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, kemudian variable ukuran pemerintah daerah dan kemakmuran berpengaruh secara signifikan kearah positif terhadap kemandirian keuangan daerah dan jumlah pendudukan berpengaruh secara signifikan kearah negative terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia diharapkan dengan diterapkan otonomi daerah dapat menggali lebih dalam mengenai potensi daerahnya yang unggul serta melakukan peningkatan pengelolaan asset pemerintahan secara efektif dan efisien dan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan perkapita pada daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni hanya berfokus pada empat variable independent yakni investasi, ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, dan kemakmuran. Kemudian objek penelitian yang hanya berfokus pada pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dengan indeks kemandirian fiscal terendah pada tahun 2020-2022. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variable lain yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah serta dapat mengganti variable ataupun pengukuran pada variable yang tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah serta penambahan objek pada penelitian.

## Daftar Pustaka

- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. 5(3), 1098–1114.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATiKA*, 1(2), 61–80.
- Azzahra, A. S., & Wibowo, N. (2019). Pengaruh Firm Size dan Leverage Ratio terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/10.55601/jwem.v9i1.588>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Eliza, & Murtini, H. (2014). Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Tengah. 3(4), 457–465.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. *European Journal of Business and Management Research*, 5(1), 1–5. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178>
- Harumiati, Y., Karakteristik, P., Daerah, P., & Temuan, D. (2014). Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ... 3(2), 75–87.
- Lubis, I. T., & Ningsi, E. H. (2022). Enrichment: Journal of Management is Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) Enrichment: Journal of Management Determinants Of Financial Performance In Local Governments In District/City In Indo. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2385–2390.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1150–1182.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106–117.
- Nurhayati, N., Fitriana, R., Isrowiyah, A., Zahroh, F., & Widyani, I. P. (2021). Does Wealth Levels, Reliance and Leverage Influence Financial Performance? *Quality - Access to Success*, 22(185), 177–183. <https://doi.org/10.47750/QAS/22.185.24>
- Purnama, Y. D. (2016). *Kemandirian Keuangan Daerah*. 01, 1–23.
- Riswanda, & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. 3(4), 457–465.
- Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 705–719. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.414>
- Sari, A. M. (2023). Otonomi Daerah. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/>



- Secchi, D. (2017). Stewardship Theory is board accountability necessary? *The Electronic Library*, 34(1), 1-5.
- Sundaramurthy, C., & Lewis, M. (2003). Control and collaboration: Paradoxes of governance. *Academy of Management Review*, 28(3), 397-415. <https://doi.org/10.5465/AMR.2003.10196737>
- Ulfi. (2022). Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah. *Bina Ekonomi*, 25(2), 115-134. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5259.21-40>

# BAB VII

## AUDIT, PROFITABILITAS, DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN TERHADAP ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DENGAN DEWAN DIREKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

**Nabila Rahmah Adiningtyas<sup>1)</sup>, Retnoningrum  
Hidayah<sup>2)</sup>, Caraka Hadi<sup>3)</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,  
Universitas Negeri Semarang

[nabilarahma@students.unnes.ac.id<sup>1\)</sup>](mailto:nabilarahma@students.unnes.ac.id),

[retnoningrum.hidayah@mail.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:retnoningrum.hidayah@mail.unnes.ac.id),

[carakahadi@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:carakahadi@mail.unnes.ac.id)



**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya pengaruh komite audit, profitabilitas, dan konsentrasi kepemilikan dengan dimoderasi oleh dewan direksi. Penelitian ini menggunakan data sebanyak 96 unit analisis yang diperoleh dari perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data panel dengan analisis regresi parsial menggunakan software WarpPLS 8. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap enterprise risk management. profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap enterprise risk management. Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap enterprise risk management. Dewan direksi mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap enterprise risk management. Dewan direksi mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh komite audit terhadap enterprise risk management. Dewan direksi tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap enterprise risk management.

**Kata Kunci:** Komite Audit, Profitabilitas, Konsentrasi Kepemilikan, Dewan Direksi, Enterprise Risk Management

## **Pendahuluan**

Perkembangan bisnis pada era globalisasi dan teknologi informasi membawa perusahaan pada deretan tantangan yang tidak menentu. Ketidakpastian dan dinamika menjadi sahabat sehari-hari di dalam perjalanan bisnis, yang semakin mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemennya. Tantangan yang dihadapi perusahaan melibatkan penanganan risiko yang semakin kompleks, perubahan regulasi yang cepat, serta pergeseran dinamika pasar yang tak terduga. Di dalam keadaan yang terus berubah ini, perusahaan dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, manajemen perusahaan memiliki peran krusial dalam menyediakan informasi yang komprehensif.

Perusahaan Indonesia, terutama yang terdaftar di pasar saham, diharuskan untuk membuat laporan tahunan (annual report) yang berisi informasi tentang kegiatan mereka. Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Kasmir (2019) mendefinisikan laporan keuangan sebagai dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016, yang mengatur bentuk dan isi laporan tahunan perusahaan publik, komponen non-keuangan menyediakan informasi tambahan untuk pemangku kepentingan, termasuk evaluasi risiko perusahaan. Laporan tahunan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban hukum, namun juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen yang terlibat dalam aktivitas operasional dan pengelolaan sumber daya perusahaan terhadap pemegang saham.

Peran laporan tahunan menjadi sangat signifikan dalam membujuk para investor dan calon investor mengenai kinerja perusahaan. Di dalamnya, terdapat informasi yang melibatkan berbagai aspek kinerja perusahaan, termasuk keuangan, kinerja operasional, profitabilitas, dan pengelolaan risiko. Informasi ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan strategis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis oleh perusahaan dalam mengantisipasi skenario terburuk dalam perusahaan atau yang sering disebut sebagai risiko.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), merancang suatu landasan yang efektif untuk mengenali (identify), mengevaluasi (assess), dan mengelola (manage) risiko, dan mengenalkan suatu kerangka kerja terpadu yang dikenal sebagai Enterprise Risk Management (ERM). Untuk mengelola dan mengevaluasi risiko, perusahaan menggunakan manajemen risiko atau yang juga disebut ERM. Pendekatan ini dipengaruhi oleh direktur entitas, manajemen, dan staf lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan disiplin yang sistematis, konsisten, dan logis untuk menghadapi ketidakpastian di masa mendatang (Sari & Rudy, 2020).



Faktanya, seringkali kita menjumpai fenomena di dunia bisnis yang terjadi akibat pengelolaan manajemen risiko yang kurang optimal dalam suatu perusahaan, bahkan bisa berujung pada pailit atau kebangkrutan. Forever 21, perusahaan ritel pakaian terkemuka, mengalami pailit pada tahun 2019. Kasus pailit Forever 21 mencerminkan masalah yang dihadapi penjual ritel konvensional di seluruh dunia, terutama dengan munculnya berbagai platform e-commerce seperti Amazon yang mengubah cara pelanggan membeli barang. Permasalahan semakin terungkap ketika Manajemen Forever 21 mengajukan perlindungan kepailitan secara sukarela kepada panitera pengadilan distrik Delaware, AS, pada 29 September 2018.

Merespon hal tersebut, Forever 21 memutuskan untuk menutup memutuskan untuk menutup 178 gerai dari 500 gerai mereka di Amerika Serikat. Menurut catatan pengadilan terdapat informasi bahwa Forever 21 mengalami kerugian sebesar US\$ 10 juta per bulannya di Kanada, Eropa, dan Asia. Selain itu, manajemen berencana untuk menutup 350 gerai dari total 815 gerai mereka di 57 negara, termasuk di Asia, Eropa, Jepang, dan Kanada. (Syafina, 2019). Kepailitan Forever 21 membawa sejumlah risiko yang melibatkan kreditur, pemegang saham, karyawan, reputasi perusahaan, industri ritel secara keseluruhan, hingga aspek hukum dan regulatori. Dampak ini mencakup risiko finansial bagi pemegang saham, risiko ketenagakerjaan bagi karyawan, risiko reputasi yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen dan investor, serta risiko terhadap stabilitas industri ritel secara keseluruhan.

Kegagalan dalam mengelola risiko turut dialami oleh Wings Food, yang berakibat pada penarikan ulang produk Mie Sedaap dari sejumlah negara. Pada 5 Juli 2022, Mie Sedaap ditolak di Taiwan karena terbukti mengandung residu pestisida etilena oksida dalam jumlah yang melampaui batas yang diizinkan. Sebagai tindak lanjut atas temuan ini, Departemen Kesehatan Taipei memerintahkan penarikan produk 5 varian Mie Sedaap dari peredaran dan mengancam para importir dengan denda signifikan, berkisar antara NT\$ 60 ribu sampai 200 juta, atau setara dengan Rp 29 juta hingga 98 miliar, menurut kurs Rp 490. Kasus ini mencerminkan kurangnya pengelolaan risiko kesehatan dan keamanan produk oleh perusahaan, serta risiko kepatuhan terhadap

peraturan, yang berujung pada penurunan reputasi di masyarakat dan denda yang signifikan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif dapat menyebabkan perusahaan mengalami masalah serius, bahkan hingga pada tingkat kebangkrutan, baik pada skala kecil maupun besar. Suatu pendekatan komprehensif yang dikenal sebagai Enterprise Risk Management (ERM) menjadi solusi untuk mengelola risiko perusahaan dengan lebih baik. ERM merupakan suatu metode yang membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian, mengurangi potensi ancaman, serta meningkatkan peluang keberhasilan. Dengan menerapkan ERM, kinerja perusahaan dapat ditingkatkan sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan sebenarnya. Setelah proses pengolahan informasi keuangan, laporan keuangan dihasilkan sebagai output yang memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan. Hal ini tidak hanya berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang telah berlangsung, tetapi juga untuk memproyeksikan kinerja di masa mendatang.

Namun, praktik manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan seringkali terjadi. Manipulasi ini bisa berupa penyesuaian atau pengabaian dengan sengaja terhadap sejumlah jumlah tertentu, dimaksudkan untuk memberikan kesan kepada stakeholder bahwa kinerja perusahaan lebih positif di mata pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Manipulasi atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan semacam itu mungkin terjadi jika perusahaan tidak melaksanakan manajemen risiko yang efektif, yang menyebabkan ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi risiko dan potensi kerugian.

Salah satu skandal yang mencengangkan dalam dunia profesi akuntansi adalah kasus Toshiba Corporation pada tahun 2015. Manajemen Toshiba, yang pada awalnya berusaha menciptakan kepercayaan investor, justru terlibat dalam manipulasi laporan keuangan yang mencoreng reputasi perusahaan sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya Toshiba. Setelah dilakukan investigasi secara menyeluruh, ternyata toshiba kesulitan mencapai target laba organisasi sejak krisis ekonomi yang melanda dunia



tahun 2008. Toshiba terungkap telah melakukan penggelembungan laba senilai 151,8 miliar yen atau 1,22 miliar dolar AS yang bertujuan untuk menutupi ketidakmampuan mencapai target tersebut. Akibatnya, saham Toshiba mengalami penurunan sekitar 25% sejak awal April, dan nilai pasar perusahaan ini merosot sekitar 1,67 triliun yen (setara dengan 174 triliun rupiah).

Pada tanggal 21 juli 2015 CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya dan delapan pemimpin lain juga ikut mengundurkan diri. Terungkapnya skandal manipulasi akuntansi dalam penyajian laporan keuangan ini mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat, yang terlihat dari penurunan harga saham yang signifikan dari perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut. Keseluruhan peristiwa ini mencerminkan betapa pentingnya tata kelola yang baik dan penerapan manajemen risiko yang efektif dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam dunia bisnis.

Enterprise risk management merupakan aspek baru dalam bursa saham Indonesia yang diperkenalkan oleh Committee of Sponsoring Organizations (COSO) pada September 2004. Pengungkapan ERM mampu menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola ketidakpastian risiko secara luas, meningkatkan tingkat kesiapan perusahaan untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk dalam aktivitasnya. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya pengungkapan ERM sebagai informasi krusial bagi investor dalam mengevaluasi potensi dan prospek suatu perusahaan. Fenomena tersebut dapat dijelaskan secara empiris dilihat dari hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Namun masih ditemukan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu (research gap), sehingga menjadikan dasar peneliti untuk melakukan pengujian kembali tentang faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam pengungkapan enterprise risk management.

Komite Audit memiliki peranan penting dalam mewujudkan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Komite Audit, seperti yang dijelaskan oleh Muda et al., (2017), merupakan unsur pelengkap yang essential dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komite ini berfungsi sebagai penuntun dalam menjalankan manajemen perusahaan dan mengelola tugas-tugas krusial terkait dengan sistem pelaporan keuangan perusahaan. Perspektif IIA menyatakan bahwa peran Komite Audit sangat diharapkan dalam memberikan pengawasan dan dukungan kepada dewan direksi untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan akuntabilitas perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Isbanah (2019), Cahyono (2023), Rosiani & Honesty (2023), Lokaputra et al. (2022) dan Utami et al. (2021) menunjukkan bahwa komite audit memberikan pengaruh positif pada ERM. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yubiharto & Rudianti (2021) yang mengungkap bahwa komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pengungkapan ERM.

Variabel lain yang mempengaruhi Enterprise Risk Management (ERM) adalah profitabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Kasmir (2019), yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan suatu metode untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan atau laba selama periode waktu tertentu. Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan laba secara konsisten sambil mengelola dan memitigasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan keuangan. Definisi ini mencakup integrasi konsep profitabilitas dengan pendekatan manajemen risiko yang holistik. Dalam perspektif ERM, profitabilitas tidak hanya dianggap sebagai pencapaian laba semata, melainkan juga sebagai hasil dari praktik manajemen risiko yang efektif. Risiko-risiko yang mungkin memengaruhi profitabilitas, seperti risiko operasional, risiko keuangan, dan risiko strategis, dikelola dengan cara yang mengoptimalkan nilai perusahaan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Pendekatan ERM terhadap profitabilitas melibatkan identifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan keuangan, pengukuran dampak risiko-risiko tersebut terhadap profitabilitas, serta pengembangan strategi dan tindakan mitigasi untuk mengelola risiko-risiko tersebut seefektif mungkin. Penelitian oleh Kusumaningrum et al. (2023), Ramdhani & Khairunnisa (2021), Anggraini & Terzaghi (2022) serta Noviana & Mappadang (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas



memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ERM. Meskipun demikian, penelitian yang berbeda seperti yang dilakukan oleh Rujjin & Sukirman (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap ERM. Sementara itu, penelitian Aulia et.al. (2022) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh komite audit terhadap enterprise risk management.

Konsentrasi kepemilikan menurut Rao et al., (2020) adalah proporsi saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Dalam konteks Enterprise Risk Management (ERM), konsentrasi kepemilikan mengacu pada sejauh mana kepemilikan saham suatu perusahaan terpusat pada individu, kelompok, atau entitas tertentu. Dalam perspektif ERM, definisi konsentrasi kepemilikan mencerminkan risiko yang timbul akibat dominasi kepemilikan oleh pihak-pihak tertentu, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan strategis dan kinerja perusahaan. Definisi ini mencakup pemahaman bahwa konsentrasi kepemilikan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan dan pengaruh dalam pengelolaan perusahaan. Kondisi di mana sebagian besar saham dimiliki oleh satu atau beberapa entitas dapat menimbulkan risiko terkait potensi dominasi keputusan, kurangnya diversifikasi pemilik, dan ketergantungan pada individu atau kelompok tertentu.

Faktor konsentrasi kepemilikan dikaji oleh Herlambang & Hapsari (2024), Zaman et al. (2021), Kusumaningrum et al. (2023), Arief et al. (2022), dan Giarti & Sutrisno (2019) pada penelitian yang membahas pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan enterprise risk management menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap ERM. Namun, Masri & Muslih (2022), dalam penelitian mereka mengenai pengaruh dewan direksi, komite manajemen risiko, dan konsentrasi kepemilikan terhadap ERM pada perusahaan keluarga sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif, didukung oleh penelitian (Janitra & Moin, 2023) yang menunjukkan hasil yang sama. Sedangkan pada penelitian (Oktavia & Isbanah, 2019) mengenai pengungkapan ERM pada bank konvensional di BEI, konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ERM.

Dewan Direksi sebagai entitas pengawas tertinggi dalam sebuah perusahaan memiliki potensi untuk memoderasi efek variabel independen terhadap implementasi ERM. Dalam penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Janitra & Moin (2023), Masri & Muslih (2022), serta Giarti & Sutrisno (2019), Dewan Direksi secara konsisten berpengaruh terhadap enterprise risk management. Artinya, peran Dewan Direksi dapat memperkuat pengaruh variabel independen, seperti komite audit, profitabilitas, atau konsentrasi kepemilikan, terhadap praktik ERM dalam sebuah perusahaan. Sebagai variabel moderating, Dewan Direksi dapat memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan manfaat dan efektivitas dari ERM. Mereka dapat memberikan arahan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi secara efektif dalam setiap aspek operasional perusahaan. Dengan adanya Dewan Direksi sebagai variabel moderating dalam ERM, peran mereka tidak hanya sebatas pengawas, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan ketahanan perusahaan terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul.

H1 : Komite audit berpengaruh positif terhadap enterprise risk management

Komite audit adalah komite independen yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengawasi proses audit internal dan kepatuhan perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan prosedur audit internal, melakukan evaluasi atas kinerja auditor internal, serta mengawasi proses pelaporan keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite audit memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan risiko di perusahaan. Dengan kehadiran komite audit yang efektif, diharapkan akan tercipta lingkungan pengawasan yang lebih baik, membantu identifikasi risiko secara proaktif, dan mendorong implementasi enterprise risk management lebih efisien.

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap enterprise risk management



Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat diinvestasikan dalam pengelolaan risiko. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas ERM perusahaan. Pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) juga dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi pastinya mempunyai risiko yang tinggi pula, hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan tolak ukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Profitabilitas diukur melalui berbagai rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan margin laba. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang sehat atau tidaknya kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang baik dapat memiliki sumber daya finansial yang lebih untuk berinvestasi dalam sistem ERM yang efektif.

H3 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap enterprise risk management

Konsentrasi kepemilikan adalah suatu kondisi dimana kepemilikan saham suatu perusahaan didominasi oleh satu atau beberapa pemegang saham. Konsentrasi kepemilikan merujuk pada distribusi saham suatu perusahaan yang terfokus pada individu, kelompok, atau entitas tertentu. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi dapat menciptakan stabilitas dalam kepemilikan saham perusahaan. Kepemilikan yang stabil dapat menyediakan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan ERM dengan fokus jangka panjang. Konsentrasi kepemilikan yang tinggi dapat dianggap sebagai alat kontrol yang dapat meningkatkan implementasi enterprise risk management.

H4 : Dewan Direksi mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap enterprise risk management

Dewan direksi yang kuat dan terlibat aktif dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mendorong implementasi ERM. Sebaliknya, dalam situasi di mana dewan direksi kurang aktif atau memiliki struktur yang tidak mendukung, pengaruh Komite Audit terhadap ERM mungkin tidak sekuat yang diharapkan. Dewan direksi memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pengelolaan risiko

perusahaan. Sebagai badan yang mewakili pemegang saham, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dihadapi perusahaan dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola dengan efektif. Oleh karena itu, peran dewan direksi dalam konteks enterprise risk management dapat diartikan sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi manajemen risiko yang efektif.

H5 : Dewan Direksi mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap Enterprise risk management

Dewan direksi yang efektif dapat memastikan bahwa keuntungan yang tinggi tidak dicapai dengan mengorbankan manajemen risiko. Sebaliknya, dalam situasi di mana profitabilitas terbatas, Dewan Direksi dapat memotivasi perusahaan untuk mengelola risiko dengan lebih hati-hati untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Teori keagenan dapat memberikan dasar untuk menjelaskan bahwa dewan direksi, sebagai perwakilan pemegang saham (principal), memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan manajemen perusahaan (agent) sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Keagenan menciptakan dorongan bagi dewan direksi untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan profitabilitas juga diikuti dengan implementasi ERM yang efektif. Dewan direksi diharapkan dapat memastikan bahwa risiko yang mungkin timbul dari keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas diidentifikasi dan dikelola dengan baik melalui praktik ERM.

H6 : Dewan Direksi mampu memoderasi pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap enterprise risk management

Dewan direksi memiliki fungsi pengawasan yang berperan penting dalam memoderasi hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan ERM. Keberadaan dewan direksi yang kuat dapat mengurangi potensi risiko yang timbul akibat dominasi kepemilikan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan keterlibatan aktif dewan direksi, risiko-risiko yang terkait dengan konsentrasi kepemilikan dapat diidentifikasi dan dikelola secara lebih efektif. Dewan direksi yang memiliki keahlian dan keberagaman yang cukup dapat lebih efektif dalam menanggulangi potensi konflik keagenan yang mungkin muncul akibat konsentrasi kepemilikan yang



tinggi. Sebaliknya, jika dewan direksi memiliki keterbatasan dalam pengawasan atau keterlibatan, pengaruhnya dalam memoderasi hubungan tersebut mungkin terbatas.

#### METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode pengamatan tahun 2020-2022. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai Pemilihan sektor manufaktur sebagai objek penelitian memiliki keunikan tersendiri, karena mencakup berbagai subsektor industri yang diharapkan mampu merepresentasikan keragaman pasar secara keseluruhan. Pengambilan data dalam tiga tahun terakhir memiliki alasan hasil penelitian diharapkan mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

Jumlah perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 188 perusahaan. Banyaknya sampel setelah dilakukan purposive sampling diperoleh 40 perusahaan dengan total 96 unit analisis. Proses penentuan sampel penelitian disajikan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 7. 13 Identifikasi Sampel Penelitian*

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022	188
Perusahaan sektor manufaktur yang tidak mengeluarkan annual report tahun 2020-2022	(24)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian	(132)
Perusahaan keuangan yang terpilih sebagai sampel	32
Tahun Observasi	3
Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2020-2022	96

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2024

Berikut merupakan ringkasan pembahasan untuk mempermudah pemahaman dari definisi operasional pada tiap variabel penelitian.

*Tabel 7. 14 Definisi Operasional*

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Enterprise risk management (ERM)	Budaya, kapabilitas, dan praktik terintegrasi dalam proses penetapan dan pelaksanaan strategi untuk mengelola risiko dalam mencapai tujuan perusahaan.	ERM = $\frac{\text{Total item yang diungkapkan}}{20 \text{ item ERM}}$ COSO (2017)
2	Komite Audit	Sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang dipilih untuk membantu auditor independen dari manajemen.	Komite Audit = $\sum$ Rapat Komite Audit POJK NO.55/POJK.04/2015 Huda (2019)
3	Profitabilitas	kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba), yang mengacu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu .	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ Febriandhani et al. (2023)
4	Konsentrasi Kepemilikan	Pemegang kendali atas sebagian besar kepemilikan dan aktivitas bisnis pada perusahaan.	Ownership Concentration = $\frac{\sum \text{Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Perusahaan}}$ Giarti & Sutrisno (2019)
5	Dewan Direksi	Badan pengawas yang bertanggung jawab atas strategi bisnis serta pusat dari mekanisme internal operasional perusahaan.	Dewan Direksi = $\sum$ Rapat Dewan Direksi Yuniar & Syafruddin (2022)

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2024

## HASIL DAN DISKUSI

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi parsial dengan signifikansi alpha 0.05 yang dianalisis menggunakan alat bantu WarpPLS 8. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung variabel independen dan moderasi terhadap variabel dependen. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan moderasi terhadap dependen dengan menggunakan analisis regresi parsial. Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini ditunjukkan untuk melihat nilai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi variabel penelitian. Hasil dari analisis statistik deskriptif digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 7. 15 Analisis Statistik Deskriptif

Indikator	N	Mean	Min	Max	Std. Dev
ERM	96	0,765	0,471	1,000	0,126
KA	96	6,000	2,000	39,000	7,479

PROF	96	0,030	0,631	0,599	0,153
KK	96	0,596	0,134	0,983	0,192
DD	96	16,500	9,000	67,000	12,104

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jika ditinjau pada nilai standar deviasi dari variabel enterprise risk management, komite audit dan profitabilitas lebih besar dari nilai mean yang dimiliki oleh masing-masing indikator, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa persebaran data dalam penelitian ini bersifat heterogen dan memiliki tingkat persebaran data yang cukup tinggi. Sedangkan untuk variabel konsentrasi kepemilikan dan dewan direksi memiliki nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya sehingga variabel konsentrasi kepemilikan dan dewan direksi memiliki tingkat persebaran data yang rendah. Apabila persebaran datanya rendah maka varians datanya semakin sama atau bersifat homogen, hal ini akan berdampak pada tidak adanya perbedaan yang tinggi antara data satu dengan data lainnya.

Tabel 7. 16 Hasil Loading Factor

	KA	PROF	KK	DD	ERM
KA	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000
PROF	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000
KK	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000
DD	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000
ERM	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Tabel 7. 17 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Deskripsi
KA	1.000	Valid
PROF	1.000	Valid
KK	1.000	Valid
DD	1.000	Valid
ERM	1.000	Valid

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Validitas konvergen digunakan untuk mengukur keabsahan data indikator terhadap variabel laten, dan nilai loading faktor menjadi indikator penting dalam pengukuran ini. Penting untuk dicatat bahwa nilai loading faktor yang tinggi, khususnya > 0,7, dianggap sebagai tanda

validitas konvergen yang baik. Ini menunjukkan bahwa indikator memiliki hubungan yang kuat dengan variabel laten yang diukur. Namun, jika nilai loading faktor  $< 0,7$ , indikator tersebut dianggap tidak valid untuk mengukur konstraknya, karena kurangnya hubungan yang memadai. Pada penelitian ini nilai outer loading  $> 0,7$ , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian dapat dikatakan baik dan valid. Selain itu validitas konvergen dapat dilihat dari nilai average variance extracted (AVE). Pada penelitian ini nilai average variance extracted (AVE)  $> 0,5$  dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data variabel penelitian ini dapat dikatakan valid.

Tabel 7. 18 Cross Loading

	KA	PROF	KK	DD	ERM
KA	(1.000)	0.000	0.000	0.000	0.000
PROF	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000
KK	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000
DD	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000
ERM	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Discriminant validity adalah suatu uji dengan tujuan untuk memastikan bahwa konsep dari variabel laten berbeda dengan yang lainnya. Pada penelitian ini semua variabel sudah memenuhi kriteria validitas diskriminan yang dapat dilihat dari setiap blok indikator variabel penelitian mempunyai nilai cross loading konstruk laten yang lebih besar daripada nilai konstruk lainnya.

Tabel 7. 19 Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	Deskripsi
KA	1.000	1.000	Reliabel
PROF	1.000	1.000	Reliabel
KK	1.000	1.000	Reliabel
DD	1.000	1.000	Reliabel
ERM	1.000	1.000	Reliabel
DD*KA	1.000	1.000	Reliabel
DD*PROF	1.000	1.000	Reliabel
DD*KK	1.000	1.000	Reliabel

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur apakah indikator pada variabel penelitian dapat dilakukan lebih dari dua kali dan tetap konsisten. Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh nilai composite reliability dan cronbach's alpha > 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini telah memenuhi kriteria uji reliabilitas sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan uji selanjutnya.

Tabel 7. 20 Nilai R-Square

Variabel	R-Square
ERM	0,182

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Koefisien determinasi (R-Square) digunakan untuk melihat seberapa besar kekuatan regresi data panel dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R-Square) dengan nilai 0,25 dapat dikatakan model penelitian tersebut lemah, nilai 0,45 dapat dikatakan model penelitian tersebut sedang, dan nilai 0,70 dapat dikatakan model penelitian tersebut kuat. Pada penelitian ini nilai koefisien determinasi (R-Square) variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,261. Nilai R-square lebih besar dari 0,25 yang dapat diartikan bahwa model penelitian tersebut sedang. Nilai R-squared pada penelitian ini adalah sebesar 0,182 atau 18,2%. Hal tersebut menjelaskan bahwa 18,2% dari variabel enterprise risk management dapat dijelaskan oleh variabel komite audit, profitabilitas, dan dewan direksi, sementara 81,8% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 7. 21 Effect Size

Variabel	Effect Size	Kategori
KA	0.028	Sedang
PROF	0.070	Besar
KK	0.010	Lemah
DD*KA	0.024	Sedang
DD*PROF	0.016	Sedang
DD*KK	0.033	Sedang

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Effect size adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu variabel profitabilitas memiliki pengaruh paling signifikan terhadap variabel dependen dengan kategori besar. Kemudian variabel konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh lemah terhadap variabel dependen. Komite audit, profitabilitas dengan interaksi dewan direksi, konsentrasi kepemilikan dengan interaksi dewan direksi, dan komite audit dengan interaksi dewan direksi memiliki pengaruh yang lebih besar. Hal ini terlihat dari nilai effect size yang termasuk kategori sedang.

Tabel 7. 22 Hasil Uji Goodness of Fit (GoF)

Variabel	Gof
ERM	0,427

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Uji goodnes of fit (GoF) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur efek yang ditimbulkan oleh variabel-variabel penelitian. Menurut Kock (2021) ambang batas goodnes of fit (GoF) yaitu kecil ketika nilainya  $\geq 0,1$ ; sedang ketika nilainya  $\geq 0,25$ ; dan besar ketika nilainya  $\geq 0,36$ . Dari hasil pengujian didapatkan nilai goodnes of fit (GoF) sebesar 0,511. Nilai tersebut lebih besar dari 0,36 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji goodnes of fit (GoF) berada dalam kategori besar.

Tabel 7. 23 Hasil Uji Stone-Geisser's (Q-Square)

Variabel	Q-Square
ERM	0,223

Sumber : data diolah melalui WarpPLS 8, 2024

Uji Stone-Geisser's (Q Square) digunakan untuk penilaian pada model penelitian, apakah modelnya mempunyai predictive relevance ataukah tidak. Menurut Kock (2021) terdapat beberapa kategori Q-Square yaitu kecil ketika nilainya  $\geq 0,02$ ; sedang ketika nilainya  $\geq 0,15$ ; dan besar ketika nilainya  $\geq 0,35$ . Setelah dilakukan pengujian diketahui nilai Q-Square variabel Enterprise risk management yaitu sebesar 0,266. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai Q-Square lebih besar dari 0,15 yang berarti nilai tersebut berada di kategori sedang.



Uji hipotesis menggunakan analisis regresi parsial. Pada penelitian ini analisis hipotesis dilakukan dengan cara melihat nilai path coefficient dan p-value. Nilai signifikansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu p-value sebesar 5% atau 0,05. Di bawah ini merupakan hasil analisis hipotesis berdasarkan nilai path coefficient dan p-value :

Tabel 7. 24 Ringkasan Hasil Hipotesis

	Hipotesis	Path Coefficient	P-Values	Hasil
H1	Komite audit berpengaruh positif terhadap Enterprise risk management.	-0,148	0,067	Ditolak
H2	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Enterprise risk management.	0,233	0,008	Diterima
H3	Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap Enterprise risk management.	0,078	0,218	Ditolak
H4	Dewan direksi memoderasi pengaruh komite audit terhadap Enterprise risk management.	-0,165	0,047	Diterima
H5	Dewan direksi memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap Enterprise risk management.	0,066	0,257	Ditolak
H6	Dewan direksi memoderasi pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap Enterprise risk management	0,182	0,032	Diterima

Sumber: Data diolah melalui WarpPLS, 2024

### Pengaruh Komite Audit terhadap Enterprise Risk Management

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Penelitian ini mengukur komite audit menggunakan proksi jumlah rapat komite audit yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan pada suatu periode. Berdasarkan Hasil uji statistik yang tercantum pada tabel 4.19, pengaruh variabel komite audit terhadap Enterprise Risk Management (ERM) memiliki nilai path coefficient negatif (-0,148)

dengan tingkat signifikansi p-value sebesar  $0,067 > 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ERM ditolak. Kondisi ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap enterprise risk management sehingga secara empiris hipotesis pertama (H1) ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara frekuensi rapat komite audit dengan luasnya pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM). Hipotesis yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap ERM tidak terbukti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kinerja komite audit tidak hanya ditentukan oleh jumlah rapat, tetapi juga oleh kualitas, kapasitas, dan integritas anggota komite. Kedua, hubungan erat antara komite audit internal dan manajemen perusahaan dapat memengaruhi objektivitas komite. Ketiga, kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi anggota komite audit dapat menghambat penerapan tata kelola yang baik. Penelitian Effendi (2019) mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa hubungan erat internal dan kurangnya pelatihan dapat menghambat efektivitas komite audit dalam ERM.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yubiharto & Rudianti (2021), Noviana & Mappadang (2022), dan Juwita & Jurnal (2020) yang menyebutkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap enterprise risk management. Kondisi tersebut juga dapat disebabkan karena adanya faktor dominan lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Seperti otoritas manajemen perusahaan yang dominan dan kurangnya dukungan dari manajemen yang menyebabkan komite audit tidak memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk melakukan tugasnya secara efektif.

#### Pengaruh Profitabilitas terhadap Enterprise Risk Management

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Berdasarkan Hasil uji statistik yang tercantum pada tabel 4.19, pengaruh variabel profitabilitas terhadap Enterprise Risk Management (ERM) memiliki nilai path coefficient positif (0,233) dengan tingkat signifikansi



p-value sebesar  $0,008 < 0,05$ . Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap ERM diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap enterprise risk management sehingga secara empiris hipotesis kedua (H2) diterima.

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan dengan rasio Return On Assets (ROA) perusahaan pada periode tertentu. ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber dana dan memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola aktiva secara efektif. Semakin besar nilainya, maka semakin baik karena menunjukkan bahwa aktiva perusahaan dimanfaatkan secara efektif dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA mencerminkan tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan tinggi sehingga risiko dapat diminimalkan menjadi sekecil mungkin. Analisis ini sesuai dengan teori keagenan, hubungan positif antara profitabilitas dan enterprise risk management dapat dijelaskan sebagai hasil dari pemangku kepentingan internal yang memiliki insentif untuk mengurangi risiko.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Kusumaningrum et al. (2023), Ramdhani & Khairunnisa (2021), Anggraini & Terzaghi (2022) serta Noviana & Mappadang (2022) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Profitabilitas tidak hanya berfungsi sebagai indikator keberhasilan finansial, tetapi juga sebagai prediktor penting dalam menilai sejauh mana perusahaan terlibat dalam upaya proaktif untuk mencapai tujuan pengelolaan risiko secara menyeluruh. Artinya, tingkat profitabilitas suatu perusahaan dianggap memiliki korelasi yang signifikan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif.

#### Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Enterprise Risk Management

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Berdasarkan Hasil uji statistik yang tercantum pada tabel 4.19, pengaruh variabel konsentrasi kepemilikan terhadap Enterprise Risk

Management (ERM) memiliki nilai path coefficient positif (0,078) dengan tingkat signifikansi p-value sebesar  $0,218 > 0,05$ . Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap enterprise risk management sehingga secara empiris hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Konsentrasi kepemilikan diukur dengan membagi total kepemilikan saham terbesar dengan total saham yang dimiliki perusahaan. Konsentrasi kepemilikan merujuk pada distribusi saham suatu perusahaan yang terfokus pada individu, kelompok, atau entitas tertentu. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap enterprise risk management. Kondisi tersebut dapat terjadi karena meskipun pemegang saham dominan memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas perusahaan, konsentrasi kepemilikan yang tinggi dapat menyebabkan dominasi kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan keseluruhan perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan penekanan pada tujuan individu atau kelompok pemegang saham utama, dan bukan pada mitigasi risiko secara keseluruhan. Selain itu, terdapat potensi terjadinya konflik kepentingan internal yang kompleks, dimana pemegang saham utama mungkin lebih memperhatikan keberhasilan jangka pendek atau keuntungan pribadi daripada risiko jangka panjang yang dihadapi oleh perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian ini adalah Oktavia & Isbanah (2019) dan Qulyubi et al. (2023). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel enterprise risk management. Besar atau tidaknya konsentrasi kepemilikan di dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan enterprise risk management karena pemegang saham tetap mendapatkan keterbukaan akses informasi yang dibutuhkan Oktavia & Isbanah (2019). Sementara pada penelitian Janitra & Moin (2023), Masri & Muslih (2022), serta Fayola & Nurbaiti (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel enterprise risk management. Kepemilikan para stakeholder



hanya mengincar keuntungan pribadi tanpa memberikan kontribusi pada kelancaran operasional perusahaan.

### Pengaruh Dewan Direksi dalam Memoderasi Komite Audit terhadap Enterprise Risk Management

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian menyatakan bahwa dewan direksi memoderasi komite audit terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Berdasarkan Hasil uji statistik yang tercantum pada tabel 4.19, pengaruh dewan direksi dalam memoderasi hubungan komite audit terhadap Enterprise Risk Management (ERM) memiliki nilai path coefficient negatif (-0,165) dan nilai signifikansi p-value yang lebih kecil dari 0,05 (0,047). Kondisi ini menunjukkan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan komite audit terhadap enterprise risk management sehingga secara empiris hipotesis keempat (H4) diterima.

Pengolahan dan pengujian data menggunakan WarpPLS versi 8, mengukur dewan direksi menggunakan proksi jumlah rapat dewan direksi pada periode tertentu. Hasil analisis dapat diartikan bahwa variabel dewan direksi memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh komite audit terhadap variabel enterprise risk management. Dewan direksi berperan sebagai variabel moderator yang mempengaruhi kekuatan dan arah hubungan antara komite audit dan ERM. Misalnya, dewan direksi yang kuat dan terlibat aktif dapat meningkatkan efektivitas komite audit dalam mendorong implementasi ERM. Sebaliknya, dalam situasi di mana dewan direksi kurang aktif atau memiliki struktur yang tidak mendukung, pengaruh komite audit terhadap ERM mungkin tidak sekuat yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Janitra & Moin (2023), Giarti & Sutrisno (2019), Zulaikha & Murtanto (2023) memberikan kesimpulan yaitu dewan direksi secara konsisten memiliki pengaruh positif terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Temuan penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya dari Masri & Muslih (2022), dan Qulyubi et al. (2023), yang menyatakan bahwa peran dewan direksi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap implementasi enterprise risk management.

## Pengaruh Dewan Direksi dalam Memoderasi Profitabilitas terhadap Enterprise Risk Management

Hipotesis kelima (H5) dalam penelitian menyatakan bahwa dewan direksi memoderasi profitabilitas terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Berdasarkan Hasil uji statistik yang tercantum pada tabel 4.19, pengaruh dewan direksi dalam memoderasi hubungan komite audit terhadap Enterprise Risk Management (ERM) memiliki nilai path coefficient positif (0,066) dan signifikansi nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 (0,257). Kondisi ini menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki tidak memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan profitabilitas terhadap enterprise risk management sehingga secara empiris hipotesis kelima (H5) ditolak.

Hasil pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa peran Dewan Direksi dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dan implementasi Enterprise Risk Management (ERM) tidak memiliki pengaruh signifikan. Dalam konteks ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berperan secara efektif dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap ERM di suatu perusahaan. Penolakan hipotesis ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, meskipun dewan direksi memiliki peran pengawasan, mungkin tidak ada keterlibatan yang cukup dalam memandu atau memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap keputusan ERM. Keterbatasan sumber daya, pemahaman yang kurang mendalam terkait risiko, atau fokus dewan direksi pada aspek-aspek bisnis lainnya dapat mempengaruhi dampak moderasi mereka. Kedua, terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar profitabilitas yang lebih dominan dalam memengaruhi implementasi ERM, sehingga peran dewan direksi dalam memoderasi variabel ini tidak dapat secara signifikan memengaruhi hubungan antara profitabilitas dan ERM.

## Pengaruh Dewan Direksi dalam Memoderasi konsentrasi kepemilikan terhadap Enterprise Risk Management

Hipotesis keenam (H6) dalam penelitian menyatakan bahwa dewan direksi memoderasi konsentrasi kepemilikan terhadap Enterprise Risk Management (ERM). Berdasarkan Hasil uji statistik yang tercantum pada tabel 4.19, pengaruh dewan direksi dalam memoderasi hubungan



konsentrasi kepemilikan terhadap Enterprise Risk Management (ERM) memiliki nilai path coefficient positif (0,182) dan nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 (0,032). Kondisi ini menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif signifikan dalam memoderasi hubungan konsentrasi kepemilikan terhadap enterprise risk management sehingga secara empiris hipotesis keenam (H6) diterima.

Dewan direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen. Dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, terdapat risiko bahwa keputusan manajemen lebih dipengaruhi oleh pemilik mayoritas, yang mungkin memiliki kepentingan pribadi. Dewan direksi yang kuat dan independen dapat membantu mengawasi tindakan manajemen, memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan risiko secara menyeluruh. Dewan direksi yang efektif dapat memastikan bahwa keputusan strategis dan manajemen risiko dibuat dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan informasi yang relevan. Dewan direksi juga dapat berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik mayoritas dan stakeholder lainnya. Ini mencakup memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya fokus pada kepentingan pemilik mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara empiris komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap enterprise risk management. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap enterprise risk management. Konsentrasi kepemilikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap enterprise risk management. Dewan direksi mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap enterprise risk management. Dewan direksi mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh komite audit terhadap enterprise risk management. Dewan direksi tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap enterprise risk management.

Saran dari penelitian ini, perusahaan sebaiknya segera beradaptasi dengan mengacu pada pengukuran COSO terbaru, yaitu yang dikeluarkan pada tahun 2017. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diimplementasikan sesuai dengan standar terkini, meningkatkan keefektifan, dan relevansi dalam menghadapi dinamika risiko saat ini. Selain itu, Perusahaan disarankan untuk meningkatkan peran dan fungsionalitas komite audit dalam mengelola risiko perusahaan. Langkah-langkah proaktif seperti peningkatan kompetensi anggota komite audit, implementasi prosedur audit yang lebih ketat, dan keterlibatan aktif dalam proses manajemen risiko dapat membantu meningkatkan efektivitas Enterprise Risk Management (ERM). Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan diversifikasi kepemilikan sebagai strategi untuk mengurangi konsentrasi kepemilikan, sehingga mengurangi potensi dampak negatif terhadap ERM.

Bagi investor, investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan manajemen risiko, kualitas komite audit, dan diversifikasi kepemilikan sebagai bagian dari analisis investasi mereka. Pemahaman mendalam terhadap bagaimana perusahaan mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam praktik mereka dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang resiliensi perusahaan terhadap risiko. Investor yang memperhitungkan faktor-faktor ini dalam keputusan investasi mereka dapat lebih efektif mengelola portofolio mereka dan mengurangi potensi dampak risiko.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mencoba menambahkan variabel independen lainnya untuk mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi enterprise risk management perusahaan. Selain itu, disarankan untuk menggunakan variabel moderating lain, seperti komite audit, umur perusahaan, dan dewan komisaris, karena masih terbatasnya penelitian yang mempertimbangkan variabel moderating dalam konteks enterprise risk management. Tindakan penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada penerapan enterprise risk management dalam sektor yang lebih spesifik, misalnya sektor keuangan atau perbankan. Fokus pada suatu sektor yang lebih homogen dapat menjadi pendekatan yang menarik untuk menguji sejauh mana varian analisis ini bersifat seragam.



## Daftar Pustaka

- Anggraini, S., & Terzaghi, M. T. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RISK MANAGEMENT DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2021. *Menara Ekonomi*, 8(1), 168–180.
- Arief, A. R. W., Mansur, M., & Slamet, A. R. (2022). Determinan Pengungkapan Enterprise Risk Management Terhadap Perusahaan Perbankan di Indonesia. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 124–138. [www.fe.unisma.ac.id](http://www.fe.unisma.ac.id)
- Cahyono, K. E. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI. *Jurnal Eksekutif*, 20, 54–73.
- Fayola, D. N. W. B., & Nurbaiti, A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, KonsentrasiKepemilikan, Reputasi Auditor dan Risk Management Committee terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 01–24.
- Febriandhani, F., Muslih, M., & M. Tresna, G. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Risk Management Committee Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Kasus Pada perusahaan BUMN Non Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *E-Proceeding of Management*, 10(2).
- Giarti, P. I., & Sutrisno. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ERM.
- Herlambang, D. P., & Hapsari, D. P. (2024). Concentrated Ownership and Firm Value: The Mediation Role Of Risk Management Disclosure. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 606–616. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1844>
- Janitra, M. M., & Moin, A. (2023). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Studi Empiris pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). *Indonesian Journal of Economics, Business, Accounting, and Management*, 01(05), 29–48.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. PT RajaGrafindo Persada.
- Kock, N. (2021). WarpPLS User Manual : Version 8.0.
- Kusumaningrum, D., Setiyowati, S. W., & Sari, A. R. (2023). THE INFLUENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS, RISK MANAGEMENT COMMITTEE, OWNERSHIP CONCENTRATION AND PROFITABILITY ON ENTERPRISE RISK MANAGEMENT. *Assets*, 13(2), 315–327.
- Lokaputra, M., Anugerah, R., & Kurnia, P. (2022). PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 17(1).

- Masri, H. K., & Muslih, M. (2022). PENGARUH DEWAN DIREKSI, RISK MANAGEMENT COMMITTEE DAN KONSENTRASI KEPEMILIKAN TERHADAP ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (STUDI PADA PERUSAHAAN KELUARGA SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE (2016-2020). *Eduonomika*, 06(01).
- Noviana, D., & Mappadang, A. (2022). Efek Good Corporate Governance dan Rasio Keuangan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi*, 12(1), 71-84. <https://doi.org/10.24036/01116680>
- Oktavia, R. A., & Isbanah, Y. (2019). PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PADA BANK KONVENSIONAL DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(4), 954-965.
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3).
- Ramdhani, A., & Khairunnisa. (2021). INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND PROFITABILITY ON DISCLOSURE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (Study on Banking Sub-Sectors Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-2019 period). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5008.
- Rosiani, R., & Honesty, F. F. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Good Corporate Governance terhadap Risk Management Disclosure. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(4), 1364-1381. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1055>
- Rujiin, C., & Sukirman. (2020). The Effect of Firm Size, Leverage, Profitability, Ownership Structure, and Firm Age on Enterprise Risk Management Disclosures. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 81-87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i2.33025>
- Syafina, D. C. (2019, October 8). Kisah Forever 21 yang Tidak Bisa Bertahan Selamanya. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kisah-forever-21-yang-tidak-bisa-bertahan-selamanya-ei96>
- Utami, W., Oktris, L., Rini, & Yulianti, N. W. (2021). Corporate Governance Practices and Disclosure of Risk Management Sharia Bank in Asean. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 121-136. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19712>
- Yubiharto, & Rudianti, W. (2021). The Effectiveness of Commissioners Board Size And Audit Committee Size on Risk Disclosure. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 168-171. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.218>



- Zaman, R., Nadeem, M., & Carvajal, M. (2021). Corporate governance and corporate social responsibility synergies: evidence from New Zealand. *Meditari Accountancy Research*, 29(1), 135–160. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-12-2019-0649>
- Zulaikha, I., & Murtanto. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Enterprise Risk Management. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 545–557. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969341>

# BAB VIII

## PENGARUH INTENSITAS MODAL, *LEVERAGE*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

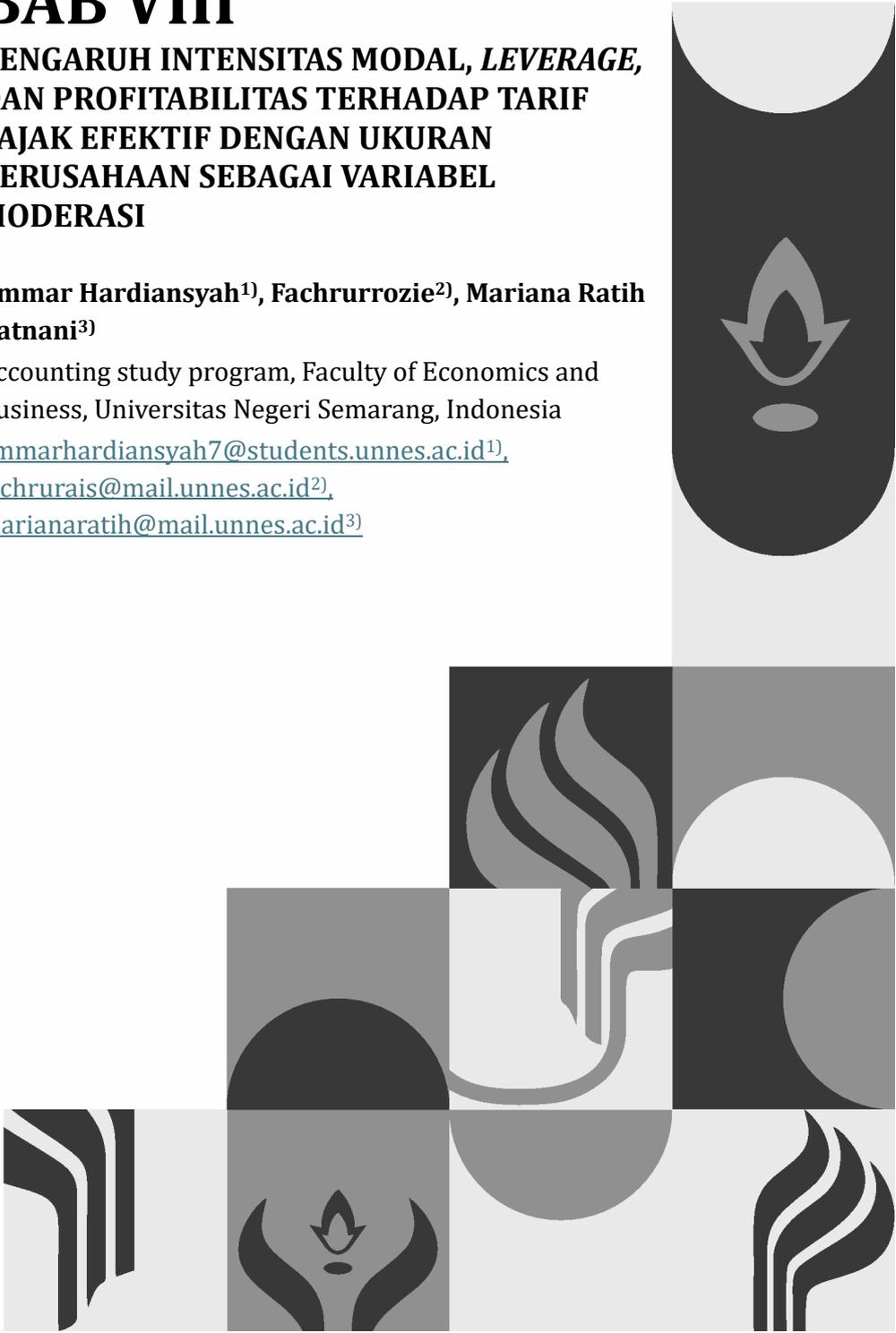
**Ammar Hardiansyah<sup>1)</sup>, Fachrurrozie<sup>2)</sup>, Mariana Ratih  
Ratnani<sup>3)</sup>**

Accounting study program, Faculty of Economics and  
Business, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

[ammahardiansyah7@students.unnes.ac.id<sup>1\)</sup>](mailto:ammahardiansyah7@students.unnes.ac.id),

[fachrurais@mail.unnes.ac.id<sup>2\)</sup>](mailto:fachrurais@mail.unnes.ac.id),

[marianaratih@mail.unnes.ac.id<sup>3\)</sup>](mailto:marianaratih@mail.unnes.ac.id)



**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, leverage dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022 yang berjumlah 32 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh 105 unit data sampel penelitian. Data ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan BEI. Metode analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan software SPSS 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Kemudian, ukuran perusahaan dapat dimoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal, *leverage* dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu intensitas modal, *leverage*, dan profitabilitas yang dipilih berdasarkan temuan yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya. Orisinalitas dalam penelitian ini terletak pada penambahan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitiannya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Kata Kunci: intensitas modal, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, *effective tax rate*

## **Pendahuluan**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara, tinggi atau rendahnya pendapatan pajak dapat menentukan seberapa baik anggaran negara dapat membiayai pengeluaran negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara untuk mewujudkan kemakmuran rayat (Halomoan & Sitabuana, 2022)

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah di audit, pada tahun 2019 menunjukkan jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 triliun atau setara 86,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.786,4 triliun. Pada tahun 2020, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 1.285,1 triliun atau setara 91,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.404,5 triliun. Hal tersebut, menunjukan bahwa Indonesia dalam kondisi krisis yang di akibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang cukup resilient dalam menghadapi guncangan perkonomian. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 1.547,8 triliun atau setara 107,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.444,5 triliun. Hal ini, membuktikan bahwa Indonesia berhasil memulihkan perekonomian setelah Pandemi Covid-19 dengan cara mengoptimalkan penerimaan negara melalui sector pajak. Berikut ini merupakan penerimaan pendapatan negara yang berasal dari pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 8. 9 Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2015	Rp 1.489.255.488.129.000	Rp 1.240.418.857.626.377	83,29%
2016	Rp 1.539.166.244.581.000	Rp 1.284.970.139.927.481	83,48%
2017	Rp 1.472.709.861.675.000	Rp 1.343.529.843.798.510	91,23%
2018	Rp 1.618.095.493.162.000	Rp 1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	Rp 1.786.378.650.376.000	Rp 1.546.141.893.392.193	86,55%
2020	Rp 1.404.507.505.772.000	Rp 1.285.136.317.135.799	91,50%
2021	Rp 1.444.541.564.794.000	Rp 1.547.841.051.644.624	107,15%
2022	Rp 1.783.987.986.654.000	Rp 2.034.552.436.470.075	114,05%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Audited), 2024

Menurut Halomoan & Sitabuana (2022), Pajak memainkan peran penting dalam kehidupan sebuah negara, terutama selama proses pembangunan dikarenakan pajak memberikan dana kepada negara untuk membiayai semua biaya pembangunan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak (kemenkeu.go.id, 2022). Pajak bagi perusahaan merupakan suatu beban yang dapat mengurangi jumlah keuntungan

yang akan diperoleh perusahaan, sehingga pihak perusahaan akan berusaha untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar menjadi serendah mungkin.

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan oleh manajer perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak untuk membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih efektif. Dengan menggunakan nilai effective tax rate (ETR), perusahaan dapat melakukan analisis beban pajak yang lebih efektif. Seperti yang diungkapkan oleh (C. L. Putri & Lautania, 2016), salah satu cara untuk mengetahui seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat persentase tarif pajak efektifnya (effective tax rate).

Fenomena perusahaan yang melakukan upaya mengurangi jumlah pajak dengan analisis nilai effective tax rate (ETR) salah satunya dilakukan pada perusahaan disektor pertambangan. Kontribusi pajak dari nilai ekonomi yang diberikan oleh perusahaan pertambangan pada sektor batubara ternyata sangat kecil. Menurut data dari kementerian keuangan, perusahaan pertambangan dan batubara hanya menyumbang 3,9% dari penerimaan pajak tahun 2016, sedangkan tax ratio nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Tax ratio yang rendah tidak terlepas dari penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Kementerian keuangan melaporkan bahwa banyak pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batu bara banyak yang tidak melaporkan SPT tahunannya. Pada tahun 2015, sebanyak 4.532 wajib pajak dari 8.003 yang tercatat tidak melaporkan SPT-nya. Jumlah tersebut tentunya belum termasuk perusahaan pertambangan skala kecil yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak (katadata.co.id, 2019).

Fenomena yang terjadi pada permasalahan kasus mengurangi jumlah pajak dengan analisis nilai effective tax rate (ETR) yang dilakukan oleh PT. Adaro Energi TBK. PT. Adaro Energi TBK menggunakan negara suaka pajak untuk melindungi dana dan aset yang disimpan di negara tersebut dari pengenaan pajak. Menurut Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, menyatakan bahwa salah satu langkah untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi peraturan berlaku adalah dugaan awal melakukan tax avoidance yang muncul

berdasarkan laporan Global Witness. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan PT. Adaro Energi TBK. Menurut laporan tersebut, PT. Adaro Energi TBK diduga melarikan keuntungan dan pendapatannya ke luar negeri dalam upaya untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan PT. Adaro Energi TBK di Singapura, Coaltrade Services International untuk kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah kepada pemerintah Indonesia dari tahun 2009 hingga 2017 sebesar 125 juta USD. Dalam hal ini, PT Adaro Energi Tbk telah menggunakan pengalihan anggaran negara suaka pajak untuk mengurangi gugatan pajak senilai hampir 14 juta USD per tahun (<https://tirto.id/edKk>).

Penelitian ini diangkat atas dasar temuan research gap dan phenomena gap yang terdapat pada penelitian terdahulu terkait tarif pajak efektif. Berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan nilai *effective tax rate* (ETR), diantaranya intensitas modal, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, leverage, dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

## **Teori dan Pengembangan Hipotesis**

Tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pada kasus tersebut didasarkan pada agency theory atau teori agensi. Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan agency adalah suatu kontrak antara satu atau beberapa individu (principal) yang memberikan wewenang kepada pihak lainnya (agent) untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menjelaskan operasional perusahaan. Agency theory mempunyai fokus yang dalam pada hubungan antara dua pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan (Adityamurti & Ghazali, 2017). Manajemen sebagai agent mengharapkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang



saham sebagai principal ingin mengurangi biaya pajak yang dibayarkan (Masri & Martani, 2012).

Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan modal perusahaan yang berbentuk aset tetap (Putri & Lautania, 2016). Intensitas modal digunakan untuk menunjukkan proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Semakin lama umur aset tetap akibat penggunaan operasional perusahaan akan membuat menurunnya nilai manfaat dari aset tetap tersebut yang terjadi pada tiap tahunnya. Intensitas modal atau *capital intensity* dapat menentukan tingkat efisiensi dari entitas bisnis untuk membantu asetnya dalam memperoleh keuntungan dari hasil penjualan perusahaan (Putri et al., 2016). Teori agensi atau *agency theory* menyatakan bahwa depresiasi aset tetap digunakan manajer untuk menekan jumlah pajak terutang perusahaan. Manajer berusaha untuk menggunakan dana perusahaan yang menganggur untuk berinvestasi pada aset tetap (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Maka entitas bisnis akan memperoleh laba berupa penyusutan aset tetap yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak pada entitas bisnis. Ketika berinvestasi pada aset tetap entitas bisnis dapat memanfaatkan adanya penyusutan dari aset tetap tersebut, maka seorang manager perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai sesuai dengan penggantian rugi kinerja entitas bisnis yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernández-Rodríguez et al. (2019), Stamatopoulos et al. (2019), dan C. L. Putri & Lautania (2016) yang menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate* (ETR).

**H<sub>1</sub> : Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan terhadap pihak lain. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diperoleh perusahaan melalui hutang menunjukkan bahwa perusahaan semakin berani dalam mengambil

risiko dengan adanya beban bunga. Tingginya tingkat leverage perusahaan menunjukkan manajemen semakin baik dalam mengelola jumlah pajak yang akan dibayarkan. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar bunga hutang yang dibayar oleh perusahaan semakin besar pula pengurangan pajak yang dapat mereka terima serta meminimalkan beban pajak, maka perusahaan dapat mencapai laba yang lebih besar dan maksimal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fernández-Rodríguez et al. (2019) menyatakan bukti empiris bahwa leverage berpengaruh terhadap effective tax rate (ETR) dengan koefisien negatif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Steven et al. (2018), Sjahril et al. (2020), dan Bela & Kurnia (2022) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif

## **H<sub>2</sub> : Leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.**

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan entitas bisnis untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang pengukurannya digunakan untuk mengukur kemampuan entitas bisnis dalam menggunakan aset secara produktif (Munawir, 2012). Menurut Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2014) menjelaskan bahwa terdapat hubungan langsung antara profitabilitas terhadap *effective tax rate* (ETR) yang dilandaskan pada tingkat pendapatan dengan biasanya berbanding lurus ketika membayarkan pajaknya, hal ini membuat entitas bisnis memiliki tingkat keuntungan yang relatif tinggi maka akan membuat pajak perusahaan juga makin tinggi. Profitabilitas sering dijadikan sebagai penilaian atas kinerja manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Profitabilitas merupakan tujuan utama dari manajemen untuk mencapai tujuan tersebut tentu tidak didapat dengan mudah, perlu memperhatikan baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Jika tarif pajak efektif pada entitas bisnis tinggi maka profitabilitas juga tinggi dan sebaliknya jika tarif pajak efektif pada entitas bisnis rendah maka profitabilitasnya juga rendah. Teori agensi atau *agency theory* menyatakan bahwa suatu manajemen perusahaan akan mengupayakan untuk meningkatkan labanya. Peningkatan laba perusahaan dapat terjadi apabila laba yang diperoleh tinggi dan berdampak pada meningkatnya pajak penghasilan yang di dapatkan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ambarukmi & Diana



(2017) menyatakan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Greeff (2019) Panda & Nanda (2018) dan Soenarno (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

### **H<sub>3</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.**

Ukuran perusahaan adalah sebuah pengukuran yang ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya perusahaan serta menggambarkan aktivitas perusahaan (Afriani et al., 2021). Apabila semakin besar perusahaannya, maka akan kompleks juga aktivitas perusahaannya. Ukuran perusahaan akan memberikan kontribusi untuk mengembangkan dari teori agensi yang menggambarkan eksistensi perbedaan antara *principal* dan agen dikarenakan pemegang saham sebagai *principal* menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi, tetapi manajemen selaku agen mengharapkan adanya sebuah kompensasi lebih atas kinerjanya demi memaksimalkan laba bersih perusahaan. Manajemen perusahaan sebagai agen akan mempertimbangkan kegiatan investasi aset tetap perusahaan untuk memaksimalkan laba. Semakin besar perusahaan, kegiatan investasi aset tetap akan semakin bertambah seiring dengan bertumbuhnya perusahaan. Oleh karena itu, manajemen dapat menggunakan penilaian intensitas modal untuk menekan jumlah *effective tax rate* (ETR) dikarenakan menjadi salah faktor yang bisa mempengaruhi dari nilai tarif pajak efektif (Aulia & Ernandi, 2022). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stamatopoulos et al. (2019) dan Fernández-Rodríguez et al. (2019) menyatakan bahwa hasil yang sama yaitu memberikan bukti empiris bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien negatif. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari & Wahyudin (2020) memberikan bukti empiris bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rianto & Alfian (2022) juga memberikan bukti empiris mengenai intensitas modal yang tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Perbedaan hasil penelitian terdahulu menjadikan dasar penelitian ini untuk menghadirkan variabel moderating ukuran perusahaan untuk

dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *effective tax rate* (ETR).

**H<sub>4</sub> : Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif.**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Berdasarkan teori agensi, manajemen sebagai agen akan mempertimbangkan pendanaan yang bersumber dari hutang guna mendukung operasional perusahaan. Hutang dapat dimanfaatkan dalam mengurangi jumlah *effective tax rate* (ETR) akibat adanya beban bunga hutang yang merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Besar kecilnya perusahaan akan membuat manajemen mempertimbangkan batas jumlah maksimal penerimaan pendanaan dari hutang untuk mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan. Hutang akan mampu menekan nilai *effective tax rate* (ETR) tetapi jumlah hutang akan dipertimbangkan pada besar kecilnya perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panda & Nanda (2018) dan Fernández-Rodríguez et al. (2019) menyatakan bahwa hasil yang sama yaitu memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien negatif. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rianto & Alfian (2022) justru memberikan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumalasari & Wahyudin (2020) juga memberikan bukti empiris mengenai *leverage* yang tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Berdasarkan hasil uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel moderating dapat memoderasi dengan memperlemah pengaruh variabel independen *leverage* terhadap variabel dependen tarif pajak efektif.

**H<sub>5</sub> : Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif.**

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset



dan modal saham tertentu (Saragih & Halawa, 2022). Ketika perusahaan telah mengalami laba, maka dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendapatan dari penghasilan total aset. Selain itu, profitabilitas dapat mengurangi beban pajak dikarenakan perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan teori agensi, manajemen selaku agen akan mengupayakan untuk meningkatkan laba perusahaan dan berdampak pada peningkatan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Halawa (2022) memberikan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR) dengan koefisien positif. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Subiyanto (2021) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* (ETR). Berdasarkan hasil uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel moderating dapat memoderasi dengan memperkuat pengaruh variabel independen profitabilitas terhadap variabel dependen tarif pajak efektif.

**H<sub>6</sub> : Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.**

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan pengujian hipotesis analisis Moderated Regression Analysis (MRA). Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui laman Bursa Efek Indonesia ataupun website perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 sehingga didapat 105 unit data yang menjadi sampel penelitian.

*Tabel 8. 10 Ringkasan Definisi Operasional*

Variabel	Singkatan	Metode pengukuran	Referensi
Tarif Pajak Efektif ( <i>Effective Tax Rate</i> )	ETR	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Kumalasari & Wahyudin, 2020)
Intensitas Modal ( <i>Capital Intensity</i> )	INMO	$CIR = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	(Ambarukmi & Diana, 2017)
<i>Leverage</i>	LEV	$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$	(Hanafi & Halim, 2016)
Profitabilitas	PROFIT	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$	(Yunita & Robiyanto, 2021).
Ukuran Perusahaan	SIZE	Size = Ln Total Aset	(Sofat & Singh, 2017).

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024

## Hasil

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk menganalisis data penelitian. Analisis data penelitian dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk memenuhi dua keperluan pokok, pertama digunakan untuk keperluan penyajian profil variabel penelitian secara individual dan kedua digunakan untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian. Analisis inferensial digunakan digunakan untuk menguji hipotesis dalam suatu penelitian. Sedangkan, untuk analisis regresi dengan variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji interaksi Moderated Regression Analysis (MRA). Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk menggunakan alat bantu analisis data dengan menggunakan software statistic IBM SPSS version 26.

## Hasil Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Tabel 8. 11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13918275
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,065

	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai Asymp-Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05. Maka, H0 diterima karena data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 8. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	INMO (X1)	,914	1,094
	LEV (X2)	,796	1,256
	PROFIT (X3)	,822	1,216
	SIZE (Z)	,991	1,009

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa diperoleh nilai tolerance dari intensitas modal sebesar 0,914, leverage sebesar 0.796, profitabilitas sebesar 0,822, dan ukuran perusahaan sebesar 0,991 dan nilai VIF dari intensitas modal sebesar 1.094, leverage sebesar 1,256, profitabilitas sebesar 1,216, dan ukuran perusahaan sebesar 1,009. Hasil output tersebut mengindikasikan nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF <10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

Tabel 8. 13 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,01113
Cases < Test Value	52
Cases >= Test Value	52
Total Cases	105

Number of Runs	51
Z	-,394
Asymp. Sig. (2-tailed)	,693
a. Median	

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa menghasilkan nilai test value sebesar 0,01113 dengan nilai Asymp-Sig (2-tailed) sebesar 0,693. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. 14 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,203	,128		1,583	,116
	INMO (X1)	-,026	,039	-,066	-,661	,510
	LEV (X2)	,021	,064	,035	,323	,748
	PROFIT (X3)	-,230	,088	-,272	-2,609	,104
	SIZE (Z)	-,008	,021	-,037	-,384	,702

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 6 diatas, menunjukan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel tersebut sudah di atas tingkat kepercayaan 5% atau lebih dari 0,05, sehingga dapat diperoleh kesimpulan model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 8. 15 Hasi Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,582 <sup>a</sup>	,338	,291	,12426171

a. Predictors: (Constant), X3\_Z, INMO (X1), SIZE (Z), LEV (X2), PROFIT (X3), X1\_Z, X2\_Z

Sumber: Output SPSS 26, 2024

Berdasarkan hasil tabel 7 diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,291 yang berarti 29,1% saja variabel tarif pajak

efektif yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, diantaranya intensitas modal, leverage, dan profitabilitas serta interaksi variabel independen dengan variabel moderasi ukuran perusahaan. Kemudian, nilai sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh faktor diluar model regresi.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 8. 16 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,325	,678		1,955	,053
	INMO (X1)	1,004	,217	1,595	4,632	,000
	LEV (X2)	-1,313	,558	-1,342	-2,354	,021
	PROFIT (X3)	-1,402	,465	-1,028	-3,012	,003
	SIZE (Z)	-,097	,096	-,276	-1,003	,318
	X1_Z	-,035	,007	-1,709	-4,932	,000
	X2_Z	,045	,017	1,563	2,613	,010
	X3_Z	,063	,032	,702	1,999	,048

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Mengacu pada tabel di atas dapat menghasilkan suatu persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_2 * Z) + \beta_6 (X_3 * Z) + e$$

Intensitas modal (X1) terhadap tarif pajak efektif (Y)

Hasil uji t antara variabel intensitas modal (X1) terhadap tarif pajak efektif (Y) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 1,004 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, karena nilai koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Leverage (X2) terhadap tarif pajak efektif (Y)

Hasil uji t antara variabel leverage (X2) terhadap tarif pajak efektif (Y) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -1,313 dan nilai

signifikansi sebesar 0,021. Hal ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, karena nilai koefisien regresi yang bernilai negatif dan nilai signifikan  $0,021 < 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif diterima.

Profitabilitas (X3) terhadap tarif pajak efektif (Y)

Hasil uji t antara variabel profitabilitas (X3) terhadap tarif pajak efektif (Y) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -1,402 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif, karena nilai koefisien regresi yang bernilai negatif dan nilai signifikan  $0,003 < 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Interaksi antara intensitas modal (X1) dengan ukuran perusahaan (Z)

Hasil uji t interaksi antara variabel intensitas modal (X1) dengan ukuran perusahaan (Z) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa hasil interaksi antara variabel intensitas modal (X1) dengan variabel ukuran perusahaan (Z) memberikan pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai koefisien  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menjadi bukti empiris bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal (X1) terhadap tarif pajak efektif (Y) karena hasil koefisien semula antara intensitas modal terhadap tarif pajak efektif adalah positif. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif diterima.

Interaksi antara *leverage* (X2) dengan ukuran perusahaan (Z)

Hasil uji t interaksi antara variabel leverage (X2) dengan ukuran perusahaan (Z) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,045 dan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa hasil interaksi antara variabel leverage (X2) dengan variabel ukuran perusahaan (Z) memberikan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai koefisien  $0,010 < 0,05$ . Hal ini menjadi bukti



empiris bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh leverage (X2) terhadap tarif pajak efektif (Y) karena hasil koefisien semula antara intensitas modal terhadap tarif pajak efektif adalah negatif. Oleh karena itu, hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh leverage terhadap tarif pajak efektif diterima.

Interaksi antara profitabilitas (X3) dengan ukuran perusahaan (Z)

Hasil uji t interaksi antara variabel profitabilitas (X3) dengan ukuran perusahaan (Z) pada tabel 9 memiliki nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,063 dan nilai signifikansi sebesar 0,048. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa hasil interaksi antara variabel profitabilitas (X3) dengan variabel ukuran perusahaan (Z) memberikan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dengan nilai koefisien  $0,048 < 0,05$ . Hal ini menjadi bukti empiris bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas (X3) terhadap tarif pajak efektif (Y) karena hasil koefisien semula antara intensitas modal terhadap tarif pajak efektif adalah negatif. Oleh karena itu, hipotesis keenam (H6) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif ditolak.

### **Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Intensitas modal atau *capital intensity* merupakan modal dalam bentuk aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Pada penelitian ini, intensitas modal diproksikan dengan menggunakan CIR (*Capital Intensity Ratio*) yaitu membandingkan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan antara intensitas modal dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa depresiasi aset tetap suatu perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menekan jumlah beban pajak

perusahaan. Manajer akan memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk aset tetap, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa depresiasi yang timbul dari aset tetap yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Ernandi, 2022), (Kumalasari & Wahyudin, 2020), dan (Lumbuk & Fitriasuri, 2022).

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya (Kumalasari & Wahyudin, 2020). Pada penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan menggunakan DAR (*Debt to Asset Ratio*) yaitu membandingkan antara total hutang dengan total aset. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan antara *leverage* dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa suatu perusahaan akan mempertimbangkan pendanaan yang bersumber dari hutang dengan tujuan meminimalkan beban pajak perusahaan. Bunga yang dibayarkan atas hutang perusahaan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan sebelum menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, semakin besar bunga hutang yang dibayar oleh perusahaan semakin besar pula pengurangan pajak yang dapat mereka terima. Dengan meminimalkan beban pajak, maka perusahaan dapat mencapai laba yang lebih besar dan maksimal.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fernández-Rodríguez et al., 2019), (Panda & Nanda, 2018), (Sjahril et al., 2020) dan (Bela & Kurnia, 2022).



### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan entitas bisnis untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu yang pengukurannya digunakan untuk mengukur kemampuan entitas bisnis dalam menggunakan aset secara produktif (Munawir, 2012). Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROA (Return on Asset) yaitu membandingkan antara laba setelah pajak dengan total aset. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa suatu manajemen perusahaan akan mengupayakan untuk meningkatkan laba pada perusahaannya. Peningkatan laba perusahaan dapat terjadi ketika memperoleh keuntungan yang tinggi dapat berakibat pada peningkatan pajak perusahaan. Meningkatnya nilai profitabilitas suatu perusahaan akan menyebabkan nilai tarif pajak efektif yang rendah, maka kinerja manajemen pada perusahaan juga baik. Profitabilitas mencerminkan usaha perusahaan dalam memperoleh laba melalui kegiatan perusahaan agar bermanfaat untuk sumber daya yang dimiliki entitasnya.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariani & Hasymi, 2018), (Alkurdi et al., 2022) dan (Aulia & Ernandi, 2022).

### **Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif. Intensitas modal dalam investasi berupa aset tetap yang digunakan manajemen untuk menekan dari nilai tarif pajak efektif (ETR). Semakin ukuran perusahaan yang tinggi pada aktivitas

operasionalnya serta investasi aset tetapnya tinggi maka akan mempengaruhi dari nilai tarif pajak efektif (ETR). Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan interaksi ukuran perusahaan antara intensitas modal dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa ketika manajemen sebagai agen menginginkan kompensasi yang tinggi, maka manajemen juga harus menghasilkan laba yang tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan cukup untuk mempengaruhi keputusan manajemen dalam memanfaatkan aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk menekan nilai dari tarif pajak efektif (ETR). Selain itu, manajemen pada perusahaan besar atau kecil mungkin akan menggunakan strategi lain dalam menekan nilai tarif pajak efektif yang bisa lebih menguntungkannya.

### **Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif. *Leverage* akan mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan utang akibat dari beban bunga hutang sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang menyebabkan menekan dari nilai tarif pajak efektif. Suatu ukuran perusahaan bisa dikatakan besar atau kecilnya akan membuat manajemen mempertimbangkan batas jumlah maksimal penerimaan dana dari hutang untuk mengurangi risiko yang ditanggung perusahaan. Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan interaksi ukuran perusahaan antara *leverage* dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperlemah pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa hubungan keagenan dimaksudkan sebagai sebuah kontrak dimana pemegang saham selaku *principal* mempekerjakan manajemen selaku agen untuk bertindak atas nama *principal* dengan melibatkan pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan dan



mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya sehingga perusahaan dapat meraih laba yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi manajemen untuk selalu menjadikan hutang sebagai sebuah kebijakan untuk meningkatkan laba dengan cara memanfaatkan beban bunga hutang untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau menekan nilai dari tarif pajak efektif (ETR).

### **Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Tarif Pajak Efektif**

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas akan mengukur suatu perusahaan besar atau kecil dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Suatu besar kecilnya ukuran perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi bisa dapat mengurangi pajak dengan memanfaatkan keuntungan insentif pajak untuk menekan dari nilai tarif pajak efektif (ETR). Berdasarkan hasil tabel 9 yang menguji hubungan interaksi ukuran perusahaan antara profitabilitas dengan tarif pajak efektif yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, yang mengasumsikan bahwa manajemen selaku agen akan mengupayakan untuk meningkatkan laba perusahaan dan berdampak pada peningkatan pajak penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam meningkatkan nilai tarif pajak efektifnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya perusahaan tidak dapat mempengaruhi manajemen untuk selalu menjadikan profitabilitas sebagai sebuah kebijakan atau tolak ukur menekan nilai dari tarif pajak efektif (ETR) yang memanfaatkan adanya insentif pajak oleh pemerintah.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah variabel intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak

efektif. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Kemudian, ukuran perusahaan mampu menjadi memoderasi dengan memperlemah pengaruh intensitas modal, leverage dan profitabilitas terhadap tarif pajak efektif.

Manajemen perusahaan dapat menggunakan pengukuran effective tax rate (ETR) sebagai alat ukur untuk menganalisis dan memperkirakan jumlah besaran beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Dengan demikian, manajemen dapat merancang strategi untuk mencapai tarif pajak yang efektif serta lebih menguntungkan bagi perusahaan.

Para peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel penelitian mereka ke perusahaan pertambangan yang lebih spesifik dalam subsektor mereka, serta memperpanjang periode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi objek yang diteliti. Di samping itu, para peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen yang memiliki potensi untuk memengaruhi nilai Effective Tax Rate (ETR) perusahaan dan juga mempertimbangkan penggunaan variabel moderasi lain yang terkait dengan Effective Tax Rate (ETR). Selain itu, para peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan proksi rasio keuangan lainnya untuk mengukur intensitas modal, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

## Daftar Pustaka

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–12.
- Afriani, D., Suliska, G., & Nelvia, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Ratio, Likuiditas, Activity Ratio, Leverage dan Size Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(2), 97–112.
- Alkurdi, A., Almarayeh, T., Bataineh, H., Al Amosh, H., & Khatib, S. F. A. (2022). Corporate Profitability and Effective Tax Rate: The Moderating Role of Board Gender Diversity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(1), 153–171. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2022-0122>
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability,



- Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 06(17), 13–26.
- Ariani, M., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 452–463.
- Aulia, N. A., & Ernandi, H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 16(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.791>
- Bela, Z. S., & Kurnia. (2022). Pengaruh Firm Size , Leverage , dan Profitability terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif ( Studi pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020 ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 245–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2019). Influence of Ownership Structure On The Determinants of Effective Tax Rates of Spanish Companies. *Sustainability (Switzerland)*, 11(5), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su11051441>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Countries. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50, 214–228. <https://doi.org/10.2753/REE1540-496X5003S313>
- Greeff, C. (2019). Corporate Effective Tax Rates: An Exploratory Study of South African Listed Firms. *South African Journal of Accounting Research*, 33(2), 99–113. <https://doi.org/10.1080/10291954.2019.1638589>
- Halomoan, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Pajak, pandemi, dan masyarakat. *Sibatik Journal*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hanafi, & Halim. (2016). *Analisis Laporan Keuangan (5th ed.)*. UPP STIM YKPN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Kumalasari, D., & Wahyudin, A. (2020). Pengaruh Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (ETR) Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 1(2), 53–66. <https://doi.org/10.56696/jaka.v1i2.4281>
- Lumbuk, R. A., & Fitriasuri, F. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>

- Masri, I., & Martani, D. (2012). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya, XV*(1), 1–27.
- Munawir. (2012). *Analisis Informasi Keuangan (Edisi 4)*. Liberty Yogyakarta.
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2018). Receptiveness of Effective Tax Rate to Firm Characteristics: An Empirical Analysis on Indian Listed Firms. *Journal of Asia Business Studies, 15*(1), 198–214. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure dan Profitability Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 -2014). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1*(1), 101–119.
- Putri, S. E., Agusti, R., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA), Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Tarif Pajak Efektif. *JOM Fekom, 3*(1), 1506–1519.
- Rianto, & Alfian, M. (2022). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2020). *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi, 2*(2), 100–115. <https://doi.org/10.35814/relevan.v2i2.3462>
- Saragih, A. E., & Halawa, B. B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8*(1), 8–23. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1755>
- Sjahril, R. F., Yasa, I. N. P., & Dewi, G. A. K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan ( Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 11*(1), 56–65.
- Soenarno, Y. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 10*(2), 167–174. <https://doi.org/10.30813/jab.v10i2.994>
- Sofat, R., & Singh, S. (2017). Determinants of capital structure: An empirical study of manufacturing firms in India. *International Journal of Law and Management, 59*(6), 1029–1045. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2016-0051>
- Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining Corporate Effective Tax Rates: Evidence From Greece. *Economic Analysis and Policy, 62*, 236–254. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>
- Steven, R., Ratnawati, V., & Julita. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015). *Jurnal Ekonomi, 26*(2), 122–137.



- Subiyanto, B. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Ukuran Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate ( Studi pada Perusahaan Sub Sektor Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017). In *Jurnal Ilmu Akuntansi* (Vol. 19, Issue 1, pp. 45–69).
- Yunita, & Robiyanto. (2021). The Influence of Corporate Internal Factors and Market Risk on Company Value with Capital Structure as Mediation Variables in Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1), 11–24.